



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA Tahun 2023

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi mengenai capaian kinerja BPSPL Padang sepanjang tahun 2023 melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BPSPL Padang kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2023.

Di samping itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Kritik, masukan, dan saran sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan laporan ini. Atas perhatian dan dukungan semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Padang, 15 Januari 2024

Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang



Rajar Kurniawan, S.T., M.AP., M.MG.

Ringkasan Eksekutif

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2023 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya dalam mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), BPSPL Padang menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran strategis yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran 2023. Setelah melewati dinamika perubahan indikator kinerja yang dipengaruhi oleh faktor internal BPSPL Padang dan *refocusing* anggaran, pada akhirnya terdapat tujuh sasaran strategis dan 16 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Lebih lanjut, dilakukan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulannya untuk memperoleh gambaran konkret terkait aspek ketercapaian kinerja secara kuantitatif. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode tahun 2023 adalah **adalah 113,23 (kategori istimewa)**. Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang tahun 2023:

1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang telah mencapai 3 dari target 3 Dokumen melalui identifikasi/verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut.
2. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang telah mencapai 3 dari target 2 Daerah pendampingan pengusulan penetapan kawasan konservasi daerah di Provinsi Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatra Barat.
3. Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang telah mencapai 3 dari target 3 Kelompok melalui penyaluran bantuan kepada kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang telah mencapai 10 dari target 7 jenis melalui penyediaan data dan informasi jenis ikan dilindungi dan respon cepat penanganan biota laut dilindungi.
5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang telah mencapai 8 dari target 5 jenis melalui penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan pelayanan peredaran jenis ikan yang dimanfaatkan.
6. Nilai PNBK BPSPL Padang telah mencapai Rp958.877.695,00 dari target Rp524.347.000,00 melalui pelayanan peredaran jenis ikan yang dimanfaatkan.

7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang telah mencapai 95,34 dari target 93,75.
8. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang telah mencapai 90,24 dari target 86.
9. Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang telah mencapai 93,31 dari target 75.
10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang telah mencapai 90,82 dari target 84.
11. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang telah mencapai 88,20 dari target 75.
12. Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Padang telah mencapai 4 dokumen dari target 4 dokumen.
13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah mencapai 116,65% dari target 92%.
14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai 100% dari target 75%.
15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Padang mencapai 100% dari target 100%.
16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang mencapai 100 dari target 77,5.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja tahun 2023 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran pada awal tahun sejumlah Rp14.516.480.000,00** (Empat Belas Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Namun demikian, **terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp1.622.000.000,00** (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Adanya blokir tersebut tidak mempengaruhi pagu anggaran secara keseluruhan, namun anggaran yang terblokir tersebut belum dapat digunakan. Dalam perkembangannya, pada tanggal 30 Agustus 2023 **terdapat penambahan pagu anggaran BPSPL Padang yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1.239.428.000,00** yang mana merupakan hasil pembagian dari PNBP DJPKRL. Penambahan tersebut menyebabkan **peningkatan pagu anggaran BPSPL Padang menjadi Rp15.755.908.000,00** (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Lebih lanjut, pada tanggal 10 Oktober 2023 Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor S-371/MK.2/2023 menginstruksikan Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan relaksasi non belanja pegawai dari *automatic adjustment* dengan mengajukan usulan revisi pengurangan alokasi anggaran. Atas dasar hal tersebut, terdapat penarikan blokir Anggaran Biaya Tambahan senilai Rp1.200.000.000,00 dan pembukaan blokir anggaran senilai Rp184.000.000,00 sehingga pagu BPSPL Padang menjadi Rp14.555.908.000,00. Dinamika pun masih berlanjut dengan adanya pergeseran belanja pegawai ke eselon 1 sebesar Rp800.000.000,00 sehingga **pagu BPSPL Padang yang diukur kinerjanya pada tahun 2023 menjadi Rp13.755.908.000,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan total blokir sebesar Rp250.000.000,00. Hingga akhir tahun 2023, realisasi anggaran mencapai Rp13.388.427.399,00** (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) **dengan persentase 97,33%**. Dalam pengelolaan anggaran, terdapat nilai efisiensi sebesar 66,99 yang diukur menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu.

Upaya tindak lanjut dari rekomendasi triwulan sebelumnya telah diwujudkan melalui identifikasi calon kelompok potensial penerima bantuan konservasi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Jambi dan pemantauan penyusunan laporan-laporan kegiatan. Sementara itu, untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan hiu dan pari di Provinsi Riau dan pemanfaatan sidat di Kabupaten Agam dengan masa pendataan selama satu tahun,
2. Menambah lokasi rehabilitasi terumbu karang di Kabupaten Pasaman Barat dan Bintan.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	8
II. Perencanaan Kinerja.....	9
2.1. Rencana Strategis 2020-2024.....	9
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	13
III. Akuntabilitas Kinerja.....	16
3.1. Capaian Kinerja	16
IKU. 1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	18
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	18
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	19
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	19
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	19
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	19
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	19
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	20
H. Realisasi Anggaran.....	23
I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	24
IKU. 2. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah).....	24
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	24
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	24
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	25
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	25



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	25
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	26
H. Realisasi Anggaran.....	36
I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	37
IKU. 3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	37
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	37
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	39
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	39
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	39
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	39
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	40
H. Realisasi Anggaran.....	42
I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	43
IKU. 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis).....	43
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	43
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	44
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	44
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	44
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	44
F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	45
H. Realisasi Anggaran.....	57
I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	58
IKU. 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	58
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	58



B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	59
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	59
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	59
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	59
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	60
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	60
H.	Realisasi Anggaran.....	71
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	72
IKU. 6.	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	72
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	72
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	73
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	73
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	73
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	73
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	73
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	73
H.	Realisasi Anggaran.....	75
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	75
IKM. 7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	75
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	76
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	76
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	76
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	76
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	76
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	77
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	77
H.	Realisasi Anggaran.....	77
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	77
IKM. 8.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	77



A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	78
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	78
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	78
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	78
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	79
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	79
H.	Realisasi Anggaran	79
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	79
IKM. 9.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	79
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	80
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	80
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	80
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	81
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	81
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	81
H.	Realisasi Anggaran	83
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	83
IKM. 10.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)	83
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	84
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	85
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	85
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	85
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	85
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	86
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	86
H.	Realisasi Anggaran	86
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	86



IKM. 11.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang	86
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	87
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	87
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	87
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	87
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	88
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	88
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	88
H.	Realisasi Anggaran	90
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	90
IKM. 12.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	90
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	90
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini	91
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	91
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	91
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	91
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	91
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	92
H.	Realisasi Anggaran	92
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya	92
IKM. 13.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	93
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	93
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	93
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional	93
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	94
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	94
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	94
H.	Realisasi Anggaran	94



I.	Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya	94
IKM. 14.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	94
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	95
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	96
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	96
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	96
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	96
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	97
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	97
H.	Realisasi Anggaran.....	97
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	97
IKM. 15.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%).....	97
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	97
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	98
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	98
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	98
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	98
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	98
G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	98
H.	Realisasi Anggaran.....	98
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	98
IKM. 16.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang.....	99
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	99
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	100
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	100
D.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional.....	100
E.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan	100
F.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	100



G.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	101
H.	Realisasi Anggaran.....	103
I.	Rencana Aksi Tahun Selanjutnya.....	103
3.2.	Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Sejenis	103
3.3.	Realisasi Anggaran.....	105
IV.	Penutup	108
4.1.	Kesimpulan.....	108
4.2.	Rekomendasi.....	109
A.	Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III 2023	109
B.	Rekomendasi Tahun 2024	109
LAMPIRAN	110

Daftar Gambar

Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2023.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPSPL Padang.....	3
Gambar 3. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang.....	8
Gambar 4. Dinamika Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2023	15
Gambar 5. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Padang Tahun 2023.....	16
Gambar 6. Grafik Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang	20
Gambar 7. Potensi PNBH Hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2023	21
Gambar 8. Rekapitulasi Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Tahun 2023	21
Gambar 9 Rekapitulasi Perizinan PKKPRL yang Diterbitkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang Selama Tahun 2023	22
Gambar 10. Rekapitulasi Verifikasi Lapangan Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Tahun 2023	22
Gambar 11. Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Lingkup BPSPL Padang	23
Gambar 12. Dokumentasi Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Agam	26
Gambar 13. Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.....	27
Gambar 14. Dokumentasi Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Agam.....	28
Gambar 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan KK Agam.....	28
Gambar 16. Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Kawasan Konservasi Natuna	29
Gambar 17. Koordinasi Awal dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau.....	30
Gambar 18. Dokumentasi Workshop Pengumpulan Data Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau	30
Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau	32
Gambar 20. Dokumentasi Rapat Persiapan Survei Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pini.....	32
Gambar 21. Dokumentasi Survei di Nias Selatan	33
Gambar 22. Dokumentasi Konsultasi Publik Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pini.....	34
Gambar 23. Dokumentasi Konsultasi Publik II Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pini.....	35
Gambar 24. Dokumentasi Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Pini	36
Gambar 25. Dokumentasi Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Kelompok Poseidon Diver Mentawai.....	41
Gambar 26. Dokumentasi Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Kelompok Banyu Biru	41
Gambar 27. Dokumentasi Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Pokmaswas Hiu Macan	42
Gambar 28. Dokumentasi Supervisi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya	45
Gambar 29. Sidat Stadia Glass Eel	46
Gambar 30. Dokumentasi Pendataan Sidat di Kabupaten Kepulauan Mentawai	47
Gambar 31. Dokumentasi Pendataan Teripang di Pulau Siberut, Kabupaten Kep. Mentawai	48
Gambar 32. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai	48
Gambar 33. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Maspari	49
Gambar 34. Penyu yang Teridentifikasi di Pulau Maspari (A) Penyu Hijau (B) Penyu Sisik	49
Gambar 35. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar	50
Gambar 36. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Barat Daya	51
Gambar 37. Survival Rate Transplantasi Karang CSC Aceh Barat Daya Mei-November 2023	51
Gambar 38. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Pesisir Selatan	52
Gambar 39. Dokumentasi Belida Sumatra di Kabupaten Tebo	53
Gambar 40. Dokumentasi Belida Sumatra di Kabupaten Muara Enim.....	53
Gambar 41. Dokumentasi Belida Jawa di Kabupaten Muara Enim.....	53
Gambar 42. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR	53
Gambar 43. Dokumentasi Pendataan Terubuk di Labuhan Batu.....	54

Gambar 44. Nilai SPR Terubuk Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2023	54
Gambar 45. Dokumentasi Pendataan Terubuk di Provinsi Riau.....	54
Gambar 46. . Nilai SPR Terubuk Provinsi Riau Tahun 2023	55
Gambar 47. Dokumentasi Supervisi Pendataan Ikan Bilih di Danau Singkarak	55
Gambar 48. Ikan Bilih (<i>Mystacoleucus padangensis</i>).....	56
Gambar 49. Rekapitulasi Biota Laut Dilindungi Terdampar Sepanjang 2023.....	56
Gambar 50. Dokumentasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar	57
Gambar 51. Dokumentasi Sosialisasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar di Kabupaten Pesisir Selatan	57
Gambar 52. Dokumentasi Sosialisasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar di Kabupaten Pasaman Barat.....	57
Gambar 53. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo	61
Gambar 54. Jumlah Hiu yang Mendarat di PPS Kutaraja Lampulo Tahun 2023.....	61
Gambar 55. Jumlah Pari yang Mendarat di PPS Kutaraja Lampulo Tahun 2023	62
Gambar 56. Dokumentasi Hiu dan Pari yang Mendarat di PPS Lampulo	62
Gambar 57. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPP Labuhan Haji	63
Gambar 58. Hasil Pendataan Pendaratan Hiu dan Pari Labuhan Haji Tahun 2023	63
Gambar 59. Dokumentasi Hiu dan Pari yang Mendarat di PPP Labuhan Haji	64
Gambar 60. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga	64
Gambar 61. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	65
Gambar 62. Keragaman Hiu di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	65
Gambar 63. Keragaman Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	66
Gambar 64. Dokumentasi Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	66
Gambar 65. Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis	67
Gambar 66. Keragaman Hiu dan Pari yang Dldaratkan di Kabupaten Bengkalis.....	67
Gambar 67. Dokumentasi Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis.....	67
Gambar 68. Dokumentasi Pendataan Kuda Laut di Bintang	68
Gambar 69. CPUE Kuda Laut di Perairan Sebong Perih Tahun 2017-2023.....	68
Gambar 70. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Kabupaten Natuna	69
Gambar 71. Tren Jumlah Ikan Napoleon Tahun 2021-2023 di Kelurahan Sedanau	69
Gambar 72. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Kabupaten Kepulauan Anambas	70
Gambar 73. Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Potensi Pemanfaatan Sidat Stadia Dewasa di Kabupaten Aceh Tamiang	70
Gambar 74. Dokumentasi Pendataan Pemanfaatan Sidat di Kabupaten Agam.....	71
Gambar 75. Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja yang Melampaui Target PNBPN Tahun 2022	74
Gambar 76. Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Padang	78
Gambar 77. Dokumentasi Acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia lingkup KKP	83
Gambar 78. Tangkap Layar Capaian Indeks Profesionalitas ASN.....	85
Gambar 79. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	88
Gambar 80. Dokumentasi Evaluasi AKIP Tahun 2023	89
Gambar 81. Dokumentasi Pleno Evaluasi AKIP.....	90
Gambar 82. Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja Penyelenggaraan SPIP Terbaik Tahun 2022 untuk Kelompok UPT	92
Gambar 83. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang.....	96
Gambar 84. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan KOMPAK di Provinsi Aceh	102
Gambar 85. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan KOMPAK terhadap Tuah Basamo Diving.....	102
Gambar 86. Dokumentasi Pleno Penilaian Efektivitas Bantuan Pemerintah Tahun 2022	103
Gambar 87. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023.....	107



Daftar Tabel

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Padang 2020-2024	11
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang yang Diukur Kinerjanya	14
Tabel 3. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2023.....	16
Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1	18
Tabel 5. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 1 BPSPL Padang.....	19
Tabel 6. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut yang Dimonitor.....	23
Tabel 7. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKU 1	23
Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2	24
Tabel 9. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 2 BPSPL Padang.....	25
Tabel 10. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU2	36
Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3.....	37
Tabel 12. Penerima Bantuan KOMPAK Lingkup BPSPL Padang Tahun 2023	37
Tabel 13. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang.....	39
Tabel 14. Daftar Kelompok Calon Penerima Bantuan Konservasi yang Telah Diidentifikasi	42
Tabel 15. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 3	42
Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4.....	43
Tabel 17. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang.....	44
Tabel 18. Hasil Survei Sebaran Teripang di Pulau Siberut.....	47
Tabel 19. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Desa Betumonga, Kab. Kep. Mentawai	48
Tabel 20. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Pulau Salaut Besar	50
Tabel 21. Hasil Pendataan Ikan Belida Tahun 2023	52
Tabel 22. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 4	58
Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5.....	58
Tabel 24. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 5 BPSPL Padang	59
Tabel 25. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Tahun 2023.....	60
Tabel 26. Rincian Pendataan Napoleon Berdasarkan Usia di Kabupaten Natuna	69
Tabel 27. Rincian Pendataan Napoleon Berdasarkan Usia di Kabupaten Kepulauan Anambas	70
Tabel 28. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 5	71
Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6.....	72
Tabel 30. Rekapitulasi Perolehan PNBP Tahun 2023.....	74
Tabel 31. Penggunaan Dana PNBP Tahun 2023 Lingkup BPSPL Padang	74
Tabel 32. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 6	75
Tabel 33. Perbandingan Target dan Capaian IKM 7	76
Tabel 34. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 7 BPSPL Padang	76
Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian IKM 8	78
Tabel 36. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 8 BPSPL Padang	79
Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian IKM 9	80
Tabel 38. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 9 BPSPL Padang	81
Tabel 39. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Padang	82
Tabel 40. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 9	83
Tabel 41. Perbandingan Target dan Capaian IKM 10	84
Tabel 42. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 10 BPSPL Padang	85
Tabel 43. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 10	86
Tabel 44. Perbandingan Target dan Capaian IKM 11	87
Tabel 45. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 13 BPSPL Padang	87
Tabel 46. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKM 11	90
Tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12	91
Tabel 48. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 12 BPSPL Padang	91



Tabel 49. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13	93
Tabel 50. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 13 BPSPL Padang	94
Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14	95
Tabel 52. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023.....	95
Tabel 53. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 14 BPSPL Padang	96
Tabel 54. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15	97
Tabel 55. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 15 BPSPL Padang	98
Tabel 56. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16	99
Tabel 57. Hasil Pra-Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Bantuan KOMPAK TA 2022.....	101
Tabel 58. Hasil Penilaian Efektivitas Bantuan Pemerintah Tahun 2022 Lingkup BPSPL Padang	103
Tabel 59. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 16	103
Tabel 60. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Sejenis	104
Tabel 61. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Tahun 2023.....	105

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

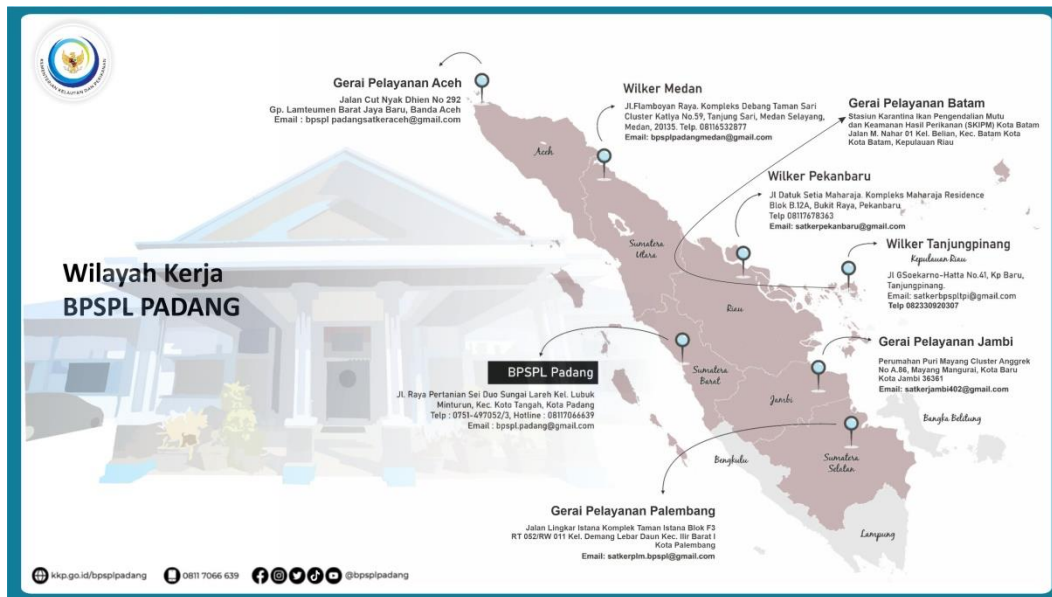
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj BPSPL Padang Tahun 2023 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga disusun dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Dalam penyajiannya, laporan ini dilengkapi dengan hasil capaian target dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSPL Padang yang berpedoman pada sasaran strategis yang diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja (IK). Adapun hasil capaian kinerja BPSPL Padang tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran pendukung kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan BPSPL Padang.

1.2 Tugas dan Fungsi

BPSPL Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang berorientasi menyukseskan rencana pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termaktub dalam prioritas nasional yaitu lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan pengelolaan risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir adalah:

1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetic ikan;
5. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BPSPL Padang memiliki wilayah kerja meliputi tujuh (7) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 60 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera. Selain itu, BPSPL Padang juga memiliki kantor wilayah kerja/satuan kerja (Satker) dan gerai pelayanan di Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Jambi, Palembang, dan Batam.



Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2023

Total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPSPL Padang tahun 2023 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 67 orang, yang terdiri dari 51 berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 16 Tenaga Kontrak. Komposisi SDM ASN di BPSPL Padang antara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang Kepala Balai;
2. 1 (satu) orang Kepala Subbagian Umum;
3. Kelompok Jabatan Pelaksana dengan jumlah SDM 10 (sepuluh) orang, terdiri atas:
 - a. 2 (dua) Analis Kelautan dan Perikanan;
 - b. 1 (satu) Analis Jasa Kelautan;
 - c. 1 (satu) Analis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,
 - d. 1 (satu) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur,
 - e. 1 (satu) Analis Organisasi dan Tata Laksana,
 - f. 2 (dua) Analis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan,
 - g. 1 (satu) Analis Perencanaan,
 - h. 1 (satu) Fungsional Umum sedang tugas belajar.
4. Kelompok Jabatan Fungsional dengan jumlah SDM 39 (tiga puluh sembilan) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Madya;
 - b. 4 (empat) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Muda;
 - c. 1 (satu) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda;
 - d. 19 (sembilan belas) Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Pertama.
 - e. 1 (satu) Analis Anggaran Ahli Pertama,
 - f. 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Terampil,
 - g. 7 (tujuh) Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, dan
 - h. 5 (lima) Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama.

1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya yang sangat potensial. Indonesia memiliki megabiodiversity, yang mencakup keanekaragaman genetic, spesies, dan ekosistem. Kondisi tersebut memberikan beragam manfaat melalui penyediaan jasa ekosistem, baik penyediaan makanan dan obat-obatan, sebagai penyangga kehidupan ekosistem, serta memberikan beragam manfaat ekonomi jika dikelola secara bijak. Pengelolaan yang bertanggung jawab memberikan *multiplier effect* yang akan mengantarkan pada kondisi lingkungan pesisir dan pulau kecil yang optimal sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketahanan pangan, berketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan.

Wilayah kerja BPSPL Padang memiliki karakteristik perairan yang khas. Di bagian barat, khas dengan ekosistem pesisir yang dipengaruhi oleh dinamika perairan Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur, khas dengan beragam tipe ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi perairan Selat Malaka. Kondisi tersebut memberikan beragam potensi keanekaragaman hayati yang melimpah. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja BPSPL Padang:

- 1) Perencanaan Ruang Laut
Terdapat 5 RZWP3K yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dari total 7 provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang.
- 2) Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut
 - a. Terdapat luas kawasan konservasi perairan daerah sebesar 3.004.683,25 Ha di wilayah kerja BPSPL Padang yang perlu didorong pengelolaannya secara optimum;
 - b. Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*), menjadikan Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di Indonesia. Berdasarkan kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, dirilis bahwa luas terumbu karang di Indonesia berdasar analisis dari citra satelit adalah sekitar 2.517.858 Ha, dimana 19% atau sekitar 478.587 Ha diantaranya berada di Perairan Sumatera;
 - c. Terdapat 13 target kehati prioritas pengelolaan KKP di wilayah kerja BPSPL Padang meliputi: Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Hiu, Pari dan mamalia laut (Paus, Dugong) serta Karang;
 - d. Keanekaragaman hayati endemik yang hanya dijumpai di selat Malaka, yaitu terubuk jenis *Tenualosa ilisha* yang salah satu habitat pentingnya ada di Labuhan Batu, dan jenis *Tenualosa macrura* yang ada di selat Bengkalis;
 - e. Keberadaan Penyu Belimbing di Betumonga yang merupakan salah satu jenis penyu langka di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
 - f. Telah dilakukan upaya monitoring secara berkesinambungan melalui pendataan penyu belimbing di site betumonga (sejak tahun 2019), pendaratan Hiu dan Pari di Sibolga dan Aceh Selatan (sejak tahun 2019) serta Kuda Laut di Bintan (sejak tahun 2018);
 - g. Aksi bersama perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui FKPP Sumbar dan Forum Pelestarian Terubuk Riau;
 - h. Pengembangan database penanganan respon cepat biota laut terdampar melalui website BPSPL Padang dengan alamat situs <https://kkp.go.id/djprl/ bpsplpadang> pada menu SIG;
 - i. Terdapat potensi kelompok penggerak konservasi dengan kegiatan berupa perlindungan jenis, kawasan dan ekosistem pesisir di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 40 kelompok.

- j. Pangsa pasar internasional produk hiu pari non appendiks CITES meliputi beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, China, Italia. Spanyol, hingga Meksiko.
- 3) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil
 - a. Potensi Pulau–Pulau Kecil Terluar (PPKT) sejumlah 39 PPKT di wilayah kerja BPSPL Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017;
 - b. Potensi luasan ekosistem mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 810.171 Ha. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK, tahun 2020, Indonesia memiliki areal seluas 3.329.219 Ha. 16,43% luasan mangrove nasional tersebut berada di wilayah kerja BPSPL Padang, atau seluas 547,022 Ha, yang tersebar di Provinsi Aceh (32.824 Ha), Provinsi Sumatera Utara (57.898 Ha), Provinsi Sumatera Barat (18.084 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (158.845 Ha), Provinsi Jambi (10.082 Ha), Provinsi Riau (212.857 Ha), dan Kepulauan Riau (56.432 Ha). Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki luasan mangrove terluas di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 38,91%, sedangkan Provinsi terendah luasannya adalah Provinsi Jambi yang hanya sebesar 1,84%.
 - c. Terdapat potensi kelompok pegiat mangrove di pesisir wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 49 Kelompok.
 - 4) Pemanfaatan Jasa Kelautan
 - a. Potensi petambak garam tradisional di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
 - b. Potensi distributor dan pengolah garam di Kab. Bireun yang telah berstandar nasional dengan jangkauan pasar regional;
 - c. Terdapat potensi jenis biota yang dapat dimanfaatkan sebagai produk biofarmakologi berupa rumput laut, kuda laut dan teripang;
 - d. Kawasan pesisir di Sibolga termasuk dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Sibolga dan sekitarnya yang dapat didukung pengembangannya melalui Desa Wisata

Seiring dengan perkembangannya, potensi yang dimiliki tersebut dapat menghasilkan tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Pada saat ini, BPSPL Padang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagian tantangan tersebut adalah program dan kegiatan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan sebagiannya lagi adalah tantangan terhadap dinamika kebijakan program pembangunan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan yang kurang memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya. Tarik menarik antar beragam kepentingan terhadap ruang laut, pesisir dan pulau–pulau kecil menyebabkan beberapa provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, menjadi terkendala dalam upaya pengesahan ranperda RZWP3K nya, yang diharapkan mampu menjadi alat pengendalian pemanfaatan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau–pulau kecil secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015–2020, dari 7 Provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, 2 di antaranya masih belum dapat disahkan menjadi produk hukum sehingga perlu program akselerasi dan pendampingan yang lebih intensif, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tantangan secara lebih spesifik, adalah penyelesaian potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut diselesaikan melalui Penyusunan rencana zonasi antara kawasan (RZ KAW), rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ-KSNT);
- 2) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan tata Kelola terkait pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau–pulau kecil. Salah satunya adalah amanat untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K menjadi satu produk hukum tata ruang sebagai rujukan

pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses integrasi tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan akselerasi dan pendampingan penyusunannya. Proses integrasi tersebut merupakan suatu terobosan penting dalam melihat ruang perairan dan darat dalam satu persepektif integratif dan holistik. Namun demikian ada banyak penyesuaian substansi dan administrasi sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas, memenuhi kaidah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat;

- 3) Pemanfaatan ruang laut dan potensi sumber daya di dalamnya perlu dikelola melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan mengikuti koridor keberlanjutan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut yang disusun. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan operasionalisasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- 4) Dalam rangka memenuhi Aichi Target yang memandatkan perlunya melakukan konservasi seluas 10% dari luas perairan, pesisir dan pulau kecil atau sekitar 32,5 juta Ha. Di wilayah kerja BPSPL Padang, kawasan konservasi perairan ada di semua Provinsi namun pengelolaannya belum efektif termasuk di dalamnya adalah upaya peningkatan status perlindungan kawasan konservasi yang baru pada status pencadangan dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana luasan kawasan konservasi yang akan dicapai dapat berjalan beriringan dengan efektivitas pengelolaannya sehingga keberadaan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan serta nilai ekonomi kawasan. Salah satu program dan kegiatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 5) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi. Tantangan selanjutnya adalah terkait adanya rencana pelimpahan kewenangan/management authorities untuk jenis ikan bersirip (pisces) dari KLHK kepada KKP. Terkait hal itu, maka UPT diharapkan mampu menyelenggarakan issue perdagangan jenis ikan yang sebelumnya dikelola oleh KLHK, dimana di dalamnya mencakup perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu dari jenis ikan tersebut adalah ikan Arwana, dimana komoditas tersebut termasuk banyak diperdagangkan di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan;
- 6) Wilayah kerja BPSPL Padang, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, meliputi kuda laut, teripang, lola, kima, hiu-pari, mamalia laut, napoleon, dugong, penyu, sidat, terumbu karang, terubuk, ikan purba, dan beragam jenis kehati lainnya. Keberadaannya semakin terancam akibat semakin meningkatnya tekanan habitat di alam oleh aktivitas antropogenik meliputi over-eksploitasi, *bycatch*, *spesies invasive*, kerusakan habitat, dan lain sebagainya. Permasalahan ini mendorong perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan kehati agar dapat terjaga habitat dan keanekaragaman hayati di dalamnya sesuai dengan kerangka rencana aksi dari masing-masing keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan. Kondisi tersebut diperparah dengan asih minimnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat;

- 7) Meningkatnya dampak negatif adanya fenomena perubahan iklim menyebabkan permasalahan ketahanan pesisir, diantaranya adalah ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir serta kerusakan ekosistem terumbu karang akibat adanya *coral bleaching*. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi pesisir dengan program dan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai serta penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap adanya fenomena perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8) Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup padat. Kondisi tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya intensitas kejadian tumpahan minyak. Kondisi tersebut mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang dapat menjawab tantangan dari permasalahan tersebut;
- 9) Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. BPSPL Padang telah diberikan mandat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penatakelolaan dan pendayagunaan PPKT agar menjadi objek dan asset pembangunan yang bernilai strategis untuk meningkatkan daya guna lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dari 111 PPKT, 39 PPKT berada di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 7 PPKT di Provinsi Aceh, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Utara, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Barat, 22 PPKT di Provinsi Kepri, dan 4 PPKT di Provinsi Riau.
- 10) pemanfaatan ekonomi kelautan seperti pengelolaan produksi garam yang belum optimal. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya serta jasa kelautan terkait lainnya

Lebih lanjut, pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis *strength, weakness, opportunities, threat* (SWOT) berikut ini.



Gambar 3. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja pada tahun 2023. Adapun capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum terkait BPSPL Padang beserta perkembangan lingkungan kerja strategis.
- Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian rencana strategis berisi visi dan misi organisasi serta perjanjian kinerja BPSPL Padang tahun 2023.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisis- analisis pendukungnya.
- Bab IV Penutup**, menyajikan simpulan umum serta langkah-langkah strategis pada masa mendatang.
- Lampiran**, melampirkan data-data pendukung laporan.

II. Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Adapun Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025, dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; (2) Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (6) Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Fungsi pembangunan kelautan dan perikanan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diarahkan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang ada. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) menuangkan visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam visi misi Ditjen PKRL. Kemudian BPSPL Padang di bawah Ditjen PKRL menyusun pula visi misi yang sinergis untuk mewujudkan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi KKP, yang disusun dengan berpedoman kepada RPJMN dan dapat direvisi sesuai aturan yang berlaku. Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan di antaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya. Sebagai tindak lanjut dari visi dan arahan Presiden, maka disusun Renstra KKP 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020. Adapun visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari Sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden meliputi (1) “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”; (2) “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”; (3) “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan (4) “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Untuk mendukung Renstra KKP 2020-2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut menyusun Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 01 Tahun 2021. Dalam rangka mendukung

visi KKP, maka visi Ditjen PKRL 2020-2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya visi KKP”. Adapun misi DJPKRL meliputi (1) Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; (2) Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) Peningkatan tata Kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PKRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Sasaran Ditjen PKRL 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 - a. Sasaran “Kesejahteraan petambak garam meningkat”
 - b. Sasaran “Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat”
 - c. Sasaran “Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan”
 - d. Sasaran “Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat”
 - e. Sasaran “Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT”
 - f. Sasaran program “Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisioal, dan masyarakat local di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya”
 - g. Sasaran “Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”
2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a. Sasaran “Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan”
 - b. Sasaran “Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan”
 - c. Sasaran “Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali”
 - d. Sasaran “Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat”.
3. Program Dukungan Manajemen
 - a. Sasaran “Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PKRL”.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPKRL, BPSPL Padang memiliki tugas untuk mendukung sasaran strategis DJPKRL. Visi Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang adalah “Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil Tertata, Aman, Bersih, Produktif, Berkelanjutan, dan Mensejahterakan” sedangkan misi dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut adalah “Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”. Adapun tujuan yang terjabarkan dari visi misi ini adalah: (1) Terkelolanya jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi; (2) Wilayah yang memiliki perencanaan pengelolaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (3) Meningkatnya nilai guna pulau-pulau kecil; (4) Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan jasa kelautan; (5) Meningkatnya pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BPSPL Padang.

Lebih lanjut, BPSPL Padang menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPSPL Padang tahun 2020-2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra DJPKRL dan KKP tahun 2020-2024. Dengan demikian, visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dan sasaran program BPSPL Padang tahun 2020-2024 sebagai berikut.

- I. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang;
2. Tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terfasilitasi sarana dan prasarana di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang;
3. Tujuan meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan:
 - a. Terbangunnya sarana niaga garam rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. Terkelolanya biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - c. Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Padang;

II. Program Kualitas Lingkungan Hidup

4. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - c. Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - d. Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Padang;
5. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan:
 - a. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - b. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitai penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja BPSPL Padang;
 - c. Meningkatnya ketangguhan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang.

III. Program Dukungan Manajemen

6. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Padang dengan sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang baik di BPSPL Padang.

Berikut adalah rincian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan BPSPL Padang 2020-2024.

Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Padang 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang	1	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Padang (Ha	120.000	377.204	125.000	25.000	15.000
2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	2	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan,	4	6	8	8	8



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang		penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)					
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	3	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	3	4	4	7	7
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Padang	4	Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	1	4	3	3	3
		5	Kesepakatan jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1	2	1	1	1
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	2	-	-	4	5
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	2	-	-	4	5
		8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	5	-	-	-	-
6	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi penanggulangan pencemarannya di wilayah kerja BPSPL Padang	9	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi dan/atau difasilitasi dalam rangka pengendalian pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	-	-	-	1	1
7	Meningkatnya ketangguhan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang	10	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang diidentifikasi kerentanannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	-	-	-	1	1
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
8	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang	11	Laporan monitoring pemanfaatan ruang laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah BPSPL Padang (dokumen)	-	-	1	1	1
9	Terbangunnya sarana niaga garam rakyat untuk peningkatan kualitas garam di wilayah kerja BPSPL Padang	12	Sarana dan/atau prasarana di kawasan garam terpadu yang dibangun di wilayah kerja BPSPL Padang (unit)	1	-	-	1	-
10	Terkelolanya biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang	13	Laporan identifikasi potensi biota laut non komersil yang dapat dimanfaatkan untuk biofarmakologi dan desa pangan laut di wilayah kerja BPSPL Padang (dokumen)	-	-	-	1	1
		14	Unit usaha gerai biofarmakologi di wilayah kerja BPSPL Padang yang dibangun (Unit)	1	1	-	-	-
11	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Padang	15	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (kawasan)	-	-	-	1	2

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
12	Meningkatnya pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi sarana dan prasarana di wilayah kerja BPSPL Padang	16 Pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi sarana dan prasarananya di wilayah kerja BPSPL Padang (lokasi)	2	-	-	1	1
13	Meningkatnya pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang	17 Pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Padang (pulau)	-	-	-	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
14	Tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Padang	18 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	-	72,5	75	77,5	80
		19 Indeks profesionalitas ASN BPSPL Padang (indeks)	72	73	74	75	76
		20 Nilai WBK BPSPL Padang (Nilai)	75	75	76	78	79
		21 Nilai rekonsiliasi kinerja BPSPL Padang (%)	90	91	91	93	94
		22 Persentase unit kerja BPSPL Padang yang menerapkan system manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		23 Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80
		24 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Padang (nilai)	88	89	89	91	91
		25 Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Padang (Nilai)	85	86	87	88	89
		26 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Padang (%)	100	100	100	100	100

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target sasaran utama, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD), swasta, perbankan dan nonperbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBN hanya bersifat stimulus dan difokuskan pada beberapa kegiatan pokok yang menjadi kewenangan pusat.

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan BPSPL Padang 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, dan belum memperhitungkan dampak pandemik global covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 dan dinamika kebijakan lainnya yang dapat muncul atau berubah pada kurun waktu 2020-2024.

2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), BPSPL Padang memiliki tugas-tugas yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran kegiatan yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, pada awal tahun 2023 ini terdapat delapan (8) sasaran kegiatan dan delapan belas (18) indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Padang. Mengacu pada dinamika komposisi anggaran yang terjadi, perjanjian kinerja BPSPL Padang mengalami perubahan menjadi tujuh (7) sasaran kegiatan dan enam belas (16) indikator kinerja yang diukur kinerjanya pada tahun 2023. Secara lengkap perjanjian kinerja BPSPL Padang tahun 2023 disajikan pada Lampiran, sementara Perjanjian Kinerja final tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang yang Diukur Kinerjanya

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
2	Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang (Daerah)	2
3	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
4	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	7
5	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Padang	6 Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	524.347
7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Padang	7 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	89
		8 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (nilai)	82
		9 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)	75
		10 Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	84
		11 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (nilai)	75
		12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		13 Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		15 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
16	Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	77,5	

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target tersebut, pada awal tahun 2023 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2023 sebesar **Rp14.516.480.000,00** (Empat Belas Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Namun demikian, **terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp1.622.000.000,00** (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Adanya blokir tersebut tidak mempengaruhi pagu anggaran secara keseluruhan, namun anggaran yang terblokir tersebut belum dapat digunakan.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 30 Agustus 2023 terdapat **penambahan pagu anggaran BPSPL Padang yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1.239.428.000,00** yang

mana merupakan hasil pembagian dari PNPB DJPKRL. Penambahan tersebut menyebabkan peningkatan **pagu anggaran BPSPL Padang menjadi Rp15.755.908.000,00** (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Lebih lanjut, pada tanggal 10 Oktober 2023 Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor S-371/MK.2/2023 menginstruksikan Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan relaksasi non belanja pegawai dari *automatic adjustment* dengan mengajukan usulan revisi pengurangan alokasi anggaran. Atas dasar hal tersebut, terdapat penarikan blokir Anggaran Biaya Tambahan senilai Rp1.200.000.000,00 dan pembukaan blokir anggaran senilai Rp184.000.000,00 sehingga pagu BPSPL Padang menjadi Rp14.555.908.000,00. Dinamika pun masih berlanjut dengan adanya pergeseran belanja pegawai ke eselon 1 sebesar Rp800.000.000,00 sehingga **pagu BPSPL Padang yang diukur kinerjanya pada tahun 2023 menjadi Rp13.755.908.000,00** (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan total blokir sebesar Rp250.000.000,00.

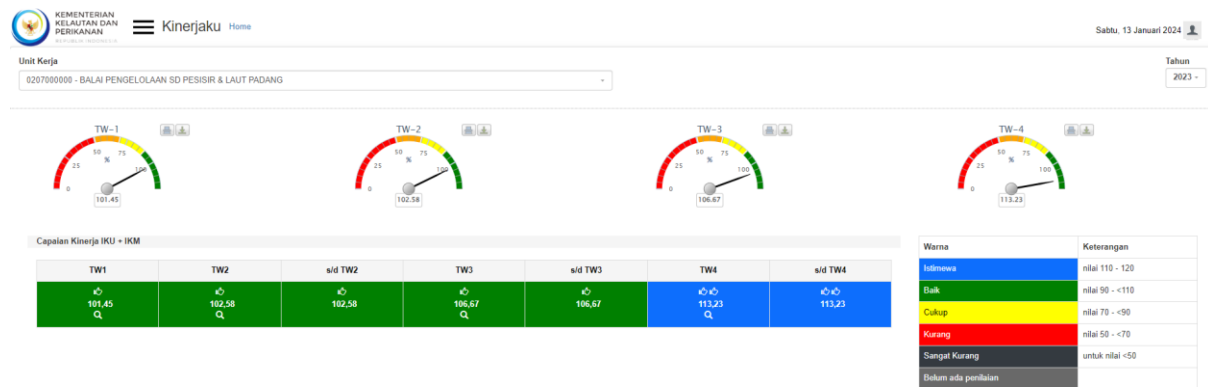


Gambar 4. Dinamika Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2023

III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Padang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang tahun 2023 adalah **113,23 (kategori istimewa)**.



Gambar 5. Nilai Kinerja Organisasi BPSPL Padang Tahun 2023

Pada tahun 2023 ini, Perjanjian Kinerja BPSPL Padang terdiri dari delapan (8) sasaran strategis dan delapan belas (18) indikator kinerja dengan periode capaian triwulanan, semesteran, dan tahunan. Sementara itu, rincian target dan capaian kinerja BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2023

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE*
1	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	Tahunan	3	3	100
2	Terwujudnya kawasan konservasi yang ditetapkan di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang (Daerah)	Tahunan	2	3	120*
3	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	Triwulanan	3	3	100



No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE*
4	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	Semesteran	7	10	120*
5	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	Semesteran	5	8	120*
6	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Padang	6 Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	Tahunan	524.347	958.877,695	120*
7	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Padang	7 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	Semesteran	93,75	95,34	101,7
		8 Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (nilai)	Tahunan	82	90,24	110,05
		9 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)	Tahunan	75	93,31	120*
		10 Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	Semesteran	84	90,82	108,12
		11 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (Nilai)	Tahunan	75	88,2	117,6
		12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	Triwulanan	4	4	100
		13 Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Triwulanan	92	116,65	120*
		14 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Triwulanan	75	100	120*
		15 Persentase penyelesaian temuan	Tahunan	100	100	100

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	FREKUENSI	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2023	PERSENTASE*
		LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)				
		16 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	Tahunan	77,5	100	120*

*Persentase yang dihitung mengacu pada perhitungan aplikasi Kinerja dengan persentase maksimal 120%

IKU. 1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 35, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: (a) ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; (b) pemberian insentif dan disinsentif; dan (c) pengenaan sanksi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut melalui: 1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), (2) Persetujuan KKPR;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 113 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPR.

IKU ini tercapai dengan menginventarisasi dan menjumlahkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/ atau Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKU 1 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1

IKU 1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Renstra			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	3	3	100	-	-	-	-	-

Pada tahun 2023, BPSPL Padang telah mencapai tiga dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dari dokumen identifikasi/verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1CfGc9g-dJi4XG_2TDMzRq6ql6_McGKuu?usp=sharing.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU 1 merupakan IKU baru yang tidak terdapat pada tahun 2022 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun lalu. Pada tahun 2022, IKU serupa memiliki nomenklatur “Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang” dengan satuan target Rekomendasi Kebijakan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis (Renstra) BPSPL Padang 2020-2024, terdapat indikator kinerja ‘Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPR/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah BPSPL Padang (dokumen) yang memiliki target 1 dokumen pada tahun 2023. Namun demikian, IKU 1 tidak dapat dibandingkan dengan Renstra karena memiliki nomenklatur dan satuan yang berbeda.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel di bawah menyajikan cuplikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 yang berkaitan dengan IKU 1 BPSPL Padang tahun 2023.

Tabel 5. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 1 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut	10	12	14	16	18	34 Provinsi
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	12	27	26	40	46	34 Provinsi

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU 1 didukung oleh sosialisasi, kelengkapan data yang diperoleh dari lapangan, dan kooperasi dari pelaku usaha. Sepanjang tahun 2023, BPSPL Padang telah melaksanakan penilaian teknis, penilaian lapangan, sosialisasi, dan konsultasi dalam lingkup perizinan pemanfaatan ruang laut. Di Samping itu, pedoman teknis terkait kegiatan ini juga telah diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada tanggal 4 September 2023. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan mempedomani ketentuan dalam pedoman tersebut dalam penyeleggaraan pemanfaatan ruang laut.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU 1 telah didukung oleh hal berikut:

1. Melakukan koordinasi aktif dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan stakeholder terkait dalam tahapan identifikasi, penilaian teknis, dan penilaian lapangan,
2. Membekali diri dengan peralatan survei sesuai kebutuhan, seperti drone, GPS, dll,
3. Melibatkan tim Satker dengan lokasi yang terdekat untuk mendampingi verifikasi pemanfaatan ruang laut.

Pada tahun 2023, BPSPL Padang memiliki alokasi pagu anggaran dalam rekomendasi kebijakan monitoring dan verifikasi perizinan pemanfaatan ruang laut sejumlah Rp1.435.870.000,00 yang bersumber dari rupiah murni senilai Rp450.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp985.870.000,00. Adapun anggaran terbut semula terdampak blokir sejumlah Rp350.000.000,00 namun pada akhirnya blokir tersebut

telah ditarik sehingga tidak lagi terdampak blokir. Hingga akhir tahun 2023, realisasi anggaran tersebut mencapai Rp1.413.718.132,00 (98,5)%. Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam kegiatan penilaian teknis yang dilaksanakan secara daring. Dengan dilaksanakan secara daring, kegiatan penilaian teknis tidak menyerap anggaran yang besar.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU 1 ini didukung oleh serangkaian kegiatan berikut.

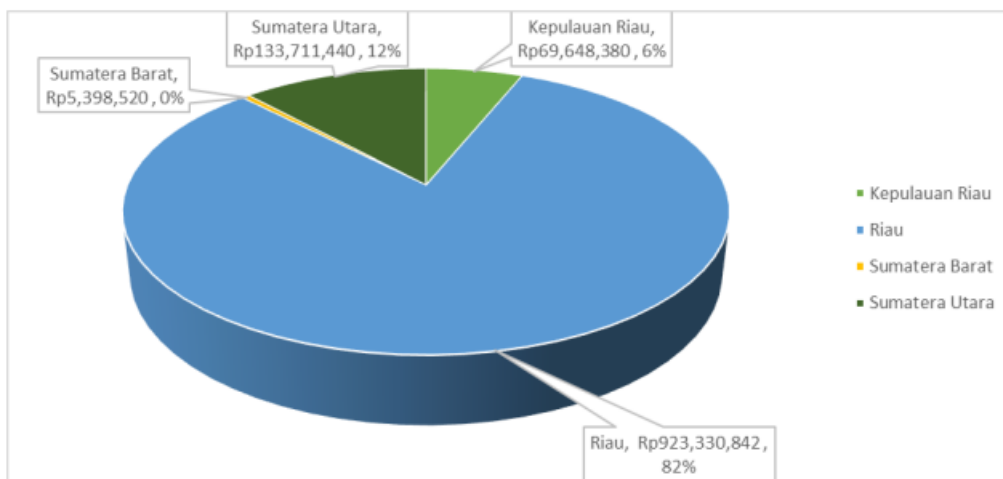
a. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Selama tahun 2023, telah dilakukan identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang, sebanyak tujuh kali identifikasi lapangan tersebar di Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Total pemanfaatan ruang laut eksisting teridentifikasi sebanyak 76 subjek hukum tersebar di sembilan kabupaten/kota dari empat provinsi.



Gambar 6. Grafik Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang

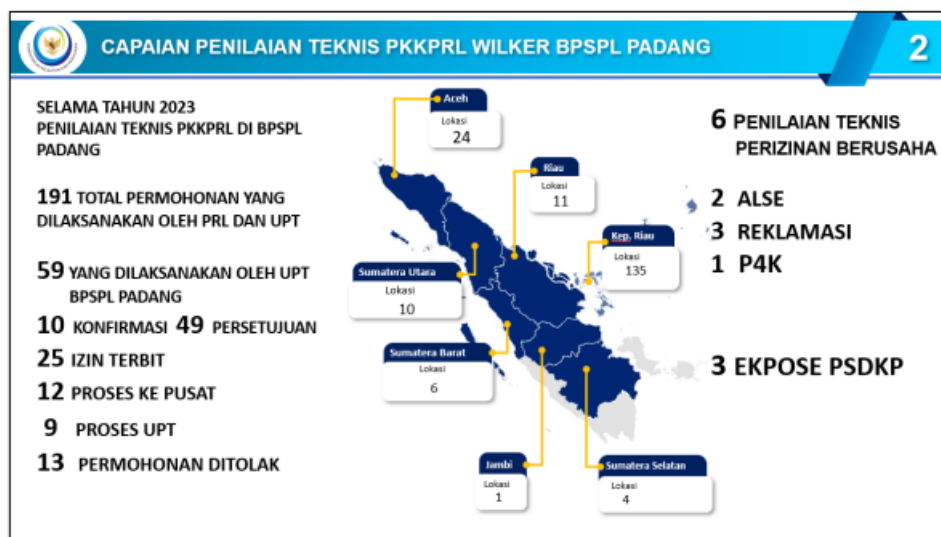
Hasil identifikasi pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui survei lapangan di wilayah kerja BPSPL Padang Tahun Anggaran 2023 melalui analisis dan delineasi pemanfaatan ruang laut eksisting menghasilkan total luas pemanfaatan ruang laut yaitu 94.60 hektare dan panjang 41.39 km. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada lampiran XII Bab Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada bagian A tentang pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menetap di laut dan bagian B tentang pemanfaatan ruang untuk kabel laut, menghasilkan perhitungan estimasi potensi PNBP untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Padang sebesar Rp1.132.089.182,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah).



Gambar 7. Potensi PNBP Hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Tahun 2023

b. Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut

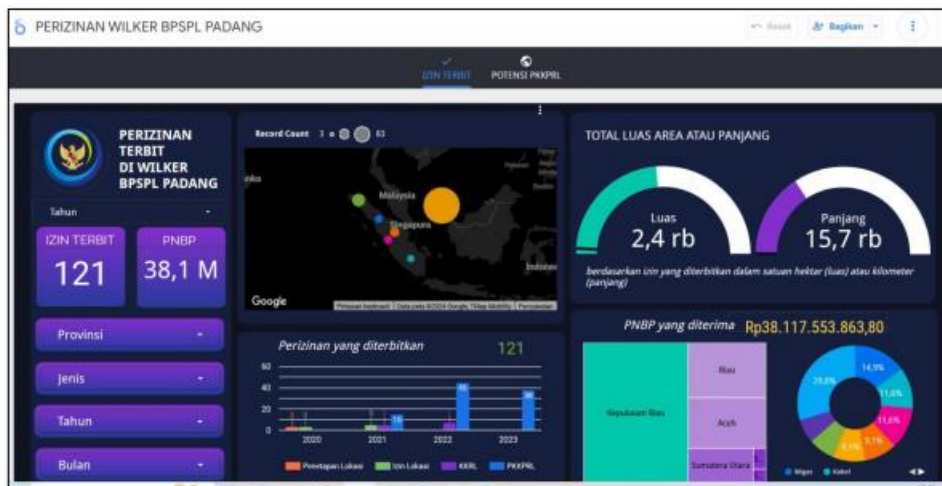
Berdasarkan data hasil Penilaian teknis bahwa subyek hukum/pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan persetujuan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang laut selama tahun 2023 ada 191 Penilaian Teknis total luasan permohonan seluas 36040,44 Hektar dengan rincian 21 berupa KKPRL dan 170PKPRL dimana Penilaian teknis di dominasi dari provinsi Kepulauan Riau dengan 135 Permohonan.



Gambar 8. Rekapitulasi Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Tahun 2023

Dalam perkembangannya, terdapat Penilaian teknis yang di delegasi oleh KKP pusat ke BPSPL padang yang dilakukan Penilaian teknis selama tahun 2023 terdapat 59 pemohon dengan rincian 10 Pemohon Berupa Konfirmasi KKPRL dan 49 berupa Persetujuan PKKPRIL, Dimana dari hasil penilaian teknis tersebut 25 permohonan sudah diterbitkan 13 permohonan ditolak, 12 Permohonan sedang di proses di pusat dan 9 permohonan masih di UPT BPSPL Padang.

Penilaian teknis yang di keluarkan izin PKKPRIL nya secara keseluruhan dari tahun 2020 sampai 2023 ada 121 izin terbit. Berdasarkan data resmi selama tahun 2023 ada 63 izin terbit dengan rincian 38 izin terbit penilaian teknis dari Ditjen PRL dan 25 izin terbit yang pelaksanaan penilaian teknisnya dilaksanakan oleh UPT BPSPL Padang.



Gambar 9 Rekapitulasi Perizinan PKKPR yang Diterbitkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang Selama Tahun 2023

c. Verifikasi Lapangan

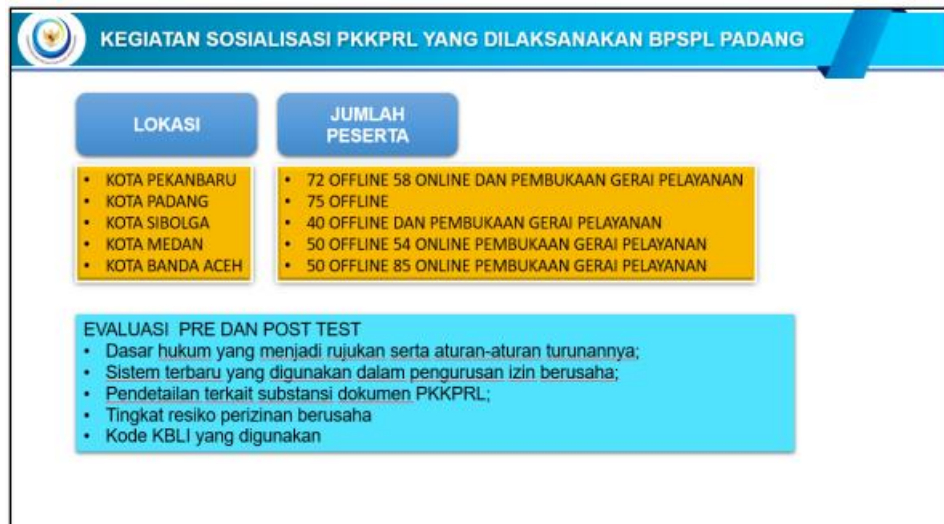
Selama tahun 2023, BPSPL Padang telah melakukan verifikasi lapangan terhadap 36 subyek hukum yang terdiri dari pelaku usaha atau masyarakat lokal yang tersebar di 5 Provinsi. Secara rinci verifikasi lapangan pada masing masing Provinsi Aceh berjumlah 4 lokasi, Sumatera Utara 2 lokasi, Riau 3 lokasi, Sumatera Barat 4 Lokasi dan Kepulauan Riau 23 Lokasi. Berdasarkan kategori perizinan, 29 Lokasi merupakan perizinan dasar PKKPR dan 2 Lokasi Konfirmasi KKKPR. Hal yang menarik adalah selama tahun 2023 sudah dimulai verifikasi lapangan untuk sektor perizinan berusaha dimana terdiri 4 perizinan berusaha untuk pemanfaatan laut selain energi atau ALSE dan 1 lokasi untuk perizinan berusaha untuk pelaksanaan reklamasi.



Gambar 10. Rekapitulasi Verifikasi Lapangan Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Tahun 2023

d. Sosialisasi Penataan Ruang Laut

Pada tahun 2023, UPT BPSPL Padang telah melaksanakan 5 kali Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan ruang laut dengan tema kebijakan ketentuan pemanfaatan ruang laut dimana dalam kegiatan sosialisasi tersebut di bahas tentang regulasi, prosedur maupun tahapan dalam pengurusan perizinan pemanfaatan ruang laut dimana hal ini sesuai dengan regulasi yang ada pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Sosialisasi dilaksanakan di empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatra Barat.



Gambar 11. Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Lingkup BPSPL Padang

e. Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan monitoring dan sosialisasi pelaksanaan KKPRL dilaksanakan pada tanggal 5-6 April 2023 di Kota Dumai, tanggal 15 Desember di Kota Sabang, dan tanggal 18 Desember 2023 di Kota Lhokseumawe.

Tabel 6. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut yang Dimonitor

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Luas Area Pemanfaatan (Ha)
1	PT Adhitya Serayakorita	Kota Dumai, Provinsi Riau	19,44
2	PT. Kawasan Industri Dumai (KID)	Kota Dumai, Provinsi Riau	23,7
3	PT Pertamina Patra Niaga – PT Pertamina Fuel Terminal Sabang	Kota Sabang, Provinsi Aceh	2,96
4	CV Mata le Resort Sabang	Kota Sabang, Provinsi Aceh	0,15
5	PT Pertamina Patra Niaga – Terminal LPG Arun Lhokseumawe	Lhokseumawe, Provinsi Aceh	9,1

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 1 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2366.PBT] Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan, [2366.RAL] Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan, dan [2366.SCC] Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKU 1

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2366.PBT.009] Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	941.520.000,00	925.994.678,00	98,4
2	[2366.RAL.001] Sarana Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut	367.000.000,00	366.350.000,00	99,8
3	[2366.SCC.002] Petugas Penyelenggara Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	127.350.000,00	121.373.454,00	95,3
Total		1.435.870.000,00	1.413.718.132,00	98,5

Realisasi anggaran [2366] adalah 98,5%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan identifikasi dan verifikasi lapangan Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Rincian output ini **bersumber dari rupiah murni senilai Rp450.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp985.870.000,00.** Hingga akhir 2023, komposisi anggaran pendukung kegiatan tidak lagi terdampak blokir dan realisasi anggaran tersebut mencapai **Rp1.413.718.132,00 (98,5)%**.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun selanjutnya, BPSPL Padang akan kembali melaksanakan tugas dalam hal penyelenggaraan penataan ruang laut di wilayah kerja.

IKU. 2. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi Kawasan Konservasi. Dasar hukum yang dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Padang yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan konservasinya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKU 2 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8. Perbandingan Target dan Capaian IKU 2

IKU 2. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)								
Realisasi	Tahun III 2023				Renstra			
Tahun 2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
2	2	3	120	50	-	-	-	-

Sepanjang tahun 2023, BPSPL Padang telah melaksanakan fasilitasi usulan penetapan Kawasan konservasi di tiga (tiga) daerah, meliputi:

1. Sumatra Barat (KKD Agam),
2. Kepulauan Riau (KKD Kota Batam, KKD Kab. Natuna, KKD Kab. Lingga), dan
3. Sumatra Utara (Kawasan Konservasi Pulau Pini Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kab. Nias Selatan).

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/folders/1-CSqBu1q-JC8xiDX0fulnOkUC2AB_8YA?usp=sharing.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, BPSPL Padang melaksanakan fasilitasi usulan penetapan Kawasan konservasi di dua (2) daerah, yaitu Kawasan Konservasi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Agam. Maka dari itu, terdapat kenaikan capaian pada tahun 2022-2023 sebesar 50%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, IKU 2 tidak dapat dibandingkan. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan nomenklatur dan satuan, yang mana dalam Renstra Indikator Kinerja yang berhubungan dengan kawasan konservasi adalah 'Luas Kawasan Konservasi yang Diusulkan Penetapannya di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Ha)'.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel di bawah menyajikan cuplikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 yang berkaitan dengan IKU 2 BPSPL Padang tahun 2023.

Tabel 9. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 2 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Luas kawasan konservasi baru (ha)	700000	800000	900000	900000	900000	9 Provinsi

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Faktor pendukung terbesar dalam upaya pencapaian IKU 2 adalah akselerasi pemerintah daerah dalam memproses pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan. Dalam pendampingan penetapan Kawasan Konservasi Daerah Agam, BPSPL Padang kembali turut aktif dalam tahapan evaluasi teknis usulan penetapan Kawasan konservasi, pembahasan usulan penetapan Kawasan konservasi, dan pembahasan rancangan keputusan Menteri tentang penetapan Kawasan konservasi Kabupaten Agam. Selain itu, untuk pendampingan di dua lokasi target, yaitu Nias Selatan dan Natuna. BPSPL Padang juga melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau untuk menginisiasi proses pengusulan kawasan konservasi. Berdasarkan koordinasi tersebut, diperoleh informasi bahwa pemerintah daerah masih terkendala untuk melaksanakan kegiatan ini karena dana dekonsentrasi yang masih terblokir. Dalam hal ini, pemerintah daerah belum dapat memulai proses penyusunan dokumen pengusulan penetapan kawasan konservasi. Berdasarkan koordinasi lanjutan, dana dekonsentrasi pada pemerintah daerah yang sempat terblokir telah ditarik dan dialihkan ke Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (KKHL). Sementara itu, anggaran pada Direktorat KKHL juga mengalami blokir sehingga pendampingan belum terlaksana. Maka dari itu, BPSPL Padang sebagai pendamping melakukan koordinasi dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dalam hal akselerasi pengusulan penetapan kawasan konservasi daerah yang terkendala fleksibilitas anggaran. Dalam perkembangannya, anggaran dekonsentrasi tersebut sudah dapat digunakan dan BPSPL Padang akan mendampingi pemerintah daerah dalam proses selanjutnya.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU 2 telah didukung oleh hal berikut:

1. Melakukan koordinasi aktif dengan Dinas setempat terkait perkembangan di masing-masing wilayah;
2. Mengikutsertakan tim yang kompeten dalam perumusan dokumen KKPd dengan latar belakang keilmuan yang dibutuhkan;
3. Melibatkan tim dari wilayah kerja terdekat dari lokasi target.

Pada tahun 2023, BPSPL Padang memiliki alokasi pagu anggaran dalam pendampingan penetapan KKPd sejumlah Rp100.000.000,00 tanpa terdampak blokir dengan realisasi Rp99.087.090,00 (99,1%).

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, BPSPL Padang turut melakukan pendampingan telah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara dan DKP Kepulauan Riau sebagai upaya untuk akselerasi pengusulan penetapan kawasan konservasi Pulau-Pulau Batu Timur, Nias Selatan dan Natuna. Namun demikian, pergerakan kedua Dinas tersebut terkendala oleh blokir dan ditariknya dana dekonsentrasi pendukung kegiatan yang kemudian dialihkan ke Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

Berikut adalah kegiatan pendukung pendampingan pengusulan penetapan Kawasan konservasi daerah di tiga provinsi.

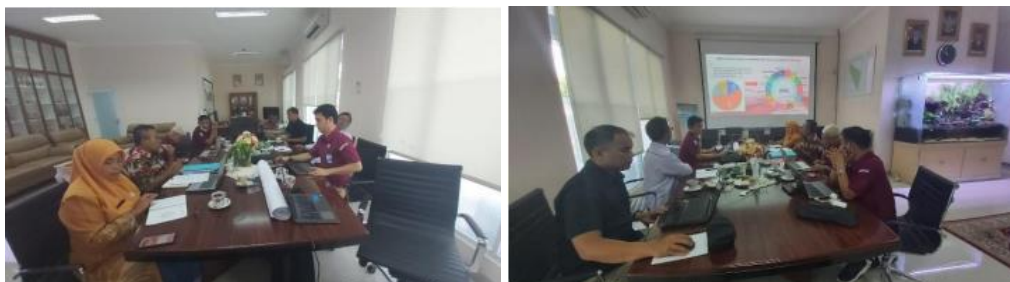
a. Sumatra Barat

1. Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat

BPSPL Padang menghadiri Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat pada Kamis, 23 Februari 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat KKHL-KKP, DKP Sumatera Barat, BPSPL Padang, UPT Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KPSDKP) Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Kabupaten Agam.

Pembahasan usulan penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dilakukan sebagai tindak lanjut surat Wakil Gubernur Sumatera Barat nomor: 523/185/DKP.3/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Penetapan Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kab. Agam Provinsi Sumatera Barat. Tim evaluasi dari Direktorat KKHL dipimpin oleh Sukendi Darmasyah, selaku PELP Ahli Muda.

Secara umum, kelengkapan administrasi sudah lengkap yaitu berupa surat usulan, SK Pencadangan/Perda RZWP3K, dan Dokumen Final Rencana Zonasi. Berita Acara KP, Surat Tanggapan KT, serta SK OTK Pengelola sudah ada namun belum disampaikan kepada tim Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Peta zonasi dalam format shp dan mpk juga sudah diserahkan dan telah sesuai dengan batas terluar RZWP3K, namun perlu pemutakhiran terhadap garis pantai disesuaikan dengan garis pantai yang digunakan pada Matek Integrasi RZWP3K. Selain itu, perlu juga disampaikan peta habitat penyu sebagai target konservasi di Kawasan Konservasi Perairan Daerah Agam. Catatan perbaikan juga terdapat pada *layout* peta, yaitu penamaan kawasan konservasi, penomoran, penyesuaian skala, dan tampilan peta.

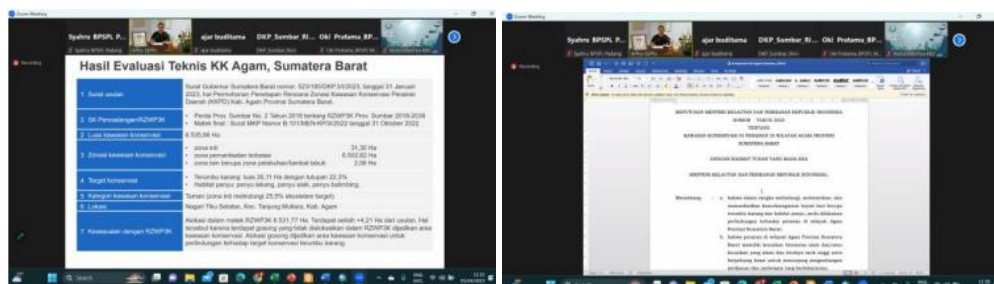


Gambar 12. Dokumentasi Evaluasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Agam

2. Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

BPSPL Padang menghadiri Rapat Pembahasan Permohonan Penetapan Kawasan Konservasi lingkup DJPRL pada Rabu 5 April 2023 secara daring. Kegiatan ini membahas dan mengevaluasi usulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah yang sedang diusulkan penetapannya. Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas KP Provinsi Sumatera Barat; Dinas KP Provinsi Lampung; Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara; Dinas KP Provinsi Gorontalo; Biro Hukum, Sekretariat Jenderal; Dit. Perencanaan Ruang Laut; Dit. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; Dit. Jasa Kelautan; Dit. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Bagian Hukum Seditjen PRL, BPSPL Padang; LPSP Serang; dan BPSPL Makassar.

Secara umum, perbaikan terhadap masukan dari Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terhadap dokumen pengusulan penetapan kawasan konservasi Agam telah ditindaklanjuti, yaitu penyesuaian garis pantai, penggambaran habitat penyu, penyesuaian titik koordinat zonasi, serta penyesuaian legenda peta kawasan konservasi. Lebih lanjut, Tim Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mengkonfirmasi terkait zona inti yang berbatasan langsung dengan darat apakah akan mengganggu aktivitas masyarakat. Hal tersebut ditanggapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat bahwa 2 (dua) pulau yang dijadikan zona inti tersebut tidak berpenduduk. Pulau tersebut digunakan sebagai lahan untuk tanaman kelapa dan bagian timur pulau dijadikan sebagai tempat nelayan berlandung saat terjadi badai, sehingga penempatan zona inti relatif tidak menjadi masalah. Zonasi kawasan konservasi tersebut juga telah dikonsultasikan kepada masyarakat nelayan. Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Barat diminta untuk mengirimkan dokumen berita acara konsultasi publik sebagai bukti persetujuan dari masyarakat. Secara umum, usulan penetapan ini telah disetujui dan akan dilanjutkan ke proses pembahasan di lintas eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 13. Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

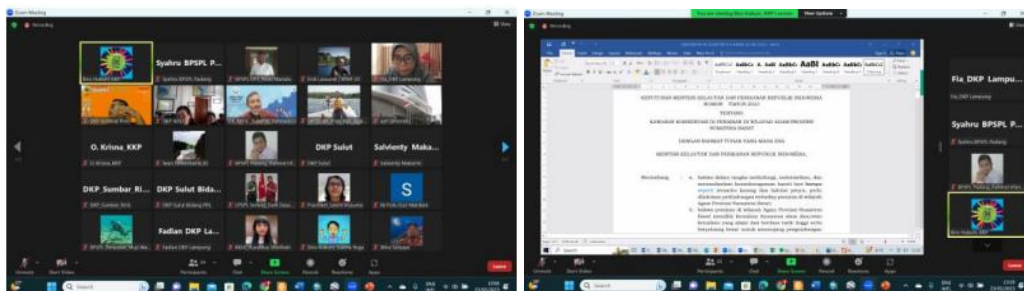
3. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Agam

BPSPL Padang menghadiri Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 23 Mei 2023 melalui daring. Kegiatan ini membahas Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan ini dihadiri oleh Biro Hukum-Sekretariat Jenderal; Dinas KP Provinsi Bali; Dinas KP Provinsi Sumatera Barat; Dinas KP Provinsi Lampung; Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara; Dinas KP Provinsi Gorontalo; Dit. Perencanaan Ruang Laut; Dit. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; Dit. Jasa Kelautan; Dit. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Bagian Hukum Seditjen PRL, BPSPL Denpasar; BPSPL Padang; LPSP Serang; dan BPSPL Makassar.

Dalam pembahasan Rankepmen penetapan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam Provinsi Sumatera Barat, dijelaskan bahwa Kawasan Konservasi Agam seluas 6.535,98 Ha dengan zona inti seluas 31,30 Ha (2 area di Pulau Ujuangtiku dan Pulau Tangahtiku), zona pemanfaatan terbatas seluas 6.502,62 Ha, dan zona lain sesuai peruntukan kawasan berupa zona pelabuhan/tambat labuh seluas 2,06 Ha. Target konservasi KK Agam adalah terumbu karang dan penyu. Kategori kawasan konservasi Agam berupa Taman.

Terhadap target konservasi, luas zonasi, titik koordinat batas terluar dan batas zonasi dalam Rankepmen serta kesesuaian dengan RZWP3K Sumatera Barat telah dikonfirmasi oleh DKP Sumatera Barat bahwa hal tersebut telah sesuai. Dan tidak ada pembahasan lebih dalam terkait KK Kabupaten Agam ini karena secara keseluruhan telah memenuhi Permen KP 31 Tahun 2020.

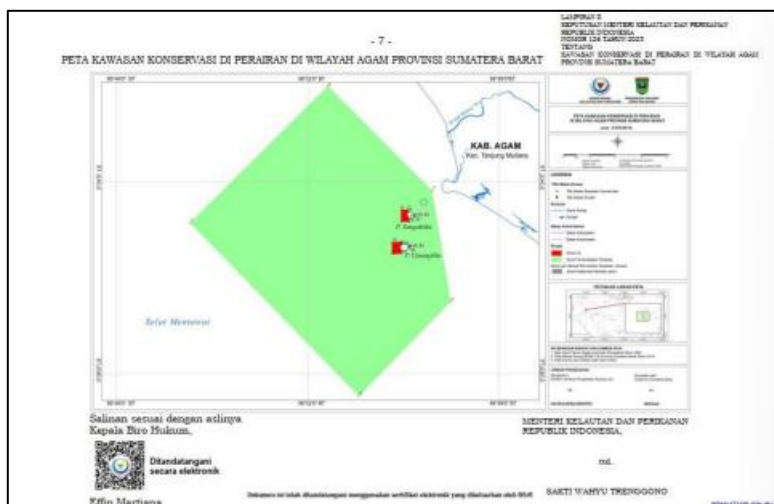


Gambar 14. Dokumentasi Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Agam

4. Penetapan Kawasan Konservasi Kabupaten Agam

Pada 31 Juli 2023, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Agam Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Nomor 126 Tahun 2023. Luas keseluruhan 6.535,98 (enam ribu lima ratus tiga puluh lima koma sembilan delapan) Hektare, yang terdiri atas:

- a. Zona inti dengan luas 31,30 (tiga puluh satu koma tiga nol) Hektare;
- b. Zona pemanfaatan terbatas dengan luas 6.502,62 (enam ribu lima ratus dua koma enam dua) Hektare; dan
- c. Zona lain sesuai peruntukan kawasan sesuai peruntukan kawasan berupa zona pelabuhan/tambat labuh dengan luas 2,06 (dua koma nol enam) Hektare dengan luas 5,23 (lima koma dua tiga) Hektare.



Gambar 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan KK Agam

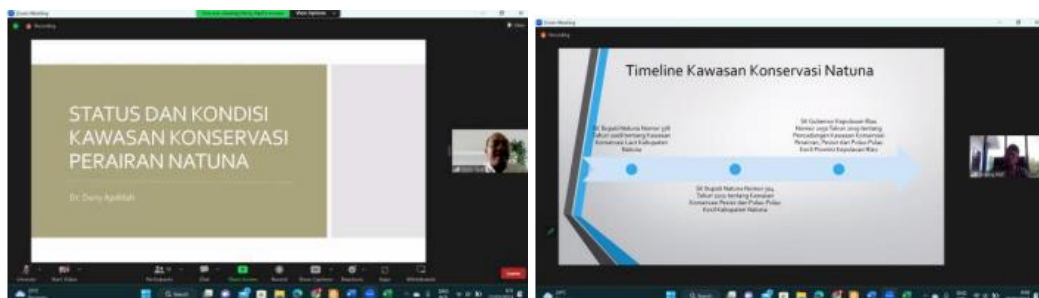
b. Kepulauan Riau

1. Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Kawasan Konservasi Natuna

Sehubungan dengan kegiatan usulan penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Program Kualitas Lingkungan Hidup Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Persiapan Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan dilakukan di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 27 Januari 2023 secara daring melalui Zoom Meeting.

Pertemuan ini membahas progress perkembangan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam penetapan Kawasan konservasi Natuna. Kawasan Konservasi Natuna sudah dicadangkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1050 Tahun 2019 dengan luas 297.414,51 Hektar yang tersebar di Pulau Bunguran, Pulau Laut, dan Pulau Serasan. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan langkah-langkah penetapan diantaranya pembentukan POKJA Kawasan Konservasi Natuna, menelaah data dan dokumen yang tersedia dan disesuaikan dengan Permen KP 31/2020, menentukan target konservasi, melakukan zonasi kawasan konservasi, melakukan survei bio-fisik, melakukan survei sosial-ekonomi, mendata pemanfaatan eksisting di kawasan konservasi, dokumen awal, melakukan konsultasi teknis, melakukan konsultasi publik, dokumen final, dan usulan penetapan kawasan konservasi ke MKP.

Terdapat beberapa tahapan dokumen yang harus dipersiapkan sehingga melihat dokumen yang ada dan apa tindak lanjut kedepannya. Beberapa hal yang perlu diketahui yaitu perlunya menyesuaikan zonasi yang sudah disusun sebelumnya sesuai dengan dengan ketentuan Permen KP 31/2020. Zona inti akan direviu kembali dengan menyesuaikan update data dan informasi terkait lokasi tersebut serta akan dihitung kembali apakah zona inti memenuhi syarat luasan 10%.



Gambar 16. Dokumentasi Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Kawasan Konservasi Natuna

2. Koordinasi Awal Progres Pengusulan Penetapan Kawasan Konservasi Natuna ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan koordinasi awal terkait kegiatan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Natuna dilakukan dengan melakukan koordinasi ke Subdit Kawasan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 Februari 2023. Tujuan kegiatan adalah untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai jadwal pelaksanaan dan hal-hal lain yang berkembang terkait kegiatan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Natuna pasca rapat Pokja pada 27 Januari 2023.

Pertemuan ini secara garis besar membahas kesiapan tim untuk memulai tahapan pengusulan penetapan Kawasan konservasi Natuna. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dalam prosesnya telah menunjuk akademisi sebagai tenaga ahli. Selain itu, pertemuan ini membahas estimasi rencana pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan menyesuaikan jadwal dengan yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan

Riau untuk memastikan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau berencana melakukan kunjungan ke BPSPL Padang Satker Tanjungpinang untuk mendiskusikan kembali terkait hal-hal yang berkembang terkait Kawasan Konservasi untuk selanjutnya dibahas bersama Tenaga Ahli.



Gambar 17. Koordinasi Awal dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau

3. Workshop Pengumpulan Data dan Informasi Rencana Zonasi Kawasan Konservasi untuk Status Dokumen Penetapan 3 MPA Prioritas Kepulauan Riau

Workshop Pengumpulan data dan informasi rencana zonasi serta status dokumen penetapan 3 MPA prioritas Kepulauan Riau yang didukung ICCTF Bappenas melalui COREMAP-CTI ADB dalam penyusunan revisi Rencana Zonasi 3 MPA di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (KK Natuna, KK Lingga, dan KK Batam). Kegiatan dihadiri oleh ICCTF Bappenas, Dit. KKHL, BPSPL Padang, DKP Provinsi Kepri, Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Dinas Perhubungan Prov. Kepri, Cabang Dinas KP Batam, Cabang Dinas KP Lingga, Dinas Perhubungan Kab. Lingga, Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perikanan Kota Batam, Dinas Perikanan Kab. Lingga, UMRH, Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia Kepri, Yayasan Ekologi Kepulauan Riau. Kegiatan dilakukan pada tanggal 30 - 31 Mei 2023.

Pada kesempatan ini, dilakukan diskusi dan peninjauan terhadap usulan zonasi Kawasan konservasi di Kota Batam, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna yang dipandu oleh tenaga ahli. Selain itu, dibahas juga penyesuaian yang perlu diterapkan di masing-masing Kawasan, seperti alokasi zona inti, habitat penting, sinkronisasi data pelabuhan dan aksesibilitas untuk nelayan. Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah pengumpulan data dan informasi langsung ke Kabupaten Natuna.



Gambar 18. Dokumentasi Workshop Pengumpulan Data Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau

4. Konsultasi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau

Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat, 29 September 2023 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan ini dihadiri oleh BPSPL Padang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepulauan Riau, USAID Kolektif, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota terkait, dan Lembaga swadaya terkait.

Berikut adalah informasi terkait Kawasan Konservasi Kabupaten Natuna, Kawasan Konservasi Kabupaten Lingga, dan Kawasan Konservasi Kota Batam.

- Kawasan konservasi Natuna. Luas kawasan 273.067,08 Ha dengan zona inti yang diusulkan seluas 6.363,55 ha, zona pemanfaatan terbatas seluas 265.757,49 ha, dan zona lain seluas 946,04 ha. Kawasan konservasi ini diusulkan sebagai taman dengan persentase zona inti lebih dari 10% luas habitat/ekosistem target konservasi.
- Kawasan konservasi Lingga. Luas kawasan 371.391,55 Ha dengan zona inti yang diusulkan seluas 5.637,27 ha, zona pemanfaatan terbatas seluas 362.648,33 ha, dan zona lain seluas 3.105,95 ha. Kawasan konservasi ini diusulkan sebagai taman dengan persentase zona inti lebih dari 11% luas habitat/ekosistem target konservasi.
- Kawasan konservasi Batam. Luas kawasan 65.976,53 Ha dengan zona inti yang diusulkan seluas 517,81 ha, zona pemanfaatan terbatas seluas 65.444,12 ha, dan zona lain seluas 14,60 ha. Kawasan konservasi ini diusulkan sebagai taman dengan persentase zona inti lebih dari 40% luas habitat/ekosistem target konservasi.

Berdasarkan hasil diskusi, disepakati berita acara dengan poin-poin masukan sebagai berikut:

- Zona inti yang langsung bersinggungan dengan daratan perlu dikaji ulang, beberapa zona inti mengelilingi seluruh pulau, sehingga menutup akses ke pulau-pulau kecil.
- Konfirmasi zona inti yang berada di selat, apakah berada pada jalur pelayaran masyarakat, seperti di antara Pulau Kumbik.
- Beberapa zona inti di pulau-pulau kecil di Lingga, Natuna dan Batam juga menempel di pantai dan menutup sekeliling pulau.
- Pulau Kepala di Natuna pada tahun 2022 sudah dilakukan pembangunan pelindung pantai, sehingga perlu dikonfirmasi lebih lanjut dan merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional Tertentu.
- Ada beberapa daerah di zona inti yg merupakan area tangkap nelayan dengan alat tangkap statis. Apakah tidak mengganggu jalur migrasi beberapa spesies, jika di lokasi zona inti tersebut merupakan *fishing ground*, maka perlu dipertimbangkan kembali.
- Rencana induk Geosite Natuna, Pulau tiga juga masuk dalam aktivitas Geosite yg sedang diusulkan. Jika tidak disejajarkan akan memicu permasalahan dengan rencana induk Geosite Natuna.
- Beberapa garis pantai yang belum cocok/keluar dan alokasi zona labuh terhadap usulan PKKPR.
- Batas Kawasan Konservasi yang berada pada garis pantai menyesuaikan dengan garis pantai RBI 2021.
- Perlu dibentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan dituang ke dalam SK Tim Teknis.
- Tim Teknis akan mengidentifikasi kembali terhadap pemenuhan zona inti seluas minimal 10% dari luas habitat/ekosistem target konservasi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- Perlu ditelaah kesesuaian dengan RTRW Kabupaten/Kota sehingga ada harmonisasi antara ruang darat dan ruang laut.
- Memperkuat data dukung untuk persetujuan zona inti di setiap kawasan konservasi.
- Jika diperlukan, Konsultasi Publik akan dilaksanakan kembali.
- Terhadap Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Konservasi yang telah disusun perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.



Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Teknis Rencana Zonasi Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Riau

c. Sumatra Utara

1. Rapat Persiapan Survei Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pini

Pada hari Senin tanggal 25 September 2023, BPSPL Padang Wilker Medan Mengikuti Kegiatan Kelompok Kerja Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pini dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Survei dan Pengambilan Data Biofisik dan Sosial Ekonomi terkait Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pini Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 01 – 07 Oktober 2023, akan dilanjutkan dengan penyusunan dokumen awal hingga Konsultasi Publik I di Kota Medan pada minggu IV Oktober 2023 dilanjutkan Konsultasi Publik II di Teluk Dalam hingga finalisasi dokumen pada awal November 2023. Kegiatan dilaksanakan bertempat di Ruang Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh POKJA Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pini baik dihadiri secara langsung maupun keikutsertaan melalui media online zoom meeting, dengan tujuan membahas terkait teknis keberangkatan tim dan teknis pelaksanaan kegiatan survei biofisik dan sosial ekonomi.



Gambar 20. Dokumentasi Rapat Persiapan Survei Kawasan Konservasi Perairan Pulau Pini

2. Survei Groundcheck Lapangan Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi di Nias Selatan, Sumatra Utara

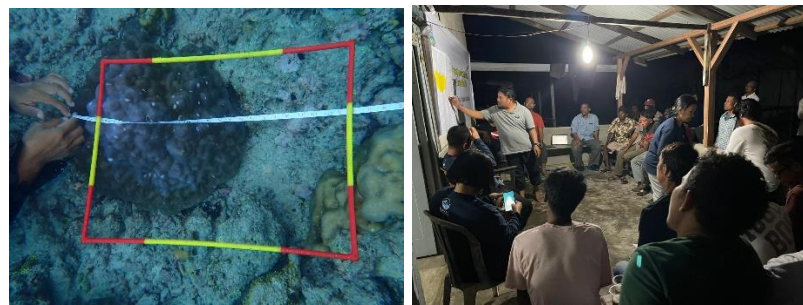
Kegiatan ini dilaksanakan pada 3-7 Oktober 2023 di Perairan Pulau Pini, Desa Labuan Bajau, Kecamatan Pulau Batu Timur, Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat, UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Tello, Pemerintah Desa, tenaga ahli, Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia, dan masyarakat Labuan Bajau.

Pengelola Ekosistem Ahli Muda DKP Sumatra Utara, Zufri Wandu Siregar, menyampaikan bahwa pencadangan Kawasan konservasi di Pulau Pini seluas 44 ha ditargetkan untuk diusulkan penetapannya pada tahun 2023 ini. Lebih lanjut, Zufri juga menyampaikan pelaksanaan survei terdiri dari pengumpulan data ekologi berupa ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove. Tim pendamping BPSPL Padang juga menambahkan perlunya identifikasi target konservasi yang dilengkapi oleh informasi sosial ekonomi dan memperhatikan alokasi zona inti.

Setelah dilakukan pengambilan data ekologi dan sosial ekonomi, dilakukan *focus group discussion* yang juga melibatkan masyarakat setempat. Adapun *focus group discussion* tersebut menyepakati hal-hal berikut:

- Target konservasi di Pulau Pini adalah ekosistem terumbu karang, mangrove dan lamun,
- Kawasan konservasi Pulau Pini dikategorikan sebagai Taman,
- Rencana zona inti yang disepakati antara lain:
 - Perairan Pulau Ular sebagai zona inti ekosistem terumbu karang
 - Perairan Pulau Sambulele sebagai zona inti ekosistem terumbu karang
 - Perairan Desa Labuan Bajau sebelah Timur Laut sebagai zona inti ekosistem lamun dan sebelah timur sebagai zona inti ekosistem mangrove
 - Pulau Sambulele sebagai lokasi zona inti habitat penyu.

Peta, data, dan informasi lebih detail akan dituangkan dalam laporan yang disusun oleh tenaga ahli untuk selanjutnya dibahas pada konsultasi teknis sebelum berlanjut pada tahapan konsultasi publik.



Gambar 21. Dokumentasi Survei di Nias Selatan

3. Konsultasi Publik Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pini Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kab. Nias Selatan, Sumatra Utara

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 16 November 2023 bertempat di Aula Kantor Bupati Nias Selatan dengan menghadirkan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatra Utara, BPSPL Padang, OPD lingkup Nias Selatan, Konservasi Indonesia, dan Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia.

Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Bupati Nias Selatan, Setao Amazihono, yang menyampaikan bahwa Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga perlu dikelola dan ditata dengan baik. Lebih lanjut, M. Riza Kurnia Lubis selaku perwakilan DKP Provinsi Sumatra Utara menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengkonsultasikan dokumen rencana zonasi Kawasan konservasi Pulau Pini agar tidak salah dalam penyusunan zonasi.

Kemudian, Khairunnisa dari FIK Universitas Syiah Kuala Aceh selaku Tenaga Ahli dalam penyusunan dokumen rencana zonasi ini memaparkan tentang hasil survey dan dokumen awal rencana zonasi yang telah disusun. Selanjutnya dilakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari beberapa stakeholder terkait. Adapun beberapa catatan dalam diskusi antara lain:

- Tim BPSPL Padang menyampaikan masukan terkait perlunya penyesuaian garis pantai yang termutakhir atau setidaknya disesuaikan dengan penggunaan garis Pantai integrasi RZWP3K dengan RTRW. Selanjutnya mengonfirmasi kesesuaian zonasi dengan kepentingan pemanfaatan ruang laut Kawasan konservasi ini di daerah, sehingga jika terdapat rencana pengembangan pariwisata, dermaga/pelabuhan, daerah penangkapan dan lain-lain agar zonasinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pengembangan daerah. Tim juga mempertanyakan dasar penentuan zona inti di sebelah timur kawasan.
- Perlu sosialisasi kepada masyarakat nelayan dimana zona-zona yang tidak boleh ada penangkapan (zona inti) dan mana yang boleh serta konsekuensi hukumnya.

- Dinas Perhubungan menyampaikan rencana pembangunan pelabuhan berada di Labuhan Hiu, tidak berada di Kawasan konservasi dan jarak alur pelayaran dengan zona inti sekitar 220 meter dirasa cukup dan tidak mengganggu alur pelayaran.
- Di Kecamatan Pulau-pulau Batu Timur telah ditetapkan sebagai ekowisata berdasarkan rencana strategis pengembangan pariwisata Perda Nias Selatan 5/2018.

Berdasarkan hasil rapat, disepakati tanggapan/saran/masukan sebagai berikut:

- Target Kawasan konservasi Pulau Pini Desa Labuhan Bajau Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan adalah 3 (tiga) ekosistem penting perairan yaitu Terumbu Karang, Mangrove, dan Lamun.
- Kawasan Konservasi Pulau Pini masuk dalam kategori Taman.
- Rencana zona inti yang telah disepakati adalah:
 - Perairan Pulau Ular dan Pulau Sambulele sebagai zona inti ekosistem terumbu karang
 - Perairan Desa Labuhan Bajau sebelah Timur Laut sebagai zona inti ekosistem lamun dan zona inti ekosistem mangrove serta penyu.
 - Perairan Desa Labuhan Bajau sebelah selatan sebagai zona inti ekosistem lamun dan migrasi penyu.
 - Pantai Timur (sekitar Pulau Bakau) tempat mencari makan penyu dan zona inti untuk ekosistem mangrove.
- Terkait zona inti di Pulau Kasi Timur, terdapat alur pelayaran nasional yang berada di dekat Pulau Kasi Timur (berjarak kurang lebih 200 m dari Pulau) terkonfirmasi aman untuk dijadikan zona inti
- Zona inti yang ditetapkan sudah sesuai dengan PerMen KP No.31 Tahun 2020 yaitu sebesar $\pm 11\%$, lebih dari luas minimal 10% dari luas ekosistem yang ditetapkan sebagai zona inti.
- Integrasi garis pantai yang disesuaikan dengan RZWP3K akan dikaji kembali
- Memastikan kembali tidak ada tumpang tindih *conflict of interest* multi sektoral antara masyarakat, pengusaha, dan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, konsultasi public ke-2 akan diselenggarakan di Medan pada tanggal 23 November 2023 mendatang.



Gambar 22. Dokumentasi Konsultasi Publik Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pini

4. Konsultasi Publik II Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pini Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kab. Nias Selatan, Sumatra Utara

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 23 November 2023 di Ruang Data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara, Kota Medan.

Pada kesempatan ini, Akhmad Rangkuti dari Fakultas Pertanian Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan Universitas Sumatera Utara, Ridha Damanik dari Fakultas Geografi Universitas Negeri Medan dan Khairunnisa dari FIK Universitas Syiah Kuala Aceh selaku Tim Tenaga Ahli dalam penyusunan dokumen rencana zonasi ini memaparkan tentang hasil survei dan

dan dokumen awal Rencana Zonasi Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau Pini Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan yang telah disusun. Selanjutnya, disampaikan paparan oleh Dedy Eka Syaputra, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terkait Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kemudian dilakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari beberapa stakeholder terkait.

Adapun beberapa poin penting dalam diskusi yang akan dicantumkan dalam berita acara, antara lain:

- Kawasan Konservasi Perairan Daerah Pulau Pini Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan terdiri dari ekosistem lamun (18.09 ha) menyebar di sebelah timur (kecuali teluk) dan selatan, Pulau-pulau kecil, seperti P. Ular, P. Sambulele, P. Kasi timur, P. Tolong; ekosistem mangrove (2 ha) menyebar di Pulau-pulau kecil, seperti P. Ular, P. Sambulele, P. Kasi timur, P. Tolong; dan terumbu karang (168 ha) menyebar di Pulau-pulau kecil, seperti P. Ular, P. Sambulele, P. Kasi timur, P. Tolong.
- Kawasan Konservasi Pulau Pini masuk dalam kategori Taman. Zona inti yang ditetapkan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.31 Tahun 2020 yaitu sebesar (minimal) 10% dari luas ekosistem yang ditetapkan sebagai zona inti.
- Luasan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Pini dan sekitarnya Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara adalah 44.336,01 Ha.

Setelah diskusi dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Konsultasi Publik II Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Pini.



Gambar 23. Dokumentasi Konsultasi Publik II Rencana Zonasi Kawasan Konservasi Pulau Pini

5. Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Pulau-Pulau Batu Timur Nias Selatan

Konsultasi Teknis Pembahasan draft dokumen Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Pini dan sekitarnya Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan dan Pembahasan draft Revisi Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Sawo Lahewa di Kabupaten Nias Utara dilaksanakan di Ruang Rapat Direktorat KKHL, Ditjen PKRL- KKP Jakarta Pusat pada Kamis 7 Desember 2023.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat KKHL, DKP Sumatera Utara, BPSPL Padang, dan Yayasan Konservasi Indonesia. Konsultasi teknis sebagai salah satu tahapan dalam penetapan Kawasan konservasi sesuai dengan Permen KP 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Konsultasi Teknis dilakukan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan atas Draft dokumen Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Pini dan sekitarnya Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur Kabupaten Nias Selatan dan Dokumen Draft Revisi Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Sawo Lahewa di Kabupaten Nias Utara.

Pemaparan Draft dokumen rencana kawasan konservasi Pulau Pini oleh Khairunnisa dari FIK Universitas Syiah Kuala Aceh selaku Tenaga Ahli, disampaikan bahwa dalam dokumen rencana kawasan konservasi sudah memuat tahapan-tahapan sesuai dengan permen KP 31 Tahun 2020, mulai dari survei, FGD dan terakhir konsultasi publik, kemudian dilanjutkan Pemaparan Peta kawasan konservasi oleh Tenaga Ahli Universitas Syiah Kuala.

Secara umum, draft dokumen final rencana zonasi kedua kawasan konservasi telah memenuhi aspek teknis sesuai dengan Permen KP 31/2020 tentang pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

- KK Pulau Pini akan disulkan seluas 44.336,01 Ha,
- Target Konsevasi Kawasan Pulau Pini berupa terumbu karang, padang lamun, dan mangrove,
- KK Pulau Pini terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lain berupa zona rehabilitasi, zona pelabuhan/ tambat labuh, dan zona lalu lintas kapal,
- Zona inti KK Pulau Pini melindungi 11, 13% dari ekosistem target konservasi
- KK Pulau Pini akan diusulkan dengan kategori taman,
- Ketentuan Pemanfaatan telah mengikuti Permen KP 31/ 2020.

Terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara sebelum dapat mengusulkan penetapan Kawasan Konservasi Pulau Pini. Pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara diminta agar memastikan kesesuaian alokasi ruang mengacu pada persetujuan teknis RZWP3K dari Menteri Kelautan dan Perikanan melalui surat Nomor B.64/ MEN-KP/II/2023 tanggal 10 Januari 2023. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatra Utara juga diarahkan agar mengacu pada Kepdirjen PRL Nomor 41 Tahun 2021 terkait penyajian informasi geospasial kawasan konservasi.



Gambar 24. Dokumentasi Konsultasi Teknis Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Pini

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 2 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.UBA] Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan Rincian Output (RO) [2362.UBA.001] Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 10. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU2

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	100.000.000,00	99.087.090,00	99,1
Total		100.000.000,00	99.087.090,00	99,1

Realisasi anggaran rincian output [2362.UBA.001] adalah 99,1%.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun selanjutnya, BPSPL Padang akan Kembali mendampingi pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah sesuai dengan porsi keterlibatan yang disepakati dengan Pemerintah Daerah.

IKU. 3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)

Bantuan konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan/atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 49 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2023. Adapun pencapaian IKU ini dihitung dari jumlah kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai petunjuk teknis tersebut.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKU 3 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3

IKU 3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)								
Realisasi	Tahun 2023				Renstra			
Tahun 2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
3	3	3	100	-	11	81,81	14	78,57

Capaian IKU 3 tahun 2023 adalah 3 kelompok yang dicirikan dengan tersalurkannya bantuan KOMPAK kepada Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Penerima Bantuan KOMPAK Lingkup BPSPL Padang Tahun 2023

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nomor dan Tanggal BAST	Nilai Bantuan (Rp)	Item Barang Bantuan
1	Poseidon Diver Mentawai	Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat	BAST.255/BPSPL.1/PRL.440/III/2023 tanggal 30 Maret 2023	99.000.500,00	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera OLYMPUS TG-6 + Seafrog Housing dan Memori 128 GB: 1 set - BCD Cressi START: 2 set - Regulator Cressi AC2 XS COMPACT: 2 set - Octopus Cressi XS Compact: 2 set - Console AmScuD XP2: 2 set

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nomor dan Tanggal BAST	Nilai Bantuan (Rp)	Item Barang Bantuan
					<ul style="list-style-type: none"> - Mask Cressi Metis: 3 set - Snorkel Cressi Corsica: 3 set - Fin Full Foot Cressi Pro Star BLACK: 6 set
2	Kelompok Banyu Biru	Dusun Sungai Kong, Desa Simpang Tiga Jaya, Kecamatan Tuling Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan	BAST.360/BPSPL.1/PRL.440/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023	90.970.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Scubapro BCD Set Paket (BCD T-One, Regulator Mk2/R095, Octopus R095, Gauge 2in1): 2 Set - Scubapro Wetsuit Oneflex 3 mm: 1 Unit - Scubapro Delta Boot: 2 Set - Spectra Dive Mask: 2 Unit - Spectra Snorkel: 2 Unit - AmScuD Scuba Tank 80 Cuft: 2 Unit - AmScuD Weight Belt Plastic Buckle: 2 Unit - Seawing Nova Fin: 2 Set - Olympus TG-6 Underwater Camera: 1 Unit - Olympus TG-6 Housing Underwater: 1 Unit
3	Pokmaswas Hiu Macan	Kelurahan Kampung Nelayan, Kec. Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi	BAST.402/BPSPL.1/PRL.440/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023	109.990.000,00	<ul style="list-style-type: none"> - Kapal Boat Fiber 7 M: 1 Unit - Mesin Tempel Yamaha 25 PK: 1 Unit - Life Jacket: 5 Unit - Tali Tambat: 20 M

Data dukung:

https://drive.google.com/file/d/1q_QdxdlrEglxcDE5tJIZ88ht0xV11XO/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1OI00r9uwkkBVBdVJExM1XkhROh1Je1Ma/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1DjsUypl6rCYPn9atz3a4H5j6uV4PYbOn/view?usp=sharing>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, BPSPL Padang menyalurkan bantuan KOMPAK kepada tiga kelompok, yaitu Pusong Diving Club di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 31 Maret 2022, Tuah Basamo Diving di Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 19 Mei 2022, dan Pokdarwis Gampong Anoi Itam di Kota Sabang pada 23 Agustus 2023. Maka dari itu, tidak terdapat kenaikan capaian dari tahun 2022 hingga 2023 karena periode tersebut memiliki realisasi capaian yang sama.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, hingga tahun 2023 IKU 3 secara kumulatif memiliki target 11 (sebelas) kelompok yang menerima bantuan KOMPAK. Maka dari itu, capaian hingga tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2023 adalah 81,81% dengan disalurkan bantuan kepada 9 (sembilan) kelompok dalam kurun waktu 2020 –2023. Sementara itu, jika capaian tersebut dibandingkan dengan target Renstra hingga 2024, maka diperoleh persentase capaian 78,57%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel di bawah menyajikan cuplikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 yang berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang tahun 2023.

Tabel 13. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	Pusat

Perjanjian Kinerja BPSPL padang tahun 2023 telah mengakomodir 3 (tiga) dari target 5 (lima) dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2023. Hingga berakhirnya tahun 2023, BPSPL Padang telah menyalurkan bantuan KOMPAK kepada kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Pencapaian IKU 3 didukung dengan dilakukannya identifikasi calon kelompok penerima bantuan yang menyeluruh sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi. Tim pelaksana juga telah menyiapkan form seleksi dalam rangka memperoleh kelompok yang benar-benar sesuai. Melalui tahapan identifikasi, tim BPSPL Padang dapat memahami lingkup kegiatan yang diusung oleh kelompok secara menyeluruh hingga mengidentifikasi kebutuhan sarana/prasarana yang diajukan kelompok. Selain itu, tahapan identifikasi serta verifikasi yang menyeluruh juga dapat menghasilkan kelompok yang benar-benar sesuai dengan persyaratan yang dimandatkan dalam Petunjuk Teknis. Jika kelompok yang terpilih sebagai penerima bantuan tersebut betul-betul layak dan sesuai, diharapkan bantuan pun dapat dimanfaatkan dan mendukung pengembangan upaya konservasi kelompok di wilayahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan KOMPAK, tahapan pengadaan barang jasa merupakan tahapan krusial yang dapat mengancam keberhasilan kegiatan secara tepat waktu. Untuk ke depannya, tim dapat mengupayakan pencegahan permasalahan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pemantauan secara menyeluruh dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU 3 telah didukung oleh hal berikut:

1. Melakukan koordinasi aktif dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan kelompok penerima bantuan melalui telepon/internet;
2. Menggunakan standard biaya setempat untuk menghindari *mark-up* pengadaan apabila bentuk bantuan jasa konstruksi dan barang yang tersedia di lokasi kelompok.

Untuk mencapai IKU 3, BPSPL Padang didukung dengan alokasi anggaran sejumlah Rp360.600.000,00 dengan realisasi Rp359.961.544,00 atau 99,8%. Dalam pelaksanaannya, efisiensi sumber daya dalam pencapaian IKU 3 terlihat dari optimalisasi wilayah kerja Jambi dan Palembang untuk melaksanakan verifikasi kelompok. Hal tersebut dapat mendukung efisiensi penggunaan anggaran.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU 3 dapat ditunjang oleh kegiatan koordinasi dan pelaporan progress perkembangan penyaluran bantuan dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Pelaporan yang tertib dan sesuai dapat mendukung aspek akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Kegiatan pendukung IKU 3 antara lain sebagai berikut.

a. Verifikasi Kelompok Calon Penerima Bantuan KOMPAK Tahun 2023

- Verifikasi Kelompok Poseidon Diver Mentawai di Desa Tuapejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 08-09 Februari 2023,
- Verifikasi Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 13-15 Februari 2023,
- Verifikasi Kelompok Masyarakat Pengawas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 13-15 Februari 2023.

b. Pengusulan dan Penetapan Poseidon Diver Mentawai sebagai Penerima Bantuan KOMPAK Tahun 2023

- Penyampaian Usulan Calon Kelompok Penerima Bantuan Konservasi Tahap I Tahun 2023 kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut melalui surat Plt. Kepala BPSPL Padang nomor B.313/BPSPL.1/PRL.440/III/2023 tanggal 03 Maret 2023,
- Persetujuan terhadap Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan KOMPAK 2023 melalui Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Nomor B.530/DJPRL.5/PRL.440/III/2023 tanggal 09 Maret 2023,
- Penetapan Poseidon Diver Mentawai sebagai Penerima Bantuan Konservasi tahun 2023 di lingkup BPSPL Padang melalui SK PPK BPSPL Padang Nomor 222/PPK/BPSPL.1/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

c. Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Poseidon Diver Mentawai

Serah terima bantuan KOMPAK kepada Kelompok Poseidon Diver Mentawai senilai Rp99.000.500,00 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Nomor BAST.255/BPSPL.1/PRL.440/III/2023 pada 30 Maret 2023.



Gambar 25. Dokumentasi Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Kelompok Poseidon Diver Mentawai

d. Pengusulan dan Penetapan Pokmaswas Hiu Macan dan Banyu Biru sebagai Penerima Bantuan KOMPAK Tahun 2023

- Penyampaian Usulan Calon Kelompok Penerima Bantuan Konservasi Tahap II Tahun 2023 kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut melalui surat Plt. Kepala BPSPL Padang nomor B.545/BPSPL.1/PRL.440/V/2023 tanggal 09 Mei 2023,
- Persetujuan terhadap Hasil Identifikasi dan Verifikasi Kelompok Penerima Bantuan KOMPAK 2023 melalui Surat Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Nomor B.918/DJPRL.5/PRL.440/V/2023 tanggal 12 Mei 2023,
- Penetapan Pokmaswas Hiu Macan dan Kelompok Banyu Biru sebagai Penerima Bantuan Konservasi tahun 2023 di lingkup BPSPL Padang melalui SK PPK BPSPL Padang Nomor 290/PPK/BPSPL.1/V/2023 tanggal 15 Mei 2023.

e. Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Kelompok Banyu Biru

Serah terima bantuan KOMPAK kepada Kelompok Banyu Biru senilai Rp90.970.000,00 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Nomor BAST.360/BPSPL.1/PRL.440/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.



Gambar 26. Dokumentasi Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Kelompok Banyu Biru

f. Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Pokmaswas Hiu Macan

Serah terima bantuan KOMPAK kepada Pokmaswas Hiu Macan senilai Rp109.990.000,00 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Nomor BAST.402/BPSPL.1/PR.L.440/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023.



Gambar 27. Dokumentasi Serah Terima Bantuan KOMPAK kepada Pokmaswas Hiu Macan

g. Identifikasi untuk Calon Kelompok Penerima Tahun 2024

BPSPL Padang melaksanakan identifikasi calon kelompok penerima bantuan konservasi untuk tahun anggaran 2024 mendatang. Identifikasi dilaksanakan terhadap kelompok-kelompok berikut.

Tabel 14. Daftar Kelompok Calon Penerima Bantuan Konservasi yang Telah Diidentifikasi

No	Nama Kelompok	Lokasi	Aktivitas
1	Lembaga Ekowisata Pulo Aceh	Gampong Gugop, Kecamatan Pulo Aceh, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh	Konservasi penyu, edukasi konservasi, pengembangan ekowisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat
2	Pokmaswas Rimba Peduli	Nagari Sungai Pinang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Pengolahan sampah plastik, konservasi penyu di Pulau Marak, pendidikan lingkungan, konservasi hutan, pelestarian satwa dilindungi (penyu), dan penanaman vegetasi pantai
3	Laskar Pemuda Peduli Lingkungan Amping Parak	Nagari Sungai Pinang, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat	Perlindungan penyu, pengembangan ekowisata, rehabilitasi vegetasi pantai, pemberdayaan masyarakat
4	Pokmaswas Guci Emas	Kel. Muaro Pijoan Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Jambi	Pengawasan jenis ikan dilindungi (Belida, Pari sungai, dan ridiangus)

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 3 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.QEH] Bantuan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 3

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.QEH.001.051] Pemberian Bantuan KOMPAK	360.600.000,00	359.961.544,00	99,8
Total		360.600.000,00	359.961.544,00	99,8

Realisasi anggaran komponen [2362.QEH.001.051] adalah Rp359.961.544,00 atau 99,8%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan identifikasi, verifikasi, hingga penyediaan barang bantuan KOMPAK untuk diserahkan kepada Kelompok Masyarakat.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun 2024, BPSPL Padang mengolah data hasil identifikasi dan memproses tahapan penyaluran bantuan konservasi sesuai Petunjuk Teknis yang berlaku.

IKU.4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Padang adalah Jenis ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah yang dilaksanakan, melalui:

- a. Pendataan jenis ikan dilindungi/terancam punah dengan target jenis: sidat, teripang, penyu, karang, ikan belida, terubuk, dan ikan bilih,
- b. Perbaikan habitat/pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan dengan target jenis karang
- c. Penyadartahuan/edukasi dan sosialisasi keanekaragaman hayati perairan dilindungi/terancam punah serta Penanganan biota laut dilindungi/terancam punah dengan target jenis biota laut dilindungi.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKU 4 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4

IKU 4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)								
Realisasi	Tahun 2023				Renstra			
Tahun 2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
11	7	10	120	-9,09	8	120	8	120

Pada tahun 2023, capaian IKU 4 telah melampaui target 7 jenis dengan realisasi 10 jenis (persentase capaian 120%) sebagaimana rincian berikut:

- 1. **Sidat**, melalui kegiatan pendataan di Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 2. **Teripang**, melalui kegiatan pendataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 3. **Penyu**, melalui kegiatan pendataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Simelue, survei awal potensi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan respon cepat penanganan jenis ikan terdampar;
- 4. **Karang**, melalui rehabilitasi, pendataan, dan monitoring *Coral Stock Center* di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Pesisir Selatan;
- 5. **Belida**, melalui pendataan di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muara Enim;

6. **Terubuk**, melalui pendataan di Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak;
7. **Ikan Bilih**, melalui pendataan di Danau Singkarak, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar;
8. **Cetacean (Paus, Lumba-lumba, Pesut)**, melalui kegiatan respon cepat penanganan mamalia terdampar;
9. **Hiu Paus**, melalui kegiatan respon cepat penanganan jenis ikan terdampar;
10. **Dugong**, melalui kegiatan respon cepat penanganan mamalia terdampar.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/folders/1AGKA5joxus7IjDf4nRHVLkqm15aiV78?usp=sharing>.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian pengelolaan jenis ikan yang dilindungi terealisasi sejumlah 11 jenis meliputi teripang, belida, sidat, terubuk, penyu, karang, dugong, ikan bilih, lumba-lumba, hiu paus, dan pari sungai raksasa. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun 2023, terdapat penurunan capaian sebesar 9,09%. Penurunan capaian tersebut tidak mempengaruhi persentase capaian karena pada periode keduanya telah diperoleh persentase maksimal.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, pada tahun 2023 dan 2024 IKU 4 memiliki target 8 jenis. Ditinjau dari target Renstra tahun 2023 dan 2024, persentase capaian IKU ini adalah 120%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel di bawah menyajikan cuplikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 yang berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang tahun 2023.

Tabel 17. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	Pusat

Perjanjian Kinerja BPSPL Padang tahun 2023, khususnya IKU 4, telah mengakomodir 7 (tujuh) jenis dari target 18 (delapan belas) jenis dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2023.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Upaya pencapaian IKU 4 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam pendataan sidat, penyu, belida, terubuk, dan ikan bilih, tim BPSPL Padang dibantu oleh enumerator sehingga diperoleh pendataan *time series*. Pada jenis karang, pendataan juga dibantu oleh Kelompok Masyarakat binaan BPSPL Padang di Aceh Barat Daya dan Pesisir Selatan. Selain itu, dukungan dari pihak lain juga terdapat pada kegiatan respon cepat penanganan biota terdampar. Pada kegiatan respon cepat, BPSPL Padang kerap berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat, Dinas, LSM, dan stakeholder setempat lainnya. Sementara itu, pada kegiatan yang membutuhkan survei lapangan secara langsung, seperti monitoring *coral stock center*, pendataan sidat, dan monitoring teripang, tim pelaksana juga melakukan perencanaan dan persiapan yang mengantisipasi adanya kemungkinan cuaca buruk. Tim survei juga membekali diri dengan peralatan yang memadai untuk survei menyesuaikan dengan data

yang dibutuhkan dan tipe kegiatan yang dilakukan. Antisipasi tersebut diperlukan untuk memastikan keselamatan tim dan kesesuaian data yang terkumpul. Tanpa adanya pertimbangan tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat terhambat dan berimplikasi pada kualitas pendataan. Selama proses pelaksanaan kegiatan, BPSPL Padang telah mengantisipasi terjadinya hal-hal yang diduga dapat menghambat capaian sehingga tidak ditemukan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU 4 telah didukung oleh hal berikut:

1. Mengimplementasikan metode penyetoran data dari enumerator berbasis daring;
2. Melakukan koordinasi aktif dengan Dinas terkait dalam mengumpulkan informasi awal atau permohonan pendamping lapangan dan ruangan pertemuan.
3. Menjalin kerja sama dan komunikasi aktif dengan *stakeholder* lain agar dapat menjangkau lokasi keterdamparan jenis ikan yang terkendala jarak dan akses.

Untuk mencapai IKU 4, BPSPL Padang didukung dengan alokasi anggaran sejumlah Rp650.000.000,00 dengan realisasi Rp637.213.149,00 (98%). Di lingkup kegiatan pendataan, terdapat efisiensi dengan adanya perekrutan enumerator untuk melakukan pendataan secara *time series* yang dalam prosesnya senantiasa disupervisi oleh tim BPSPL Padang. Dalam hal ini, perekrutan enumerator membutuhkan anggaran yang lebih sedikit dibandingkan jika pendataan dilakukan oleh tim BPSPL Padang. Adapun honor enumerator di lingkup BPSPL Padang adalah Rp80.000,00/hari. Jika pendataan dilakukan 25 hari per bulannya, maka alokasi anggaran untuk enumerator adalah sekitar Rp2.000.000,00.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU 4 dapat ditunjang oleh kegiatan supervisi yang perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada tenaga enumerator. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kualitas data yang dikumpulkan dapat terjaga. Dalam hal kegiatan penanganan, koordinasi dan komunikasi aktif dengan *stakeholder* lain juga penting agar dapat menjangkau lokasi keterdamparan yang terkendala jarak dan akses. Berikut adalah kegiatan pendukung keberhasilan capaian IKU 4.

1. Sidat

a. Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya

Pendataan sidat di Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan di Kecamatan Indra Jaya selama sebelas bulan dengan dibantu oleh dua tenaga enumerator. Dalam kurun waktu tersebut, pendataan dilakukan selama lima - enam hari setiap bulannya atau 60 hari selama sebelas bulan. Adapun metode yang dilakukan adalah survei langsung menggunakan alat tangkap bubu jaring yang memiliki frame besi dengan dimensi Tinggi 50 cm, Lebar 100 cm, Panjang 300 cm.



Gambar 28. Dokumentasi Supervisi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya

Hasil pendataan tahun 2023 menunjukkan bahwa Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh memiliki potensi jenis sidat terutama pada stadia *glass eel*. Dari hasil pendataan tahun 2023, didapatkan total 1198 individu sidat pada stadia *glass eel* dengan puncak kemunculan sidat berdasarkan bulan masehi yaitu pada Bulan Agustus dengan total 814 individu. Sementara itu, berdasarkan Kalender Hijriah kemunculan tertinggi terjadi pada tanggal 28 Hijriah dengan total 459 individu. Untuk puncak kemunculan sidat berdasarkan pukul pengangkatan yaitu pada Pukul 21:00 WIB dengan total 326 Individu sidat stadia *glass eel*.



Gambar 29. Sidat Stadia Glass Eel

b. Pendataan Sidat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pendataan sidat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan pada 15-18 Oktober 2023 di dua muara, yaitu Muara Sungai Mabolak, Desa Sikapak dan Muara Sungai Cimpungan, Desa Matobe.

Kegiatan diawali dengan koordinasi dengan pendamping lapangan sekaligus kepala UPTD Balai Benih Ikan Pantai, Hardiansyah. Adapun rencana pendataan akan dilaksanakan selama tiga malam berturut-turut di dua lokasi, yaitu Muara Sungai Mabolak dan Muara Sungai Cimpungan sesuai dengan Kepdirjen PRL No 67 Tahun 2022 tentang Juknis Pendataan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES.

Kegiatan pendataan ikan sidat kali ini menggunakan alat tangkap jenis bubu dengan ukuran 1x1 m dan panjang jaring 2,5 m dengan jumlah masing - masing sebanyak tiga bubu per muara. Berdasarkan hasil penangkapan diperoleh total benih ikan sidat selama tiga hari pendataan yaitu 176 ekor di Muara Sungai Cimpungan dan 58 ekor di Muara Sungai Mabolak dengan berat berkisar dari 0,06 - 0,11 gram.

Pada kesempatan ini dilakukan pula pengukuran kualitas air yang meliputi salinitas, suhu, dan pH. Serta perhitungan luasan muara sungai dengan menggunakan drone. Kemudian, dilakukan pula pendataan sosial ekonomi kepada enam orang nelayan yang pernah melakukan penangkapan ikan Sidat. Berdasarkan keterangan para nelayan tersebut, saat ini secara umum kondisi ikan sidat tidak mengalami penurunan karena tidak adanya kegiatan pemanfaatan ikan sidat di sekitar Sikapak dan tidak ada pengepul, masyarakat hanya memanfaatkan ikan sidat untuk kebutuhan sehari-hari. Namun demikian, sebelumnya terdapat kegiatan pemanfaatan ikan sidat pada tahun 2016-2017 dengan hasil tangkapan per hari kurang lebih 70 kg dengan harga jual Rp 70.000,-/kg. Lokasi penangkapan masyarakat berada di Muara Sungai Cimpungan, Manganjo, Pasapuat, Mairuk, Betumonga, Taikako, dan Siloinan.



Gambar 30. Dokumentasi Pendataan Sidat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

2. Teripang

Pendataan teripang di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan pada 07-11 Februari 2023. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara terkait pemanfaatan teripang dan survei sebaran teripang. Responden pada wawancara adalah pengepul dan nelayan teripang. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah rata-rata teripang yang terkumpul adalah 50 kg/minggu dengan didominasi oleh jenis gamat, pahit/lakling hitam, pulut, babi, dan pasir. Harga jual teripang tertinggi, yaitu jenis gamat, berkisar Rp600.000,00/kg. Untuk menangkap teripang, nelayan menyelam secara manual pada kedalaman 4 – 7 meter dan menggunakan kompresor hingga kedalaman 10-15 meter dengan alat tangkap tombak ataupun tangan. Penangkapan dilakukan sepanjang tahun dengan musim puncak pada Januari hingga Maret.

Lebih lanjut, survei sebaran teripang dilaksanakan dengan metode jelajah di enam lokasi, yaitu Brekkei, Pulau Masilo, Pulau Kasiak/Pasir, Malamit, Gotap, dan Gosong Saplap. Penyelaman dilakukan selama 3 malam bersama nelayan lokal. Hasil pendataan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini dan akan dianalisis lebih lanjut.

Tabel 18. Hasil Survei Sebaran Teripang di Pulau Siberut

Nomor	Lokasi	Hasil Survei
1	Brekkei	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ekor teripang jenis gamat, ayam-ayam, susu/gajah • 1 ekor belum teridentifikasi
2	Pulau Masilo	-
3	Pulau Kasiak/Pasir	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ekor teripang gamat • 1 ekor teripang ayam-ayam • 2 ekor teripang pulut putih/cicak • 1 ekor teripang lakling merah • 1 ekor lakling hitam
4	Malamit	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ekor teripang gamat • 2 ekor teripang ayam-ayam • 1 ekor teripang babi
5	Gotap	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ekor teripang gamat • 1 ekor teripang pulut • 1 ekor lakling merah
6	Gosong Saplap	6 ekor teripang gamat

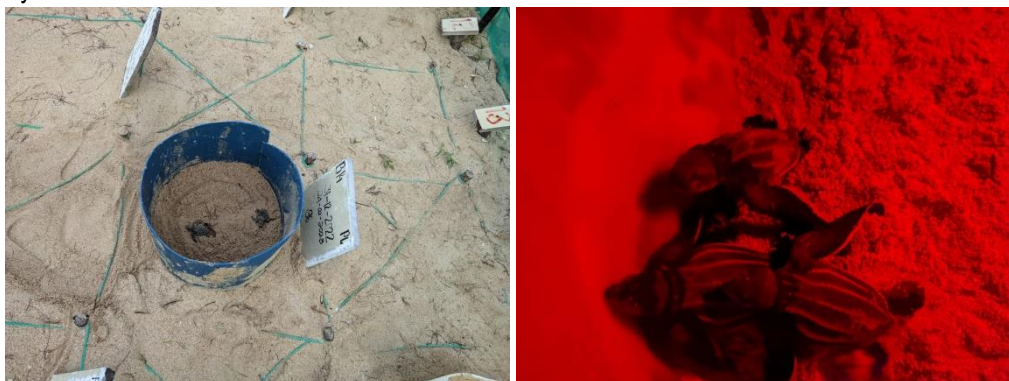


Gambar 31. Dokumentasi Pendataan Teripang di Pulau Siberut, Kabupaten Kep. Mentawai

3. Penyu

a. Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pendataan pendaratan penyu dilaksanakan di Pantai Buggeisiata, Desa Betumonga, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pendataan dilaksanakan pada musim peneluran penyu, yaitu bulan Januari, Februari, November, dan Desember dengan sistem *shifting* pada setiap malam dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun pendataan aktivitas pendaratan, jejak, dan sarang dilaksanakan melalui patroli malam. Kegiatan ini didukung oleh Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan Yayasan Penyu Indonesia.



Gambar 32. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Berdasarkan hasil pendataan, terdapat 24 ekor dari tiga jenis yang ditemukan mendarat dan bersarang di Pantai Buggei Siata, Desa Betumonga, yaitu penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu lelang (*Lepidochelys olivacea*), dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Total sarang yang ditemukan di Pantai Buggei Siata, Desa Betumonga sebanyak 24 sarang penyu ditemukan dan direlokasi selama pendataan tahun 2023 pada bulan pendataan dengan jumlah telur sebanyak 2.155 butir dengan jumlah 1.281 ekor tukik yang telah dirilis. Adapun vegetasi pantai di sekitar pantai peneluran penyu berupa katang-katang, gagabusan, dan pohon kelapa.

Tabel 19. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Desa Betumonga, Kab. Kep. Mentawai

Bulan	Σ Penyu	Jenis Penyu			Σ Sarang	Σ Telur	Σ Telur yang Direlokasi	Σ Telur yang Menetas	Σ Tukik yang Dilepaskan
		Lelang	Belimbing	Sisik					
Januari	15	1	14		15	1285	1285	486	484
Februari	5		4	1	5	493	493		
November	-							Terjadi abrasi dan pergeseran awal musim	
Desember	4								

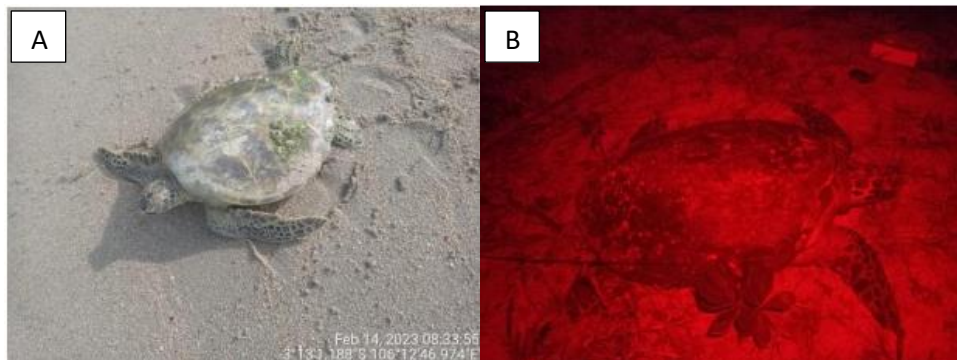
b. Pendataan Penyu di Pulau Maspari, Sumatera Selatan

Survei awal potensi penyu di Pulau Maspari, Kabupaten Ogan Komering Ilir dilaksanakan pada tanggal 13-18 Maret 2023. Berdasarkan hasil patroli malam dan pengamatan pada pagi hari tanggal, telah ditemukan aktivitas pendaratan berdasarkan adanya individu penyu, jejak dan sarangnya. Jenis penyu yang teridentifikasi di Pulau Maspari adalah jenis penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*). Identifikasi morfologi penyu sisik berdasarkan karakteristik eksternal dengan jenis cangkang keras, jumlah *scutes coastal* pada karapas sebanyak 4 pasang, jumlah *scutes inframarginal* pada *plastron* sebanyak 1 pasang, jumlah *scales prefrontal* sebanyak 2 pasang, dan jumlah *scales postocular* sebanyak 3 pasang. Identifikasi morfologi penyu hijau berdasarkan karakteristik eksternal dengan jenis cangkang keras, jumlah *scutes coastal* pada karapas sebanyak 4 pasang, jumlah *scutes inframarginal* pada *plastron* sebanyak 4 pasang, jumlah *scales prefrontal* sebanyak 1 pasang, dan jumlah *scales postocular* sebanyak 4 pasang. Penyu sisik yang di ukur dengan panjang lengkung karapas 76 – 87 cm dan lebar lengkung karapas 61,83 – 75 cm dengan tingkah laku diam dan terdapat teritip pada karapas.



Gambar 33. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Maspari

Pemantauan dilakukan dengan pembagian sektor berdasarkan panjang pantai berkisar antara 50 – 500 m tergantung dari panjang pantai dan penyesuaian shift pendataan sesuai dengan sumberdaya yang ada. Terdapat 5 sektor di sepanjang Pulau Maspari. Kelima sektor merupakan pantai pendaratan bagi penyu ke pulau. Berdasarkan hasil survei, ditemukan 14 jejak penyu dengan 8 individu, dimana 2 individu bertelur dan 6 individu memeti. Kedua individu bertelur terjadi di sarang alami, kondisi sarang aman, terdapat ancaman berupa manusia dan biawak, serta tidak dilakukan relokasi terhadap sarang.



Gambar 34. Penyu yang Teridentifikasi di Pulau Maspari (A) Penyu Hijau (B) Penyu Sisik

c. Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar, Kabupaten Simelue

Pendataan penyu di Pulau Salaut Besar berlangsung pada September – Desember, yang mana juga didukung oleh Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Penyu Indonesia. Sama halnya dengan pendataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pendataan dilaksanakan dengan sistem *shifting* pada setiap malam dibantu oleh tenaga enumerator.



Gambar 35. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar

Berdasarkan hasil pendataan, penyu yang ditemukan mendarat di Pulau Salaut Besar selama bulan pendataan sebanyak 309 ekor didominasi dari jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*) serta terkadang dijumpai pula penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Total sarang yang ditemukan di Pulau Salaut Besar sebanyak total 212 sarang, yaitu 117 sarang yang direlokasi dan 95 sarang alami. Dari 212 sarang tersebut, terdapat 12.360 telur penyu dan 1.330 tukik yang telah dirilis. Adapun vegetasi pantai di sekitar pantai peneluran penyu berupa katang-katang, gagabusan, dan pohon kelapa.

Tabel 20. Tabulasi Data Pendaratan Penyu di Pulau Salaut Besar

Bulan	Σ Penyu	Jenis Penyu			Σ Sarang	Σ Telur	Σ Telur yang Direlokasi	Σ Telur yang Menetas	Σ Tukik yang Dilepaskan
		Hijau	Belimbing	Sisik					
September	119	119			87	4.681	4.681	1.330	1.330
Oktober	96	92	3	1	61	3.725	3.519		
November	77	73	4		52	3.359	3.359	Prediksi menetas 2024	
Desember	17	15	2		12	595	595	Prediksi menetas 2024	

4. Karang

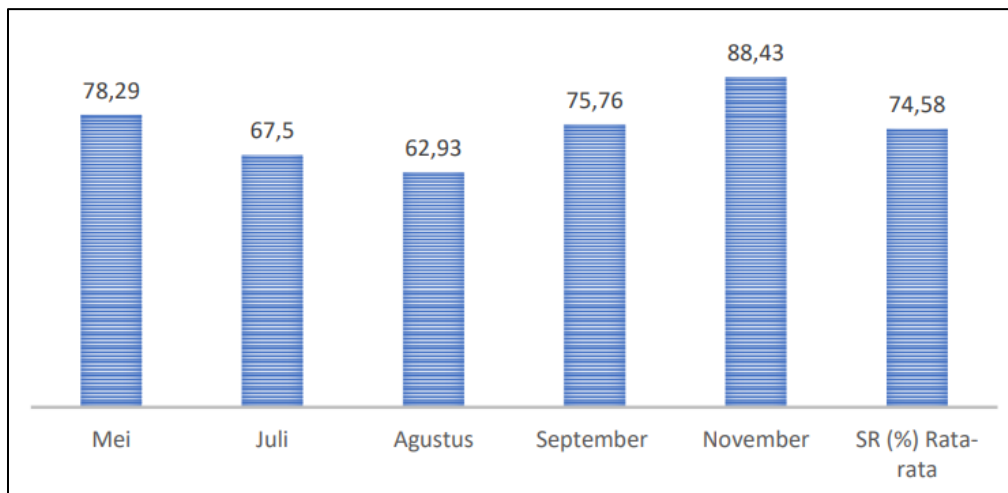
a. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di KKPD Aceh Barat Daya

Pendataan dan monitoring terumbu karang di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan di perairan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Aceh Barat Daya, yaitu Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh. Adapun model rehabilitasi yang dilakukan adalah metode rak meja pipa PVC sejumlah 10 unit dan *coral tree nursery* 5 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terdapat penambahan rak meja sejumlah 21 unit sehingga total media tanam yang digunakan adalah 35 unit dengan rincian 31 media jenis rak meja pipa PVC dan 5 media jenis *coral tree nursery*. Kegiatan pendataan dan monitoring *Coral Stock Center* Pulau Pusong pada tahun 2023 dilaksanakan setiap bulan pada rentang Februari – November. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan monitoring dilaksanakan dua hari setiap bulannya oleh Kelompok Pusong Diving Club. Kegiatan ini juga didukung kemitraan dengan Pusat Riset Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala.



Gambar 36. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Barat Daya

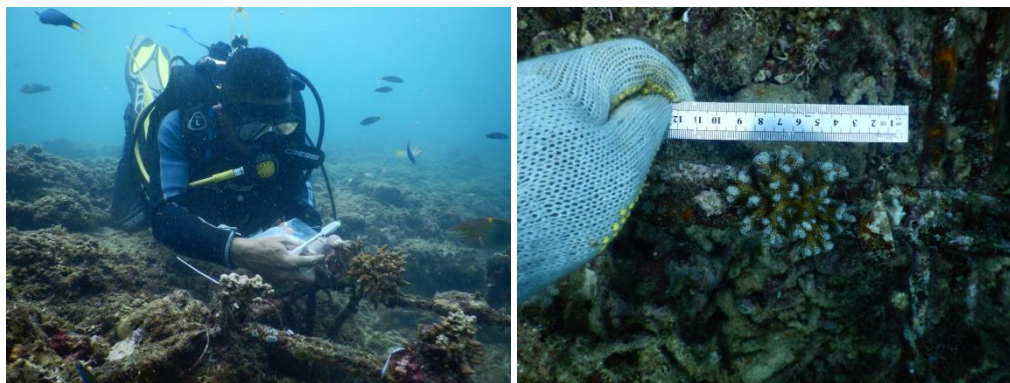
Dalam pemantauannya, dilakukan pembersihan dan perawatan pada media dan fragmen karang. Pada bulan September, dilakukan penggantian fragmen karang yang mati dengan yang baru sejumlah 150 *pieces*. Selain itu, dilakukan pengukuran tingkat kelangsungan hidup atau *survival rate* rata-rata dari Mei – November 2023 yang mencapai 74,58%.



Gambar 37. Survival Rate Transplantasi Karang CSC Aceh Barat Daya Mei-November 2023

b. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan

Monitoring dan pemeliharaan coral stock center dilaksanakan di Perairan Batu Kajang, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun model rehabilitasi yang dilakukan adalah metode rak besi sejumlah 15 meja dan beton sejumlah 8 meja. Pendataan dan monitoring pada meja rak besi dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu Februari, Maret, Mei, Juli, dan Agustus. Sementara itu, meja beton dipasang pada Maret sehingga pendataannya berlangsung sebanyak tiga kali, yaitu Mei, Juli, dan Agustus.



Gambar 38. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Pesisir Selatan

Selain upaya perawatan media tanam, dilakukan juga pengukuran survival rate. Berdasarkan hasil monitoring selama 5 (lima) kali pada tahun 2023, secara umum rata-rata tingkat kelangsungan hidup karang pada CSC Pesisir Selatan pada monitoring periode tahun 2023 adalah 80% untuk meja besi dan 73% untuk meja beton.

5. Ikan Belida

Pendataan ikan belida dilaksanakan di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Di Kabupaten Tebo, Jambi, pengumpulan data di lapangan menggunakan alat tangkap pukat (jaring insang). Sementara itu, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pengumpulan data belida di lapangan menggunakan alat tangkap pengilar (perangkap). Dalam hal ini, tim BPSPL Padang turut melaksanakan supervisi pendataan.

Hasil pendataan ikan belida di Provinsi Jambi dan Sumatra Selatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21. Hasil Pendataan Ikan Belida Tahun 2023

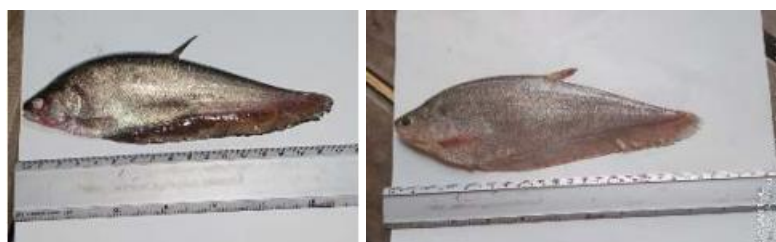
No	Stasiun Pendataan	Lokasi	Alat Tangkap	Lama Pendataan	Jenis yang teridentifikasi	Kelimpahan Rata-Rata per Unit Usaha	Kelimpahan Ikan	Frekuensi Keterdapatan
1	Sungai Alai	Kabupaten Tebo, Jambi	Jaring insang	300 hari	Belida Sumatra (<i>Chitala cf. hypselonotus</i>)	1 ekor/trip	3 ekor per hektar	66,67%
2	Sungai Batang Tebo	Kabupaten Tebo, Jambi	Jaring insang	300 hari	Belida Sumatra (<i>Chitala cf. hypselonotus</i>)	0 ekor/trip	0,15 ekor per hektar	40%
3	Danau Sungai Duo	Kabupaten Tebo, Jambi	Jaring insang	300 hari	Belida Sumatra (<i>Chitala cf. hypselonotus</i>)	1 ekor/trip	1 ekor per hektar	40%
4	Sungai Belida	Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan	Perangkap	255 hari	- Belida Sumatra (<i>Chitala cf. hypselonotus</i>) - Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>)	6 ekor/trip	2 ekor per hektar	- Belida Sumatra (<i>Chitala cf. hypselonotus</i>): 25% - Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>): 100%
5	Kanal Sawah	Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan	Perangkap	57 hari	Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>)	2 ekor/trip	55 ekor per hektar	Belida Jawa (<i>Notopterus notopterus</i>): 100%



Gambar 39. Dokumentasi Belida Sumatra di Kabupaten Tebo



Gambar 40. Dokumentasi Belida Sumatra di Kabupaten Muara Enim



Gambar 41. Dokumentasi Belida Jawa di Kabupaten Muara Enim

6. Terubuk

Pendataan ikan terubuk dilaksanakan di dua provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Riau selama sepanjang tahun pada Januari hingga Desember pada fase bulan gelap (28, 29, 30, dan 1) dan bulan terang (13, 14, 15, dan 16) penanggalan hijriah dengan dibantu oleh tenaga enumerator. Pendataan terubuk jenis *Tenualosa ilisha* dilaksanakan di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sementara pendataan terubuk *Tenualosa macrura* dilaksanakan di Bengkalis dan Siak, Provinsi Riau. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan *Length Based-Spawning Potential Ratio* (LB-SPR) yang dapat menggambarkan status eksploitasi stok perikanan, yang secara umum dapat mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh NOAA Fisheries dalam Badaruddin (2013) sebagai berikut.

SPR	< 30%	30 – 50%	> 50%
Status Eksploitasi	MERAH	KUNING	HIJAU
	Over-exploited	Fully-exploited	Under-exploited

Gambar 42. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR

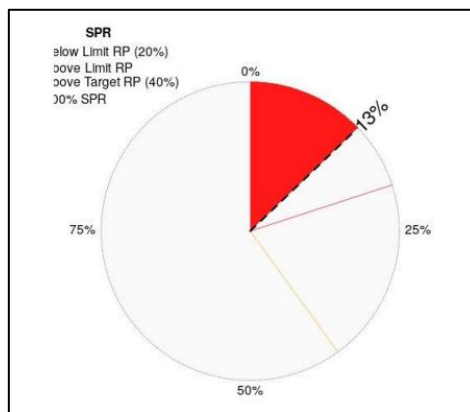
a. Pendataan *Tenualosa ilisha* di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara

Berdasarkan pendataan *Tenualosa ilisha* di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2023, total data yang diolah adalah sebanyak 8833 data, dengan panjang minimum 20 cm dan panjang maksimum 46 cm. Data panjang total yang paling dominan ada di selang kelas panjang total 29-31 cm, yang masuk dalam *cohort* pertumbuhan cepat. Sementara itu, Perhitungan LB-SPR perikanan terubuk di Labuhan Batu diestimasi sebesar 13% dan laju eksploitasi 0,56 yang dapat diduga bahwa status eksploitasi

ikan terubuk dalam kondisi mengarah ke *over-exploited*, yang berarti bahwa diduga terjadi penangkapan ikan secara berlebihan melebihi kemampuan populasi ikan untuk meningkatkan kembali jumlahnya sehingga menyebabkan stok ikan berkurang. Namun demikian, hasil ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan hasil LB-SPR 9%.



Gambar 43. Dokumentasi Pendataan Terubuk di Labuhan Batu



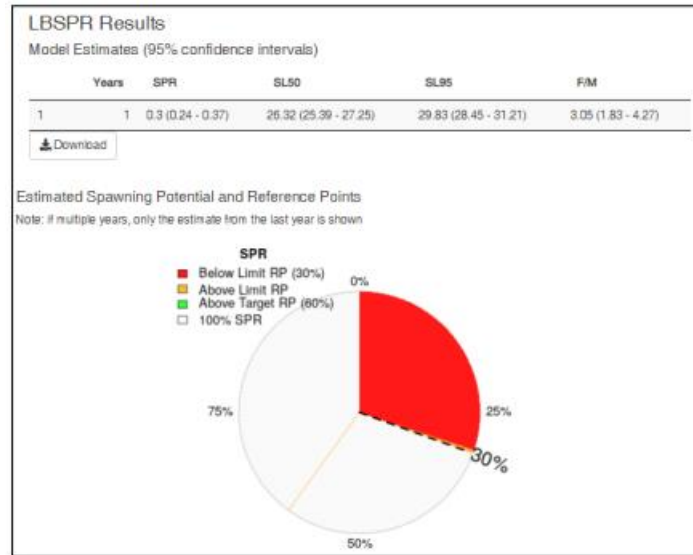
Gambar 44. Nilai SPR Terubuk Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2023

b. Pendataan *Tenualosa macrura* di Provinsi Riau

Berdasarkan pendataan *Tenualosa macrura* di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperoleh status populasi ikan terubuk dalam kondisi overfishing, dengan nilai laju eksploitasi di atas optimum, yaitu 0,7. Sementara itu, nilai SPR menunjukkan 30% yang menunjukkan fully-exploited, sedikit di atas status overfishing. Untuk mencapai pemanfaatan yang lestari, maka harus dilakukan pengurangan upaya penangkapan sebesar minimal 15% atau setara dengan 16 hari larangan. Untuk memperkuat upaya pengelolaan ikan terubuk, Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah melakukan Penyusunan Rancangan Kepmen Terubuk Bengkalis (*Tenualosa macrura*), yaitu perubahan bulan larangan tangkap dari bulan masehi ke bulan hijriyah dan memperluas area perlindungan ikan terubuk.



Gambar 45. Dokumentasi Pendataan Terubuk di Provinsi Riau



Gambar 46. Nilai SPR Terubuk Provinsi Riau Tahun 2023

7. Ikan Bilih

Pendataan ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) berfokus di Danau Singkarak yang berlokasi di Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Sepanjang tahun 2023, telah dilaksanakan survei potensi dan supervisi enumerator pendataan ikan bilih. Pendataan ikan bilih dilakukan sepanjang tahun 2023 dengan pendataan oleh enumerator dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Desember 2023 yang dilakukan di 3 lokasi dan disesuaikan disesuaikan dengan jenis alat tangkap yang ada pada lokasi masing-masing, antara lain: Nagari Sumpur, menggunakan alat tangkap jala, Nagari Muaro Pingai menggunakan alat tangkap bagan apung dan Nagari Singkarak menggunakan alat tangkap jaring insang. Pendataan dilaksanakan dari Maret hingga Desember 2023 selama 80 hari pendataan.



Gambar 47. Dokumentasi Supervisi Pendataan Ikan Bilih di Danau Singkarak

Berdasarkan hasil pendataan, Ukuran rata-rata ikan bilih yang tertangkap memiliki panjang 7,79 cm dengan rentang ukuran antara 5,3 cm – 12 cm. Adapun berat rata-rata ikan yang tertangkap adalah 4,46 gram dengan rentang berat antara 1 – 12 gram. Distribusi ukuran Panjang ikan bilih jantan yang ditemui memiliki panjang rata-rata 7,14 cm dengan rentang antara 5,3 – 12 cm, sedangkan ukuran paling banyak ditemukan pada ukuran 7-8,9 cm yaitu sebanyak 47,2 %. Ikan bilih betina memiliki panjang rata-rata 8,31 cm dengan rentang ukuran 5,5 – 12 cm. Adapun ukuran paling banyak ditemukan adalah ukuran 7-8,9 cm yaitu sebanyak 58,8%. Distribusi ukuran berdasarkan berat, Ikan bilih jantan yang ditemui memiliki berat rata-rata 3,58 gram dengan rentang antara 1,5-8 gram, sedangkan ukuran paling banyak ditemukan pada ukuran 1-3,9 gram yaitu sebanyak 72 %. Ikan bilih betina memiliki berat rata-rata 5,17 gram dengan rentang ukuran 1,8 – 12 gram. Adapun ukuran paling banyak ditemukan adalah ukuran 4-6,9 gram yaitu sebanyak 51,6%.

Ditinjau dari penggunaan alat tangkap, Alat tangkap bagan menghasilkan rata-rata jumlah ikan yang lebih banyak dibandingkan dengan alat tangkap jaring dan jala dalam satu kali usaha penangkapan, yaitu 5,40 kg dibandingkan dengan jaring sejumlah 3,56 kg dan jala 2,95 kg. Jumlah rata-rata tangkapan dengan menggunakan alat tangkap bagan paling tinggi didapatkan pada bulan Juni, sedangkan paling rendah pada bulan September. Untuk alat tangkap jala rata-rata tangkapan paling tinggi terjadi di bulan April, sedangkan paling rendah pada bulan Desember.



Gambar 48. Ikan Bilih (*Mystacoleucus padangensis*)

8. Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi

Berikut adalah rekapitulasi penanganan jenis ikan dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang sepanjang tahun 2023.



Spesies	Jumlah	Lokasi
Duyung (<i>Dugong dugon</i>)	3 ekor	Lingga, Kep. Riau; Aceh Jaya, Aceh; Padang, Sumatera Barat
Pesut (<i>Orcaella brevirostris</i>)	1 ekor	Bintan, Kep. Riau
Lumba Lumba Fraser (<i>Lagenodelphis hosei</i>)	3 ekor	Padang, Sumatera Barat
Paus Pemburu Palsu (<i>Pseudorca crassidens</i>)	3 ekor	Padang, Sumatera Barat
Lumba Lumba (tidak teridentifikasi)	2 ekor	Bengkalis, Riau; Simeuleu, Aceh
Paus Balen (<i>Balaenoptera musculus</i>)	1 ekor	Aceh Barat Daya, Aceh
Paus Bungkuk (<i>Megaptera novaeangliae</i>)	1 ekor	Padang, Sumatera Barat
Paus Sperma (<i>Physeter macrocephalus</i>)	1 ekor	Tapanuli Tengah, Sumatera Utara
Paus (tidak teridentifikasi)	1 ekor	Mentawai, Sumatera Barat
Hiu Paus (<i>Rhincodon typus</i>)	4 ekor	Bireun, Aceh; Pesisir Selatan, Sumatera Barat (3 ekor)
Penyu Belimbing (<i>Dermochelys coriacea</i>)	1 ekor	Mentawai, Sumatera Barat
Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1 ekor	Pesisir Selatan, Sumatera Barat
Penyu Sisik (<i>Eretmochelys imbricata</i>)	1 ekor	Pasaman Barat, Sumatera Barat
Penyu Lekang (<i>Lepidochelys olivacea</i>)	1 ekor	Padang, Sumatera Barat

Gambar 49. Rekapitulasi Biota Laut Dilindungi Terdampar Sepanjang 2023



Gambar 50. Dokumentasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar

Untuk menunjang kegiatan penanganan jenis ikan terdampar, tim BPSPL Padang juga melakukan sosialisasi dan inisiasi pembentukan tim respon cepat kejadian biota laut dilindungi/terancam punah yang terdampar di pesisir Sumatra Barat, yaitu di Kabupaten Pesisir Selatan dan Pasaman Barat. Dua kabupaten tersebut dipilih berdasarkan rekam kejadian keterdamparan biota serta aksesibilitas lokasi yang relatif jauh dari pusat kota Padang. Adapun waktu pelaksanaan sosialisasi dan inisiasi pembentukan tim respon cepat penanganan biota laut dilindungi dilaksanakan pada 04 – 06 April 2023 di Pesisir Selatan dan 14 – 16 Agustus 2023 di Pasaman Barat.



Gambar 51. Dokumentasi Sosialisasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar di Kabupaten Pesisir Selatan



Gambar 52. Dokumentasi Sosialisasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar di Kabupaten Pasaman Barat

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 4 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 22. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 4

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	535.000.000,00	524.680.389,00	98,1
2	[2362.REB.001.052] Rehabilitasi Populasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	50.000.000,00	48.548.490,00	97,1
3	[2362.REB.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah	65.000.000,00	63.984.270,00	98,4
Total		650.000.000,00	637.213.149,00	98

Realisasi anggaran rincian output [2362.REB.001] secara keseluruhan adalah 98%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan penyediaan data jenis sidat, terubuk, penyu, terumbu karang, teripang, belida, ikan bilih serta penanganan biota dilindungi terdampar.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun selanjutnya, tim BPSPL Padang akan melanjutkan kegiatan pendataan jenis lainnya sesuai target yang diamanatkan, serta senantiasa *stand-by* untuk menangani kejadian jenis ikan dilindungi yang terdampar.

IKU. 5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang dimaksud pada IKU ini adalah jenis yang dilakukan upaya fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendix CITES, dan/atau *look alike species* dan survei potensi pemanfaatan. Adapun tata cara pemanfaatan jenis ikan mengacu pada Permen KP Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang terancam dalam appendix CITES. Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah Hiu Appendiks, Pari Appendiks, Kuda Laut, Napoleon, dan Sidat di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKU 5 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5

IKU. 5 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Renstra			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
6	5	8	120	33,33	7	114,29	7	114,29

Pada tahun 2023, capaian pengelolaan jenis ikan yang dimanfaatkan terealisasi sejumlah 8 jenis (persentase capaian 120%) sebagaimana rincian berikut:

1. **Hiu**, melalui pendataan pendaratan di PPS Lampulo, PPP Labuhan Haji, PPN Sibolga, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis, serta pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan;

2. **Pari**, melalui pendataan pendaratan di PPS Lampulo, PPP Labuhan Haji, PPN Sibolga, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis, serta pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan;
3. **Kuda Laut**, melalui pendataan di Kabupaten Bintan dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan;
4. **Napoleon**, melalui pendataan di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan;
5. **Sidat**, melalui identifikasi potensi pemanfaatan di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Agam, serta pendataan di Kabupaten Agam;
6. **Teripang**, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan;
7. **Arwana**, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan; dan
8. **Belida**, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/folders/1XN4iLLd6duXpZ4IhnWJwgZo6YXxs1W1?usp=sharing>.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian pengelolaan jenis ikan yang dimanfaatkan terealisasi 6 jenis meliputi hiu, pari, kuda laut, napoleon, teripang, dan arwana. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini, terdapat kenaikan capaian sebesar 33,33%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, pada tahun 2023 dan 2024 IKU 5 memiliki target 7 jenis. Ditinjau dari target Renstra 2023 dan 2024, persentase capaian IKU ini mencapai 114,29.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Tabel di bawah menyajikan cuplikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 yang berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang tahun 2023.

Tabel 24. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 5 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	Pusat

Perjanjian Kinerja BPSPL Padang tahun 2023, khususnya IKU 5, telah mengakomodir 5 (lima) jenis dari target 18 (delapan belas) jenis dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2023.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Upaya pencapaian IKU 5 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam pendataan hiu, pari, dan kuda laut, tim BPSPL Padang dibantu oleh enumerator sehingga diperoleh pendataan *time series*. Dalam hal ini, rekrutmen dan supervisi terhadap enumerator dapat menunjang keberhasilan kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. BPSPL Padang juga telah melaksanakan pendataan napoleon di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, dalam lingkup pelayanan, koordinasi dan verifikasi jarak jauh juga dapat mendukung keberlanjutan kegiatan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU 5 telah didukung oleh hal berikut:

1. Merekrut tenaga enumerator yang kompeten dan mudah diarahkan melalui koordinasi jarak jauh;
2. Melakukan koordinasi aktif dengan pelaku usaha melalui internet/telepon.

Untuk mencapai IKU 5, BPSPL Padang didukung dengan alokasi anggaran sejumlah Rp959.558.000,00 yang bersumber dari rupiah murni senilai Rp718.000.000,00 dan bersumber dari PNBPNP senilai Rp241.558.000,00. Semula anggaran pendukung IKU ini terdampak blokir namun blokir tersebut telah ditarik. Hingga akhir tahun, melaporkan realisasi anggaran tersebut senilai Rp947.493.293,00 (98,7%). Di lingkup kegiatan pendataan, terdapat efisiensi dengan adanya perekrutan enumerator untuk melakukan pendataan secara *time series* yang dalam prosesnya senantiasa disupervisi oleh tim BPSPL Padang. Dalam hal ini, perekrutan enumerator membutuhkan anggaran yang lebih sedikit dibandingkan jika pendataan dilakukan oleh tim BPSPL Padang. Adapun honor enumerator di lingkup BPSPL Padang adalah Rp80.000,00/hari. Jika pendataan dilakukan 25 hari per bulannya, maka alokasi anggaran untuk enumerator adalah sekitar Rp2.000.000,00. Selain itu, kegiatan pelayanan perizinan juga sudah sepenuhnya dilaksanakan berbasis aplikasi e-SAJI yang dapat meningkatkan efisiensi penerbitan surat-surat perizinannya.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan//kegagalan pencapaian 5 dapat ditunjang oleh kegiatan supervisi yang perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada tenaga enumerator. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kualitas data yang dikumpulkan tetap terjaga.

a. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kegiatan pelayanan perizinan jenis ikan yang dimanfaatkan dilaksanakan di tujuh provinsi wilayah kerja BPSPL Padang, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sepanjang tahun 2023, BPSPL Padang telah melayani peredaran jenis hiu, pari, teripang, sidat, arwana, napoleon, dan belida melalui penerbitan 404 Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN), 6 SAJI DN penelitian, dan 609 Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Berikut adalah rekapitulasi pelayanan berdasarkan dari penerbitan SAJI dan rekomendasi.

Tabel 25. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Tahun 2023

Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen yang Terbit
Rekomendasi Dalam Negeri dan Luar Negeri	609
SAJI Dalam Negeri	404
SAJI Dalam Negeri Penelitian	6
Total	1019

Untuk menunjang pelayanan prima di lingkup BPSPL Padang, pada tanggal 2 Februari 2023 BPSPL Padang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Registration No.: QAIC/ID/11112-A dengan ruang lingkup pelayanan administrasi dalam lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES (Lampiran 2). Dalam hal ini, produk layanan BPSPL Padang berupa SAJI Dalam Negeri dan Rekomendasi juga telah terdaftar dalam sertifikasi ini.

b. Pendataan Potensi Jenis yang Dimanfaatkan

- Hiu Appendiks dan Pari Appendiks

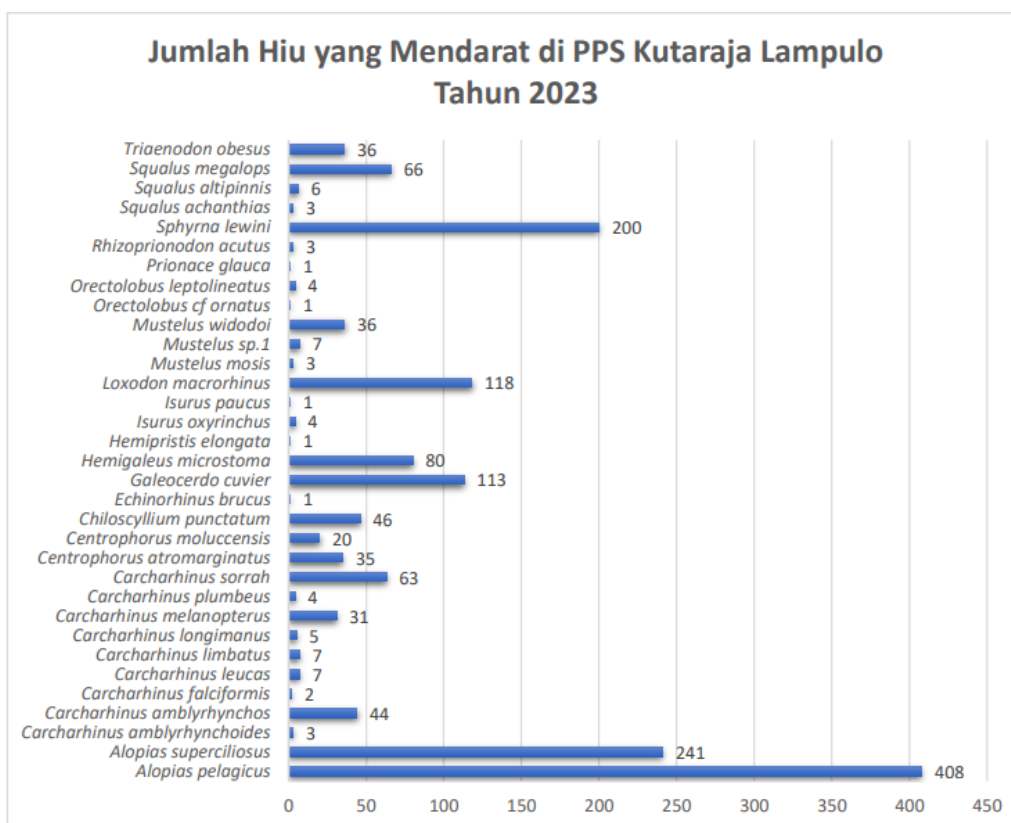
Pada awal tahun, pendataan pendaratan hiu dan pari dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo dan PPP Labuhan Haji di Provinsi Aceh, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga di Provinsi Sumatera Utara. Pendataan dilaksanakan dengan

dibantu oleh tenaga enumerator selama 12 bulan dengan jumlah hari 25 hari/bulan. Pada September 2023, terdapat tambahan dana PNBP untuk pendataan hiu dan pari di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pendataan di Provinsi Riau juga dibantu oleh tenaga enumerator dengan lama pendataan 100 hari dalam rentang waktu 4 bulan dari Bulan September - Bulan Desember 2023.

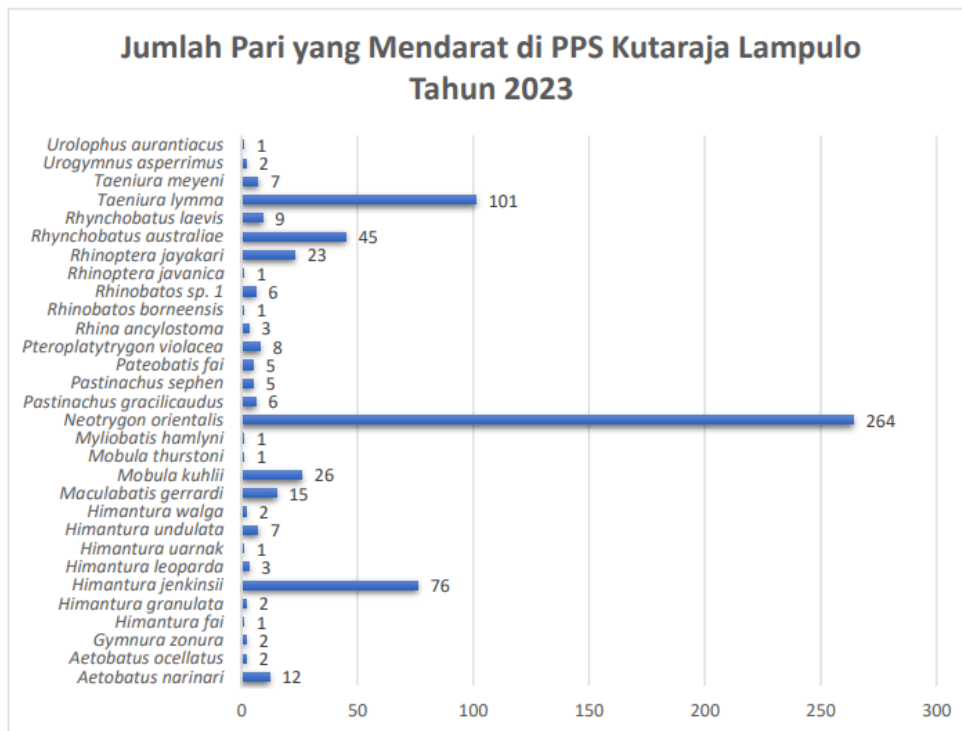
Hasil pendataan di PPS Lampulo, Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa terdapat 1.600 individu hiu yang mendarat di PPS Lampulo, yang mana terdiri dari 33 spesies dari 11 famili, sementara untuk jenis pari terdapat 638 individu yang terdiri dari 30 spesies dari 7 famili. Total semua individu adalah 2.238 ekor ikan hiu dan pari. Sementara itu, jenis kelamin ikan hiu dan pari didominasi oleh betina sejumlah 73% dan sisanya adalah jantan, sedangkan berdasarkan tingkat kedewasaan didominasi oleh ikan hiu pari dewasa sejumlah 75%, remaja 14% dan anakan 11%. Rata-rata harga ikan hiu pari di PPS Kutaraja Lampulo adalah harga untuk produk non-sirip. Pada jenis hiu, jenis dengan harga tertinggi adalah jenis *C. leucas* dan *C. limbatus* sedangkan jenis pari dengan harga tertinggi adalah *N. orientalis* dan *Rhyncobatus* spp.



Gambar 53. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo



Gambar 54. Jumlah Hiu yang Mendarat di PPS Kutaraja Lampulo Tahun 2023



Gambar 55. Jumlah Pari yang Mendarat di PPS Kutaraja Lampulo Tahun 2023

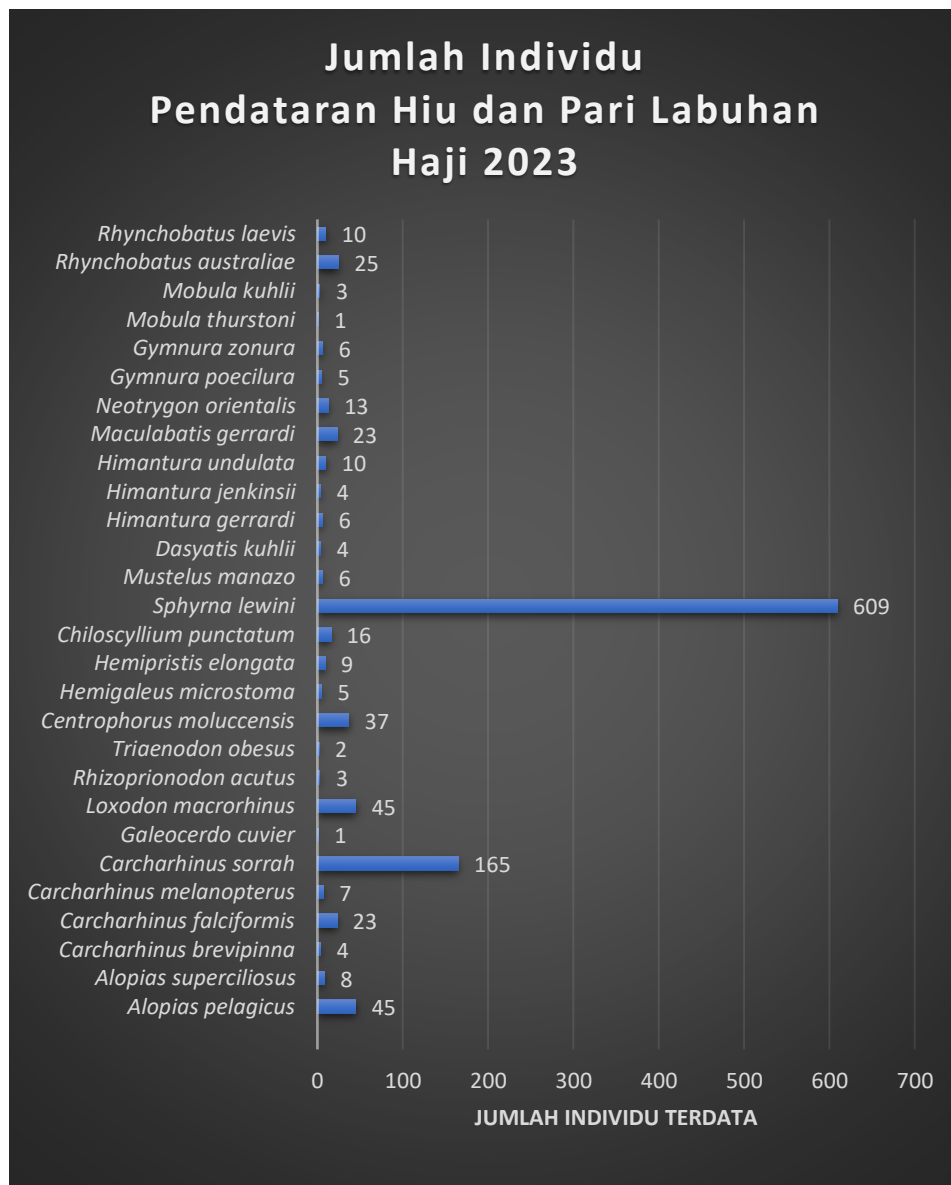


Gambar 56. Dokumentasi Hiu dan Pari yang Mendarat di PPS Lampulo

Lebih lanjut, hasil pendataan pendaratan jenis ikan hiu dan pari di PPP Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 menunjukkan terdapat total 1095 individu. Individu tersebut terdiri dari 28 spesies hiu dan pari dari 11 famili. Jenis hiu dengan spesies terbanyak yang didaratkan adalah *Sphyrna lewini* dengan 609 Individu, sementara untuk jenis pari dengan spesies terbanyak yang didaratkan yaitu *Rhynchobatus australiae* dengan 25 Individu. Berdasarkan data perbandingan jenis kelamin, dari total 1095 individu hiu dan pari betina mendominasi dengan persentase 92% dibandingkan jenis kelamin hiu dan pari jantan dengan persentase berjumlah 8%. Sementara itu, untuk perbandingan tingkat kedewasaan, betina remaja paling banyak ditemukan dengan 629 Individu dibandingkan dengan kategori lainnya.



Gambar 57. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPP Labuhan Haji



Gambar 58. Hasil Pendataan Pendaratan Hiu dan Pari Labuhan Haji Tahun 2023



Gambar 59. Dokumentasi Hiu dan Pari yang Mendarat di PPP Labuhan Haji

Di Provinsi Sumatra Utara, pendataan dilakukan di Kota Sibolga. Berdasarkan hasil pendataan di Kota Sibolga tahun 2023 terdapat total tangkapan untuk jenis hiu yang berjumlah 12.837 ekor dan pari sejumlah 5373 ekor. Jenis hiu yang paling banyak tertangkap yaitu *Carcharhinus sorrah* dengan total tangkapan 1467 ekor. Sementara itu, untuk jenis pari *Neotrygon orientalis* menjadi yang paling tinggi jumlah tangkapannya dengan total 1462 ekor. Ditinjau dari usia, 75,52% dari hasil tangkapan hiu masuk kategori anakan disusul 15,96% usia remaja dan hanya 8,52% dari total keseluruhan yang masuk kategori dewasa. Hal tersebut juga sejalan dengan tangkapan pari yang mana 70,53% dari hasil tangkapan hiu masuk kategori anakan disusul 16,61% usia remaja dan hanya 7,05% dari total keseluruhan yang masuk kategori dewasa. Hal ini mengindikasikan eksploitasi ikan hiu dan pari didominasi oleh rentang ukuran yang belum cukup dewasa untuk ditangkap. Sementara itu, ditinjau dari jenis kelamin, jenis kelamin yang lebih mendominasi yaitu jantan baik hiu maupun pari. Ditinjau dari harga jual, harga jual ikan pari secara rata-rata lebih mahal daripada rata-rata hiu yang tertangkap di Sibolga.

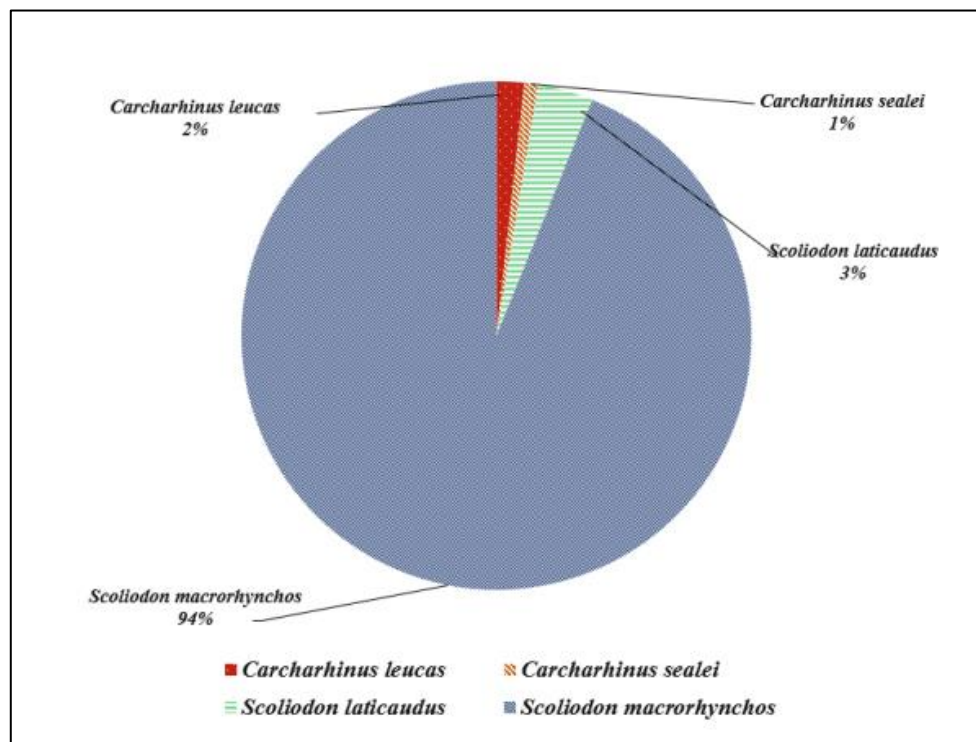


Gambar 60. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga

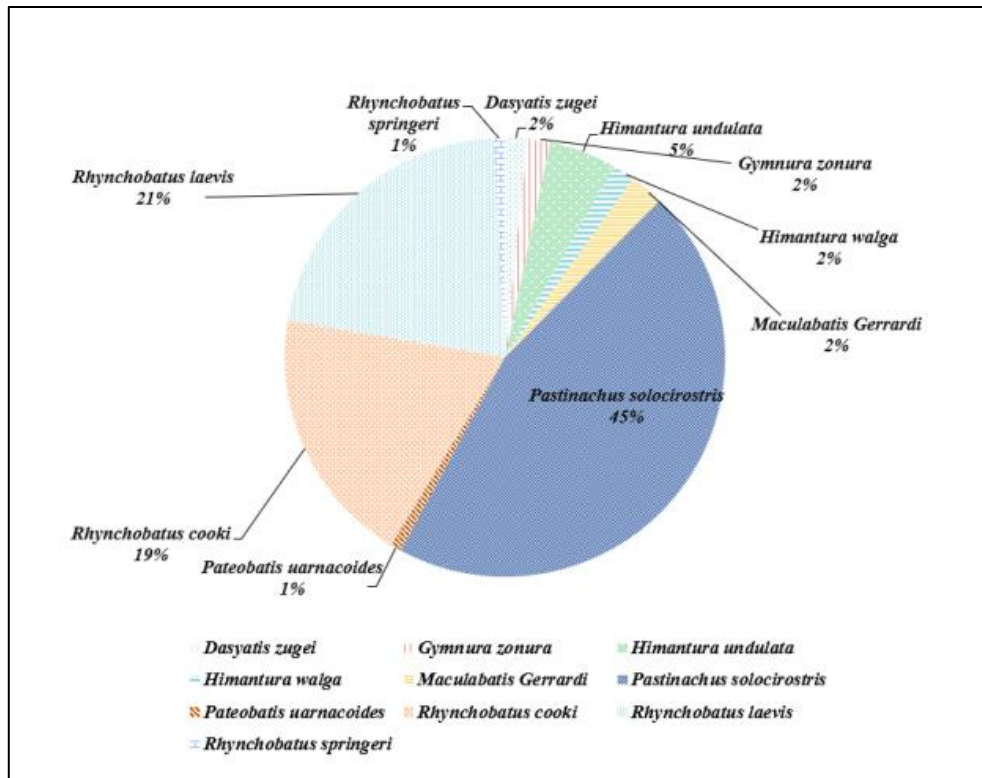
Selanjutnya, pendataan di Kabupaten Kepulauan Meranti dari September – November terdapat sebanyak empat spesies hiu dari satu famili Carcharidae dan sepuluh spesies pari dari tiga famili, yaitu famili Gymnuridae, Dasyatidae, dan Rhinidae. Hasil pendataan hiu didominasi oleh spesies *Scoliodon macrorhynchos*, sedangkan untuk pari didominasi oleh spesies *Pastinachus solocirostris*. Ditinjau dari jenis kelamin, terdapat sebanyak 94 ekor jantan dan 20 ekor betina individu hiu dan sebanyak 42 ekor jantan dan 79 ekor betina individu pari.



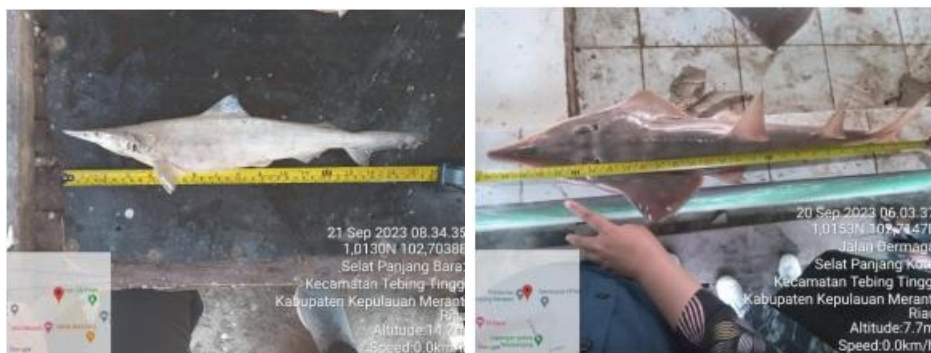
Gambar 61. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti



Gambar 62. Keragaman Hiu di Kabupaten Kepulauan Meranti



Gambar 63. Keragaman Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti

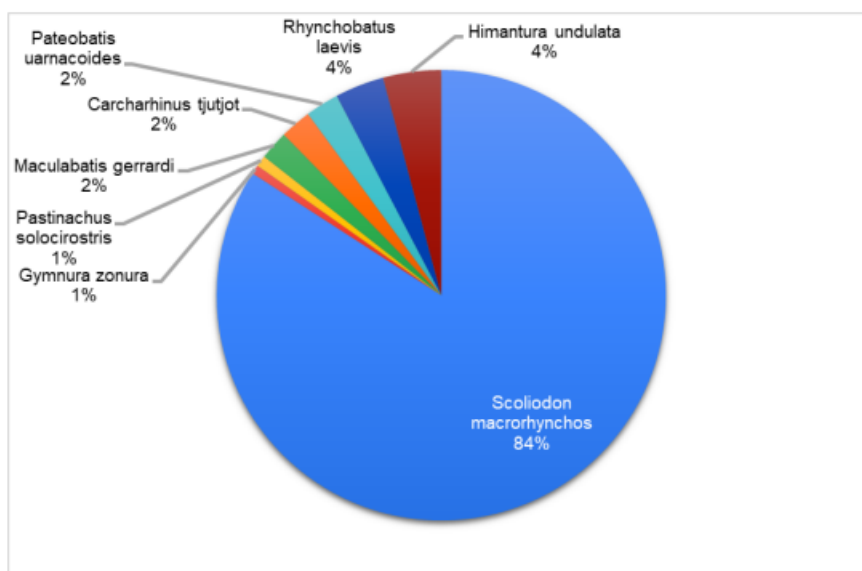


Gambar 64. Dokumentasi Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti

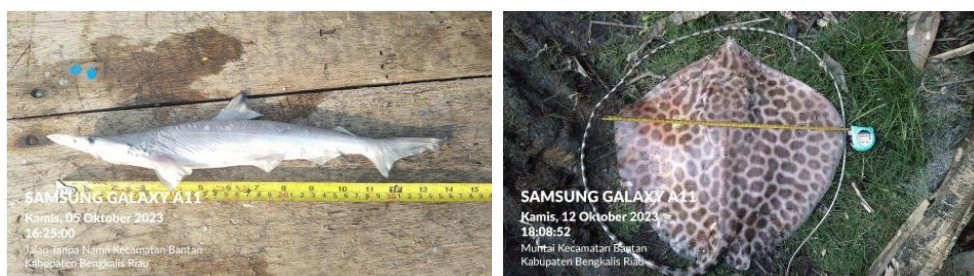
Sementara itu, di Kabupaten Bengkalis hiu yang didaratkan terdiri atas satu famili yaitu Carcharhinidae dan dua species (*Scoliodon macrorhynchos* dan *Carcharhinus tjtjtjt*), yang mana keduanya termasuk dalam appendiks II CITES. Sementara itu, jenis pari yang didaratkan terdiri atas tiga famili (Gymnuridae, Dasyatiidae dan Rhinidae) dan enam spesies (*Gymnura zonura*, *Pastinachus solocirostris*, *Maculabatis gerrardi*, *Pateobatis uarnacoides*, *Rhynchobatus laevis* dan *Himantura undulata*). Hanya terdapat satu species pari yang masuk ke dalam appendiks CITES yaitu *Rhynchobatus australiae*. Berdasarkan hasil pendataan hiu dan pari di Kabupaten Bengkalis, jenis yang mendominasi adalah jenis hiu *Scoliodon macrorhynchos* yang mana hasil tangkapannya didominasi oleh jenis kelamin betina dengan rasio 68%:32%. *Scoliodon macrorhynchos* yang tertangkap pun lebih banyak ukuran yang belum matang gonad, baik pada individu jantan maupun betina.



Gambar 65. Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis



Gambar 66. Keragaman Hiu dan Pari yang Didaratkan di Kabupaten Bengkalis



Gambar 67. Dokumentasi Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis

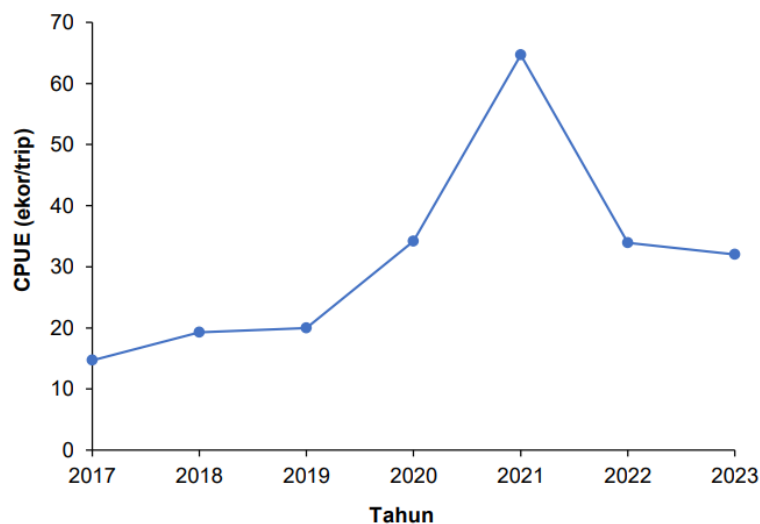
- **Kuda Laut**

Pendataan kuda laut di Desa Sebung Perih, Bintan menggunakan pendataan hasil tangkapan kuda laut nelayan yang dikumpulkan oleh enumerator selama musim tangkap kuda laut, yaitu bulan Januari sampai Mei. Data tersebut kemudian dianalisis untuk diperoleh nilai *Catch per Unit Effort* (CPUE).



Gambar 68. Dokumentasi Pendataan Kuda Laut di Bintang

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh upaya penangkapan (CPUE) perikanan kuda laut di perairan Desa Sebung Perih, Kabupaten Bintan adalah 32 ekor/trip. Hasil tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2017-2023, nilai CPUE kuda laut cenderung fluktuatif. Sementara itu, distribusi panjang kuda laut yang tertangkap di perairan Desa Sebung Perih dominan pada rentang panjang 13,5 – 14,9 cm. Sementara itu, di perairan Kelurahan Kasu, Kota Batam, distribusi panjang kuda laut yang tertangkap memiliki rentang 15 – 16,4 cm dengan kepadatan berkisar pada 22,52 – 89,29 ekor/ha.

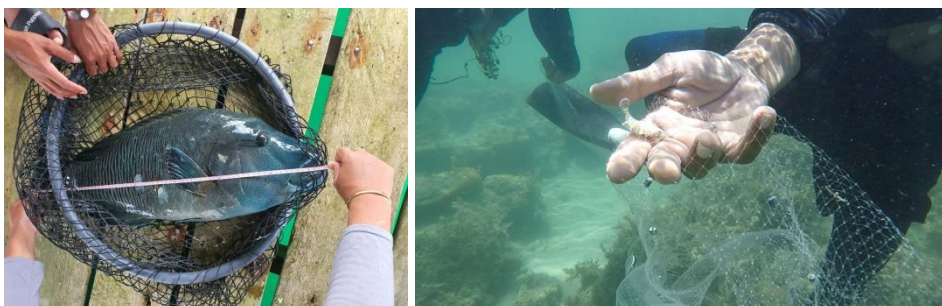


Gambar 69. CPUE Kuda Laut di Perairan Sebung Perih Tahun 2017-2023

- Napoleon

- a. Pendataan napoleon di Kabupaten Natuna dilaksanakan pada tanggal 13-18 Februari 2023 di Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat. Adapun metode pengumpulan data yang diterapkan adalah observasi, penelusuran pustaka, dan wawancara. Berdasarkan pendataan, terdapat jumlah pelaku usaha pemanfaatan napoleon terdiri dari 47 pelaku usaha pada tahun 2023. Jumlah ikan napoleon hasil pembesaran (*ranching*) adalah sebanyak 22,780 ekor dan terdapat penurunan sebanyak 6.931 ekor jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun komposisi tertinggi berdasarkan rentang usia adalah usia 4-5 tahun dengan jumlah 10.251 ekor. Kegiatan pemanfaatan napoleon merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi nelayan kecil penangkap dan pembesaran karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan prediksi total harga ikan dalam keramba mencapai Rp19.006.350.000,00 (Sembilan belas miliar enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terjadinya tren penurunan jumlah ikan berdasarkan usia pada tahun 2016 dan 2021-2023 disebabkan oleh tingkat *survival rate* ikan napoleon yang rendah, stress pada ikan, serangan predator ikan buntal yang menyelip ke dalam keramba, adanya predator berupa

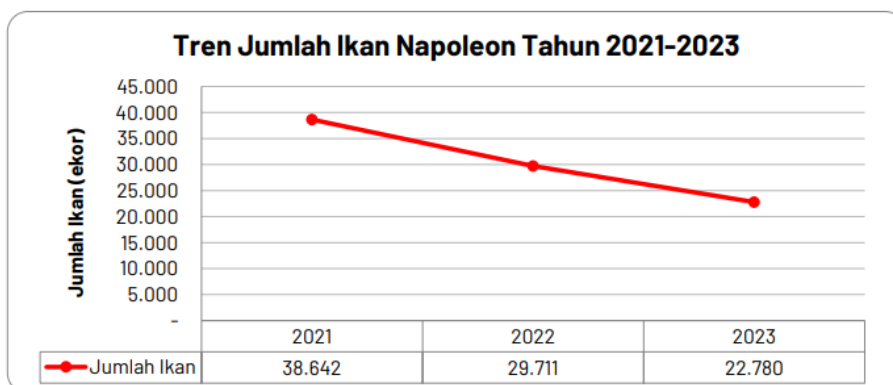
hama lintah laut yang berasal dari aktivitas budidaya ikan di perairan Penagi Natuna, faktor cuaca yang tidak menentu, pemanfaatan ikan napoleon sebagai bahan baku jamuan tamu, dan adanya lalu lintas ilegal benih napoleon.



Gambar 70. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Kabupaten Natuna

Tabel 26. Rincian Pendataan Napoleon Berdasarkan Usia di Kabupaten Natuna

Usia	Jumlah Ikan (ekor)	Persentase (%)
< 1 tahun	732	3,21
1-1,5 tahun	3.475	15,25
2-2,5 tahun	3.978	17,46
3-2,5 tahun	4.344	19,07
4-5 tahun	10.251	45
Total	22.780	100



Gambar 71. Tren Jumlah Ikan Napoleon Tahun 2021-2023 di Kelurahan Sedanau

- b. Pendataan napoleon di Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan pada 15-19 Oktober 2023 di Kecamatan Siantan Tengah dan Kecamatan Siantan Timur. Tim survei dibantu oleh koordinator lapangan dari Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengumpulkan data jumlah ikan napoleon dari masing-masing karamba yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun rangkaian kegiatan selama pendataan adalah wawancara dengan pemanfaat ikan napoleon, survei alam bibit ikan napoleon, dan pelepasan ikan napoleon. Berdasarkan pendataan, terdapat jumlah pelaku usaha atau nelayan yang melakukan pemanfaatan napoleon sebanyak 109 pelaku usaha yang tersebar di enam kecamatan. Jumlah total ikan napoleon yang berada di dalam keramba sebanyak 37.239 ekor dengan jumlah terbanyak pada kategori berat 0,1-1 kg dengan jumlah 27.778 ekor. Sementara itu, alur pemanfaatan ikan napoleon di Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan rantai pasok perikanan terdiri dari nelayan yang melakukan pencarian anakan ikan ukuran <100 gram yang langsung dijual ataupun dibesarkan selama 1-2 tahun untuk kemudian dijual kepada nelayan yang membesarkan anakan hingga ukuran >1 kg dan pada akhirnya bermuara ke penampung besar/eksportir. Saat melakukan survey di alam, tidak ditemukan ikan napoleon yang

masuk ke jangkauan area jelajah. Namun, di lokasi survey ditemukan ikan napoleon yang tertangkap langsung oleh nelayan dengan jumlah 9 ekor. Hal ini menjadi salah satu masukan dalam melakukan survey agar menggunakan tenaga nelayan lokal dengan membekali nelayan tersebut menggunakan GPS.



Gambar 72. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Kabupaten Kepulauan Anambas

Tabel 27. Rincian Pendataan Napoleon Berdasarkan Usia di Kabupaten Kepulauan Anambas

Ukuran	Jumlah Ikan (ekor)
<100 gram	8.775
0,1-1 kg	27.778
1-3 kg	655
3 kg	30

- **Sidat**

a) **Identifikasi Potensi Pemanfaatan Sidat Stadia Dewasa di Kabupaten Aceh Tamiang**

Pada 12-16 September 2023, BPSPL Padang Gerai Pelayanan Aceh melaksanakan identifikasi potensi pemanfaatan sidat stadia dewasa di Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi adanya pelaku usaha pemilik Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Sidat di Kabupaten Aceh Tamiang sejak awal Tahun 2023. Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh informasi terdapat empat kecamatan pesisir di Kabupaten Aceh Tamiang dengan tujuh pengepul utama yang biasa melakukan pemanfaatan jenis ikan. Seluruh pengepul ini diwawancara agar mendapatkan informasi yang kredibel sehingga dapat menggambarkan kondisi yang objektif terkait pemanfaatan ikan sidat dewasa di Kabupaten Aceh Tamiang. Berdasarkan hasil identifikasi, Di Kabupaten Aceh Tamiang yang sungainya masuk sistem DAS Tamiang dapat ditemui ikan sidat dengan jenis *Anguilla bicolor* dan *Anguilla marmorata* dengan jumlah yang masih cukup banyak. Selain itu, penangkapan ikan sidat di Aceh Tamiang belum intensif dengan kebanyakan nelayan menangkap ikan sidat secara *bycatch* atau tidak disengaja.



Gambar 73. Dokumentasi Kegiatan Identifikasi Potensi Pemanfaatan Sidat Stadia Dewasa di Kabupaten Aceh Tamiang

b) Identifikasi dan Supervisi Pendataan Pemanfaatan Jenis Sidat di Kabupaten Agam

Kegiatan dilaksanakan pada 6-8 November 2023, diawali dengan proses identifikasi lokasi pemanfaatan sidat dewasa di Kabupaten Agam. Berdasarkan informasi yang diterima, terdapat 3 titik lokasi pemanfaatan sidat di Kabupaten Agam yaitu Tiku, Lubuk Basung dan Maninjau. Adapun kegiatan pendataan sidat dewasa belum memiliki Petunjuk Teknis sehingga sebagai acuan pelaksanaan kegiatan untuk proses identifikasi merujuk pada Kepdirjen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks CITES pada jenis ikan sidat (*glass eel*). Sedangkan untuk pendataan pemanfaatan sidat dewasa merujuk pada form yang telah disusun tim BPSPL Padang dan dikomunikasikan dengan Haryono, peneliti dari BRIN serta surat permohonan arahan persetujuan form pendataan pemanfaatan sidat nomor B.1590/BPSPL.1/PRL.430/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang ditujukan kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Tim BPSPL Padang menelusuri lokasi potensi pemanfaatan sidat yaitu Tiku, Lubuk Basung, dan Maninjau untuk mengumpulkan data dan informasi seputar pemanfaatan sidat. Berdasarkan hasil identifikasi, lokasi pendataan sidat prioritas pada IKU pemanfaatan jenis ikan yaitu berlokasi di Kecamatan Tanjung Mutiara, Tiku dimana lokasi tersebut merupakan lokasi penangkapan sidat yang dilakukan oleh nelayan anggota pengepul sidat yang telah memiliki SIPJI.

Sidat jenis *Anguilla marmorata* yang terdata selama bulan November dan Desember yaitu 59 ekor dengan kondisi 54 ekor hidup dan 5 ekor mati. Sidat tersebut dikumpulkan oleh pengepul dan dijual ke Pasaman Barat dengan harga Rp90.000/kg. Sementara itu, pola pertumbuhan sidat jenis *Anguilla marmorata* adalah *allometrik negatif* yang berarti bahwa antara laju pertumbuhan Panjang dan berat tidak seimbang, yang mana laju penambahan panjang lebih cepat daripada penambahan berat.



Gambar 74. Dokumentasi Pendataan Pemanfaatan Sidat di Kabupaten Agam

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 5 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 28. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 5

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.002.051] Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	227.743.000,00	218.827.688,00	96,1
2	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	731.815.000,00	728.665.605,00	99,6
Total		959.558.000,00	947.493.293,00	98,7

Realisasi anggaran rincian output [2362.REB.002] adalah 98,7%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pendataan jenis (hiu, pari, kuda laut, napoleon) dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan berupa SAJI, SIPJI, dan rekomendasi. Rincian output ini sejumlah Rp959.558.000,00 yang bersumber dari rupiah murni senilai Rp718.000.000,00 dan bersumber dari PNBP senilai Rp241,558,000,00. Semula anggaran pendukung IKU ini terdampak blokir namun blokir tersebut telah ditarik

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun selanjutnya, BPSPL Padang akan melanjutkan kegiatan pendataan time-series dan pelayanan peredaran jenis ikan yang dimanfaatkan sesuai target dalam dokumen kinerja.

IKU. 6. Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Padang adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya.

$$PNBP_{BPSPL\ Padang} = Saji\ DN + Surat\ Rekomendasi\ DN + Surat\ Rekomendasi\ LN + Denda$$

$$Nilai\ PNBP\ 2022 = Pendapatan\ Jasa\ Kelautan\ dan\ Perikanan\ Lainnya\ 425629 + Pendapatan\ Perizinan\ Lainnya\ (425259)\ yang\ diperoleh\ dari\ Satuan\ Kerja\ BPSPL\ Padang$$

Dimana:

Saji DN = Pungutan atas dokumen Saji DN ¹⁾ + pungutan perdagangan + pungutan pengambilan ²⁾

Surat Rekomendasi = pungutan atas dokumen rekomendasi + pungutan perdagangan

Denda dikenakan atas pengangkutan jenis ikan yang melebihi volume pada dokumen angkut

keterangan:

1) untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) dikenakan tarif 25%

2) dikenakan untuk pengangkutan jenis ikan yang berasal pengambilan dari alam berdasarkan kuota yang dimiliki

Formulasi penghitungan pungutan:

Pungutan pengambilan = jumlah individu x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Pungutan perdagangan = volume x Tarif PNBP x harga patokan jenis ikan

Denda = Tarif PNBP x jumlah produk yang tidak sesuai dengan permohonan

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKU 6 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 29. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6

IKU. 6 Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Renstra			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022- 2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
851.612.839	524.347.000	958.877.695	120	12,6	-	-	-	-



Total perolehan PNBP BPSPL Padang tahun 2023 mencapai Rp958.877.695,00 atau 120% dari target tahunan yang ditetapkan. Perolehan PNBP tersebut bersumber dari pungutan dokumen Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), rekomendasi, pungutan perdagangan, dan pungutan pengambilan alam.

Data dukung:

<https://drive.google.com/file/d/10Q9QKzI4C-Htm8Web5X1I4upAxLqSL2a/view?usp=sharing>.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, perolehan PNBP BPSPL Padang mencapai Rp851.612.839,00. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun 2023, terdapat kenaikan capaian sebesar 12,6%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator kinerja Nilai PNBP BPSPL Padang tidak termuat dalam Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja utama Nilai PNBP tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Pencapaian IKU 6 didukung dengan penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pengelola PNBP. Aplikasi yang digunakan, yaitu e-SAJI dan SIMPONI, dapat mempermudah proses pemungutan PNBP dan mempersingkat waktu pelayanan. Namun, ada kalanya aplikasi-aplikasi tersebut mengalami gangguan. Menghadapi kemungkinan tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP BPSPL Padang tetap melakukan pencatatan manual dan melakukan komunikasi dengan Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

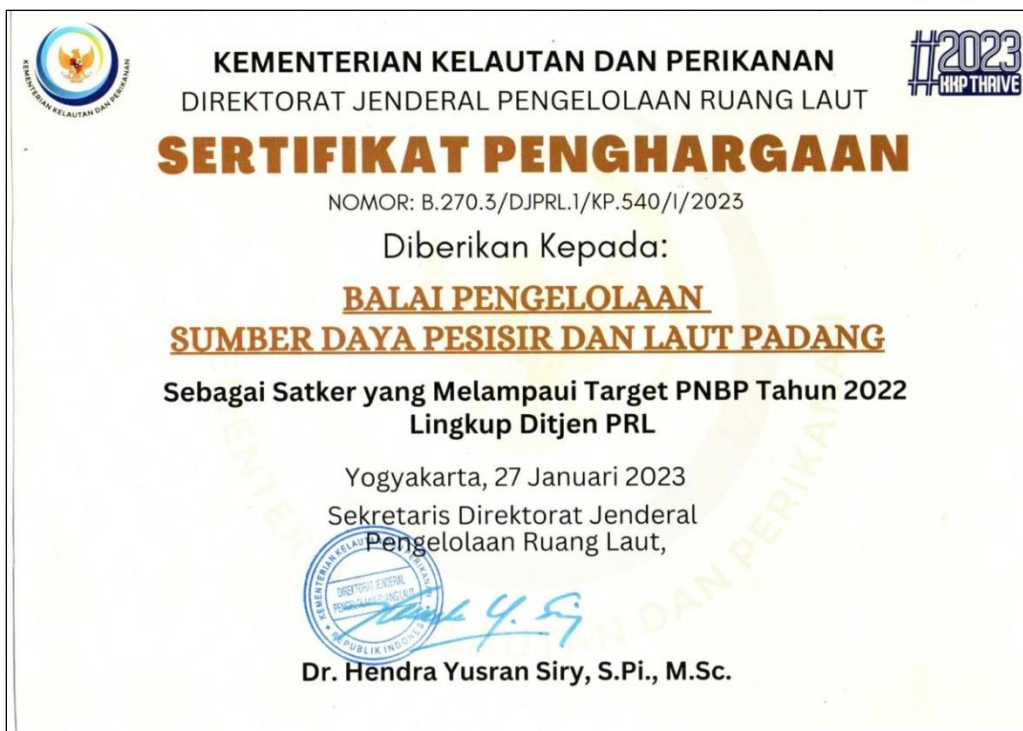
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU 6 telah didukung dengan penggunaan aplikasi e-SAJI dan SIMPONI. Adanya aplikasi tersebut dapat menunjang pelaksanaan layanan hingga pemungutan PNBP.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU 6 didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Pemberian Penghargaan Satuan Kerja yang Melampaui Target PNBP Tahun 2022

Pada Januari 2023, BPSPL Padang memperoleh penghargaan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai Satuan Kerja yang Melampaui Target PNBP Tahun 2022 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.



Gambar 75. Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja yang Melampaui Target PNB Tahun 2022

2. Perolehan PNB Tahun 2023

Pencapaian IKU 6 didukung dengan kegiatan pemungutan PNB dari pelayanan peredaran jenis yang dimanfaatkan. Sejauh ini, belum ditemukan indikasi kegagalan pencapaian IKU 6. Berikut adalah rincian pungutan PNB pada tahun 2023.

Tabel 30. Rekapitulasi Perolehan PNB Tahun 2023

Jenis Pungutan	Nilai PNB (Rp)
SAJI	77.895.000,00
Rekomendasi	188.055.000,00
Pungutan Perdagangan	537.958.235,00
Pungutan Pengambilan Alam	154.969.460,00
Total	958.877.695,00

3. Penggunaan Dana PNB di BPSPL Padang

Pada tahun 2023, terdapat penambahan pagu anggaran BPSPL Padang yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.239.428.000,00 yang mana merupakan hasil pembagian dari PNB Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang disetujui untuk digunakan tahun ini. Berikut adalah rincian pagu anggaran yang bersumber dari PNB beserta realisasinya.

Tabel 31. Penggunaan Dana PNB Tahun 2023 Lingkup BPSPL Padang

No	Mata anggaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	[2362.RAL.001.05] Penyediaan Sarana Pendukung Penyelenggaraan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Perairan	12.000.000,00	12.000.000,00	100
2	[2362.REB.002.051.E] Pendataan Pemanfaatan Hiu Pari di Prov. Riau	37.950.000,00	32.964.667,00	86,86
3	[2362.REB.002.051.F]	25.168.000,00	21.615.000,00	85,88

No	Mata anggaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
	Pendataan Sidat di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Barat			
4	[2362.REB.002.052.B] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	178.440.000,00	176.986.698,00	99,19
5	[2366.PBT.009.051.A] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	76.570.000,00	76.426.760,00	99,81
6	[2366.PBT.009.051.B] Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang di Aceh	69.750.000,00	69.048.565,00	98,99
7	[2366.PBT.009.052.D] Identifikasi dan Verifikasi Lapangan Pemanfaatan Ruang Laut	345.200.000,00	338.143.348,00	97,96
8	[2366.RAL.001.051.A] Sarana Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut	367.000.000,00	366.350.000,00	99,82
9	[2366.SCC.002.051.A] Pelatihan dan Sertifikasi Pemetaan Sistem Informasi Geospasial	95.250.000,00	89.634.638,00	94,10
10	[2366.SCC.002.051.B] Pelatihan dan Sertifikasi Aplikasi Teknologi GPS	32.100.000,00	31.738.816,00	98,87

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 6 didukung dengan kegiatan pelayanan peredaran jenis yang memiliki alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 32. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 6

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	731.815.000,00	728.665.605,00	99,6
Total		731.815.000,00	728.665.605,00	99,6

Realisasi anggaran komponen [2362.REB.002.052] adalah 99,6% yang digunakan untuk perjalanan pemeriksaan, verifikasi lapangan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha pemanfaat jenis ikan.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun selanjutnya, BPSPL Padang akan melanjutkan kegiatan pelayanan peredaran jenis dan pengelolaan PNBP dengan melibatkan tim verifikasi lapangan dan bendahara penerimaan yang telah memiliki kompetensi di bidangnya.

IKM. 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi atas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. kurang, apabila nilai IKPA > 70 .

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 7 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 33. Perbandingan Target dan Capaian IKM 7

IKM. 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)								
Realisasi	Tahun 2023				Renstra			
Tahun 2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
90,90	93,75	95,34	101,7	4,88	91	104,77	91	104,77

Capaian nilai IKPA BPSPL Padang tahun 2023 adalah 95,34 atau 101,7% dari target yang diukur dari pengukuran kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, hingga hasil pelaksanaan anggaran.

Data dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1tyJXmP68yc-d3BzRqPnn1lx6WmL5738s/view?usp=sharing>.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian nilai IKPA BPSPL Padang adalah 90,90. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini, terdapat kenaikan capaian sebesar 4,88%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, pada tahun 2023 dan 2024 IKM 7 memiliki target 91. Ditinjau dari target Renstra 2023 dan 2024, capaian IKM ini memiliki persentase capaian 104,77%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target nilai IKPA lingkup Ditjen PRL juga termuat dalam Renstra KKP 2020-2024 dengan rincian target yang sama dengan Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 34. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 7 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Upaya pencapaian IKM 7 didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Dalam hal ini, kedisiplinan, konsistensi, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam unsur-unsur pelaksanaan anggaran sangat penting dalam pencapaian nilai IKPA yang baik. Dalam pelaksanaan anggaran, acapkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola keuangan dapat melakukan monitoring secara berkala, khususnya dalam

hal menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Dengan adanya sistem monitoring tersebut, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangan tindak lanjutnya.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKM 7 telah didukung oleh hal berikut:

1. Menunjuk penanggung jawab kegiatan yang uraian tugasnya termasuk mengawasi capaian kinerja dan anggaran sehingga terdapat mekanisme pengawasan secara berjenjang.
2. Mengelola/menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan.
3. Mendorong tim pelaksana agar tidak menunda pelaporan pertanggungjawaban kegiatannya sehingga tidak menghambat tim keuangan dalam penyampaian dokumen pendukung.

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 7 berupa penggunaan teknologi informasi dalam monitoring pengelolaan keuangan menggunakan form excel dan *whatsapp group*. Adanya ruang khusus tersebut dapat membantu staf pengelola keuangan untuk memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah, dan menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui <https://sakti.kemenkeu.go.id/> untuk penyampaian usulan revisi DIPA dan Hal III DIPA dan aplikasi <https://espm.kemenkeu.go.id/> untuk pengajuan SPM. Sebelum terdapat aplikasi, kegiatan tersebut dilakukan secara luring ke KPPN dan Kanwil Perbendaharaan yang lebih memakan waktu dan tenaga.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM ini dapat ditunjang dengan metode pengawasan yang berjenjang. Dalam hal pelaksanaan anggaran, tim pengelola keuangan BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring yang berguna untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya sistem tersebut dapat mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusi yang dirumuskan.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 7.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada periode selanjutnya, BPSPL Padang akan kembali menerapkan pengelolaan keuangan yang dipantau oleh PPK dengan dibantu oleh Staf Pengelola Keuangan.

IKM. 8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Adapun cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan Satuan Kerja BPSPL Padang ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) dengan indikator perhitungan meliputi capaian keluaran kegiatan, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 8 BPSPL Padang tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini.

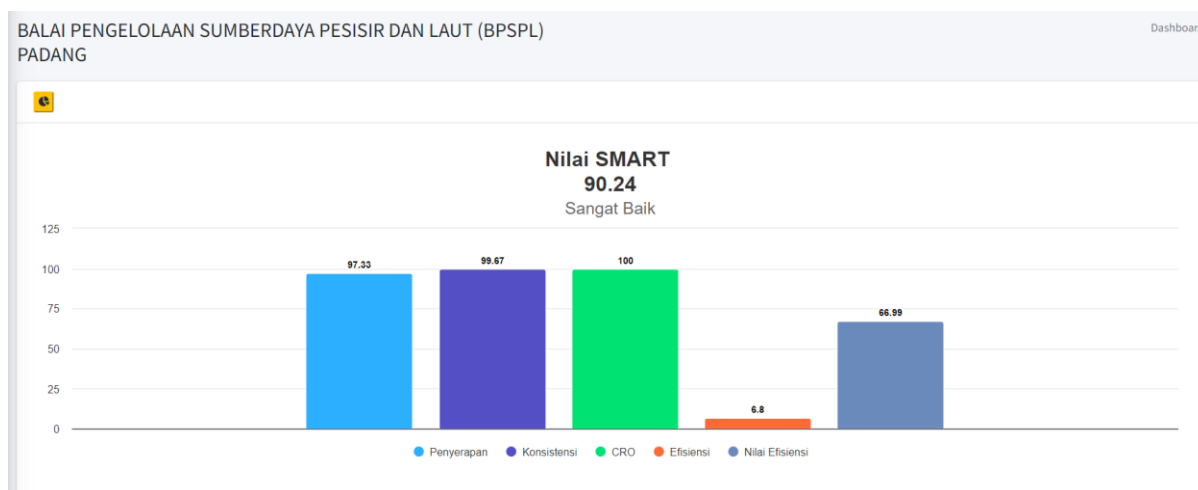
Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian IKM 8

IKM. 8. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)								
Realisasi	Tahun 2023				Renstra			
Tahun 2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
88,75	82	90,24	110,05	1,67	88	102,54	89	101,39

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Padang tahun 2023 adalah 90,24 atau 110,05% dari target yang diukur dari aspek penyerapan, konsistensi, capaian rincian output, efisiensi, dan nilai efisiensi. Perolehan nilai tersebut diperoleh dari aplikasi SMART DJA yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

Data dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1dfjhlo8dQzop63m7KqkLGXCyE4WChHNX/view?usp=sharing>.



Gambar 76. Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Padang
 (Sumber: Aplikasi SMART-Kemenkeu, Januari 2024)

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Padang adalah 88,75. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini, terdapat kenaikan capaian sebesar 1,67%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, IKM 8 memiliki target 88 pada tahun 2023 dan 89 pada tahun 2024. Ditinjau dari target Renstra tahun 2023, IKM ini memiliki persentase capaian 102,54%. Sementara itu, berdasarkan target Renstra 2024 IKM ini memiliki persentase capaian 101,39%

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target NKA lingkup Ditjen PRL juga termuat dalam Renstra KKP 2020-2024 dengan rincian target yang sama dengan Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 36. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 8 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	98	89

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Sama halnya dengan pencapaian IKM 7, Pencapaian IKM 8 juga didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan aspek penilaian Nilai Kinerja Anggaran. Pada tahun 2023, penyajian data pada aplikasi SMART DJA telah terkoneksi dengan pengisian rincian output ke aplikasi SAKTI. Maka dari itu, kepatuhan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI yang juga diiringi dengan pengelolaan anggaran yang efisien. Dalam hal ini, BPSPL Padang senantiasa melakukan koordinasi dengan pengelola aplikasi terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka kesesuaian penyajian rincian output.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKM 8 telah didukung oleh hal berikut.

1. Tim perencana secara aktif berkoordinasi dengan tim pelaksana terkait perubahan-perubahan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Senantiasa memonitor penyerapan anggaran secara berkala untuk memastikan kesesuaian penggunaan dengan ketersediaan anggaran.
3. Pelaksanaan kegiatan survei lapangan dan pertemuan tatap muka secara selektif berdasarkan tingkat urgensinya, diiringi dengan optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang dapat diakomodir dengan korespondensi dan rapat virtual secara daring.

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 8 berupa penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA tidak perlu menginput realisasi keuangan dan hanya perlu melengkapi capaian rincian output setiap bulannya. Selain itu, perhitungan NKA yang berbasis aplikasi tidak perlu melakukan perhitungan manual.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKM 8 didukung oleh pemahaman terhadap Pengukuran nilai kinerja anggaran lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, pencapaian IKM 8 juga didukung dengan ketaatan dalam penginputan capaian output setiap bulannya.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 8.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun selanjutnya, BPSPL Padang akan melanjutkan pengelolaan anggaran yang efisien dan mempertahankan kepatuhan dalam pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI.

IKM. 9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat tersebut

diberikan berdasarkan hasil penilaian yang mengacu PermenPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Secara teknis, unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25 dengan nilai subkomponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan subkomponen “Kinerja Lebih Baik” minimal 52,5;
- d. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 14 (Survei 3,20).

Adapun pencapaian IKM ini diperoleh dari perhitungan penilaian WBK oleh Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 9 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian IKM 9

IKM. 9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)								
Realisasi	Tahun 2023				Renstra			
Tahun 2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
85,23	75	93,31	120	9,5	78	119,6	79	118,1

Pada tahun 2023, capaian nilai WBK BPSPL Padang adalah 93,31 atau 120% dari target. Dalam perkembangannya, telah dilaksanakan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM oleh Inspektorat V KKP dengan menghasilkan nilai sementara 93,99. Lebih lanjut, berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Internal, BPSPL Padang memperoleh nilai 93,31 dan telah diusulkan sebagai unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B. 663/MEN-KP/V/2023 tanggal 24 Mei 2023.

Data dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1vrbtAEUwFy2jZil37pRY79cRrMeXi9G/view?usp=sharing>.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian nilai WBK BPSPL Padang adalah 85,23. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini, terdapat kenaikan capaian sebesar 9,5%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, IKM 9 memiliki target 78 pada tahun 2023 dan 79 pada tahun 2024. Ditinjau dari target Renstra tahun 2023, persentase capaian IKM ini adalah 119,6%. Sementara itu, dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, persentase capaian IKM ini mencapai 118,1%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PRL juga termuat dalam Renstra KKP 2020-2024 dengan rincian target yang sama dengan Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 38. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 9 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Sebagai upaya pencapaian nilai WBK yang maksimal, BPSPL Padang melaksanakan monitoring pembangunan zona integritas secara berkala untuk memantau perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dokumen tersebut dapat disusun sesuai dengan kriteria Petunjuk Teknis.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKM 9 telah didukung oleh hal berikut:

1. Pembagian tugas dengan anggota Kelompok Kerja dan membuat target dan waktu yang jelas;
2. Melibatkan semua pihak terkait pemenuhan dokumen sebagai bagian partisipatif dan kerja sama.

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 9 dengan adanya pemantauan oleh Inspektorat Jenderal. Dalam upaya kontrol secara internal, BPSPL Padang juga menerapkan rapat daring yang dapat diikuti oleh seluruh tim yang tersebar di wilayah kerja BPSPL Padang. **Kegiatan reformasi dan birokrasi di BPSPL Padang dapat didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp19.700.000,00 yang telah terealisasi Rp15.935.815,00 (80,9%).**

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pencapaian IKM 9, BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring secara berkala. Pada kegiatan ini, Ketua Pembangunan Zona Integritas BPSPL Padang memimpin sesi pembahasan yang mencakup evaluasi mandiri, pengecekan dokumen secara menyeluruh, hingga monitoring dari tindak lanjutnya. Adanya kegiatan ini dapat mendukung kedisiplinan tim dalam membangun area pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Pembentukan Tim

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2023 di lingkup BPSPL Padang ditetapkan melalui Surat Tugas Plt. Kepala BPSPL Padang Nomor T.71/BPSPL.1/KP.440/I/2023 tanggal 12 Januari 2023.

b. Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BPSPL Padang oleh Inspektorat V KKP

Penilaian pembangunan zona integritas di BPSPL Padang dilaksanakan pada 28 Februari – 3 Maret 2023. Penilaian ini menghasilkan nilai sementara 93,99 bagi BPSPL Padang. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan dapat dipenuhi secara bertahap sampai dengan 8 Mei 2023 sebagai bahan penyiapan *submit* ke Tim Penilai Nasional.

Tabel 39. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Padang

PENILAIAN		BOBOT	NILAI	%	KETERANGAN
A.	PENGUNGKIT	60,00	54,73		
	I. PEMENUHAN	30,00	26,69	88,98	
	1. Manajemen Perubahan	4,00	3,89	97,25	MS
	2. Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,33	MS
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,40	88,01	MS
	4. Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,73	94,50	MS
	5. Penguatan Pengawasan	7,50	6,25	83,30	MS
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,52	90,30	MS
	II. REFORM	30,00	28,04	93,48	
	1. Manajemen Perubahan	4,00	4,00	100,00	MS
	2. Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,38	MS
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,25	85,00	MS
	4. Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00	MS
	5. Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67	MS
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00	MS
TOTAL PENGUNGKIT			54,73	91,23	MS
B.	HASIL	40,00	39,26		
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50	22,24	98,83	MS
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	17,24	98,50	MS
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	5,00	100,00	MS
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	17,02	97,25	MS
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,50	17,02	97,25	MS
TOTAL HASIL			39,26	98,14	MS
NILAI EVALUASI PEMBANGUNAN ZI			93,99		

Keterangan:

MS : Memenuhi syarat ambang batas minimal WBK

TMS : Tidak memenuhi syarat ambang batas minimal WBK

c. Monitoring Pembangunan ZI

Monitoring pembangunan zona integritas di BPSPL Padang dilaksanakan triwulanan untuk memantau kelemahan-kelemahan dan merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya. Pemantauan ini berguna untuk memastikan komponen-komponen yang harus dipenuhi.

d. Pengusulan BPSPL Padang sebagai Unit Kerja untuk Predikat Menuju WBK

Melalui Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor B. 663/MEN-KP/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, **BPSPL Padang telah diusulkan sebagai salah satu unit kerja Menuju WBK dengan nilai hasil evaluasi oleh Tim Penilai Internal mencapai 93,31.**

e. Penganugerahan BPSPL Padang sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Predikat Pelayanan Prima

Pada acara puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat (11/12), dilakukan penganugerahan kepada Direktorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), pelayanan prima, pengendalian gratifikasi terbaik, penanganan pengaduan terbaik, dan kompetisi suara anti korupsi. Pada kesempatan tersebut, BPSPL Padang menerima apresiasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Predikat Pelayanan Prima.



Gambar 77. Dokumentasi Acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia lingkup KKP

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 9 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan Rincian Output (RO) [2367.EBA.958] Layanan Kehumasan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 40. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 9

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBA.958.052] Pelayanan Publik	19.700.000,00	15.935.815,00	80,9
Total		19.700.000,00	15.935.815,00	80,9

Pada tahun 2023, komponen [2367.EBA.958.052] telah terealisasi 80,9%.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Untuk tahun selanjutnya, BPSPL Padang akan kembali membentuk tim pembangunan zona integritas dan akan senantiasa melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, khususnya dalam hal kesesuaian rencana aksi dengan realisasinya.

IKM. 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan empat dimensi, meliputi kualifikasi (25%), kompetensi (40%), kinerja (30%), dan disiplin (5%).

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:

- i. Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
 - ii. **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
 - iii. Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - iv. Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
 - v. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
- c. Kinerja, diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori.
- d. Disiplin, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.

Adapun kategori Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

- a. Sangat professional/sangat tinggi nilai 91-100
- b. Cenderung professional/tinggi nilai 81-90
- c. Rentan tidak professional/sedang nilai 71-80
- d. Cenderung tidak professional/rendah nilai 61-70
- e. Sangat tidak professional/sangat rendah nilai ≤60.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 10 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

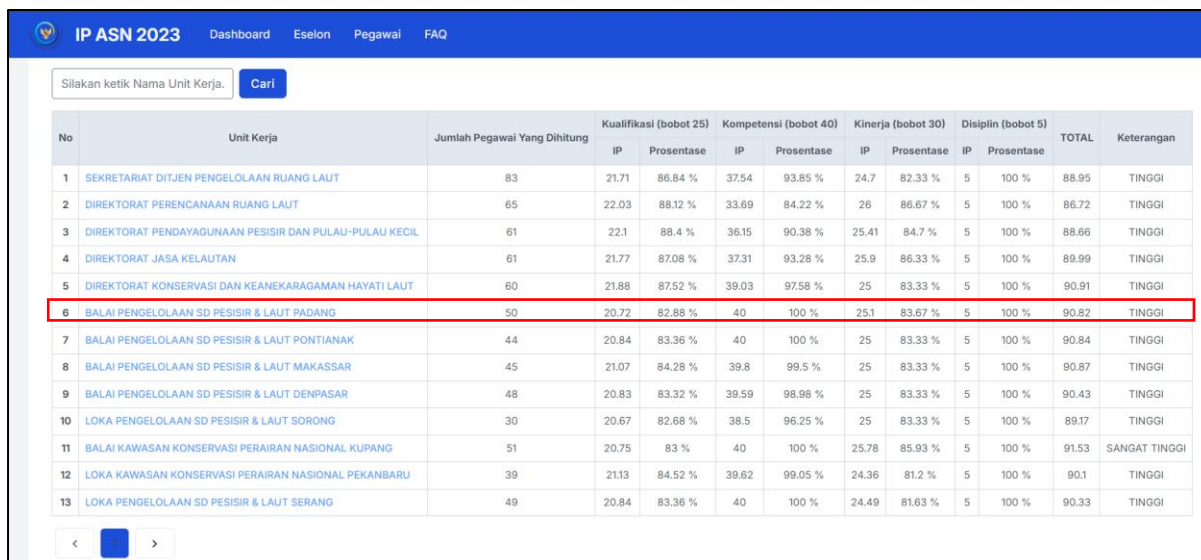
Tabel 41. Perbandingan Target dan Capaian IKM 10

IKM. 10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Renstra			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
84,90	84	90,82	108,12	6,97	75	120	76	119,5

Capaian IP ASN BPSPL Padang tahun 2023 adalah 90,82 atau 108,12% dari target yang diukur dari aspek kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DbSCS1-NsOitao9pQcdiBrw2tZX-g8yX>.



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	83	21.71	86.84 %	37.54	93.85 %	24.7	82.33 %	5	100 %	88.95	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT	65	22.03	88.12 %	33.69	84.22 %	26	86.67 %	5	100 %	86.72	TINGGI
3	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	61	22.1	88.4 %	36.15	90.38 %	25.41	84.7 %	5	100 %	88.66	TINGGI
4	DIREKTORAT JASA KELAUTAN	61	21.77	87.08 %	37.31	93.28 %	25.9	86.33 %	5	100 %	89.99	TINGGI
5	DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT	60	21.88	87.52 %	39.03	97.58 %	25	83.33 %	5	100 %	90.91	TINGGI
6	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	50	20.72	82.88 %	40	100 %	25.1	83.67 %	5	100 %	90.82	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	44	20.84	83.36 %	40	100 %	25	83.33 %	5	100 %	90.84	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	45	21.07	84.28 %	39.8	99.5 %	25	83.33 %	5	100 %	90.87	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	48	20.83	83.32 %	39.59	98.98 %	25	83.33 %	5	100 %	90.43	TINGGI
10	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	30	20.67	82.68 %	38.5	96.25 %	25	83.33 %	5	100 %	89.17	TINGGI
11	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	51	20.75	83 %	40	100 %	25.78	85.93 %	5	100 %	91.53	SANGAT TINGGI
12	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	39	21.13	84.52 %	39.62	99.05 %	24.36	81.2 %	5	100 %	90.1	TINGGI
13	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	49	20.84	83.36 %	40	100 %	24.49	81.63 %	5	100 %	90.33	TINGGI

Gambar 78. Tangkap Layar Capaian Indeks Profesionalitas ASN

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian IP ASN BPSPL Padang adalah 84,90. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini, terdapat kenaikan capaian sebesar 6,97%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, IKM 10 memiliki target 75 pada tahun 2023 dan 76 pada tahun 2024. Ditinjau dari target Renstra tahun 2023, IKM ini memiliki persentase capaian 120%. Sementara itu, dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024, IKM ini memiliki persentase capaian 119,5%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target Indeks Profesionalitas ASN juga termuat dalam Renstra KKP 2020-2024 dengan rincian target yang sama dengan Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 42. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 10 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Pencapaian IKM ini didukung dengan adanya kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diikuti pegawai. Setiap pegawai dapat memenuhi diklat 20 JP-nya melalui kegiatan pengembangan diri yang tersedia secara luring dan daring untuk mendongkrak perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang. Namun demikian, pencapaian IP ASN BPSPL Padang tidak meningkat secara signifikan karena tidak ada tambahan pegawai yang meningkat kualifikasi pendidikannya. Maka dari itu, alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IP ASN BPSPL Padang adalah mendorong pegawai yang telah selesai izin dan tugas belajar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi akhirnya agar gelarnya dapat segera diakui.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKM 10 telah didukung oleh hal berikut:

1. Mendorong seluruh Pegawai atau ASN BPSPL Padang untuk meningkatkan kompetensi baik dalam bentuk diklat, pelatihan, bimbingan teknis, tugas belajar dan izin belajar.
2. Menyampaikan laporan pengembangan diri kepada Bagian Kepegawaian dengan turut melampirkan sertifikat yang diperoleh.
3. Menerapkan sistem pengawasan kinerja pegawai yang sistematis dan menyeluruh agar pimpinan penilai kinerja dapat memberikan nilai yang objektif dan sesuai dengan hasil kinerja pegawai yang bersangkutan.
4. Menginformasikan rekapitulasi presensi ke seluruh pegawai sebagai bahan evaluasi bagi pribadi masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, IP ASN BPSPL Padang banyak didukung dari kegiatan pengembangan kompetensi, baik yang tersedia secara daring maupun luring. Adanya kegiatan pengembangan kompetensi secara daring ini dapat memperluas kesempatan bagi seluruh pegawai tanpa dibatasi oleh ketersediaan anggaran. Sementara itu, **BPSPL Padang juga didukung dengan alokasi anggaran sejumlah Rp258.300.000,00 untuk kegiatan pengembangan kompetensi dan telah terealisasi Rp253.952.908,00 (98,3%)**. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM dan kegiatan pendukung lainnya.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKM 10 didukung oleh keaktifan pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi workshop/diklat 20 JP. Untuk itu, BPSPL Padang senantiasa melakukan monitor pemenuhan diklat 20 JP yang harus dipenuhi oleh pegawai. Monitoring tersebut dilakukan dengan penyusunan laporan pengembangan mandiri yang diunggah ke laman *google drive* untuk memudahkan pemantauan.

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 10 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal dengan Rincian Output (RO) [2367.EBC.954] Layanan Manajemen SDM. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 43. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 10

No	Komponen	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	258.300.000,00	-	253.952.908,00	98,3
	Total	258.300.000,00	-	253.952.908,00	98,3

Realisasi anggaran rincian output [2367.EBC.954] adalah 98,3%.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja IP ASN pada tahun 2023 mendatang, BPSPL Padang akan kembali mengupayakan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam kegiatan bimbingan teknis, seminar, dan *workshop* yang kemudian senantiasa dilaporkan ke Kepegawaian. Selain itu, BPSPL Padang juga akan memonitor secara berkala progress masing-masing pegawai dalam pemenuhan sertifikat diklat 20 JP-nya.

IKM. 11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang

Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat empat aspek penilaian di dalam evaluasi tersebut, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Adapun kategori nilai PM SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Sangat Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Memuaskan;
3. predikat BB dengan nilai >70-80 dengan kategori Sangat Baik;
4. predikat B dengan nilai >60-70 dengan kategori Baik;
5. predikat CC dengan nilai >50-60 dengan kategori Cukup;
6. predikat C dengan nilai >30-50 dengan kategori Kurang;
7. predikat D dengan nilai 0-30 dengan kategori Sangat Kurang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 11 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 44. Perbandingan Target dan Capaian IKM 11

IKM. 11. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Renstra			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
-	75	88,2	117,6	-	-	-	-	-

Capaian nilai PM SAKIP BPSPL Padang tahun 2023 adalah 88,2 dengan persentase capaian 117,6%.

Data dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1Oj5DWiCdXXmYlztJ0BC6budbTVEJQiTn/view?usp=sharing>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKM 11 BPSPL Padang tahun 2023 merupakan IKM baru yang tidak terdapat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sehingga tidak ada perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang tidak termuat dalam Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen PRL juga termuat dalam Renstra KKP 2020-2024 dengan rincian target yang sama dengan Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 45. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 13 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan capaian IKM 11 dapat didukung oleh adanya harmonisasi antara tim pengelola kinerja, dari sub-tim perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKM 11 telah didukung oleh hal berikut:

1. Pengumpulan data kinerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan;
2. Pengukuran kinerja berbasis aplikasi daring,
3. Pemantauan capaian kinerja berbasis luring dan daring;
4. Pembuatan *database* laporan serta data dukungnya dengan memanfaatkan teknologi Google Drive dan Aplikasi WhatsApp.

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 11 berupa pemanfaatan teknologi dalam media penyimpanan dokumen dan aplikasi untuk pertemuan virtual. Di samping itu, dokumen pendukung SAKIP juga telah tertata dalam media penyimpanan *google drive* sehingga tidak tercecer dan terkumpul dengan baik.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKM 11 dapat ditunjang dengan adanya kegiatan berikut.

a. Bimbingan Teknis Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) dan SmartID pada 15-16 Maret 2023 di Malang. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Inspektur III KKP, Sekretariat Inspektorat Jenderal KKP, Biro Perencanaan KKP, dan Satuan Kerja lingkup DJPRL. Pada kesempatan ini, peserta bimbingan teknis dibekali materi seputar pengelolaan kinerja, meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara menyeluruh yaitu perencanaan, pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Selain itu, peserta juga dilatih untuk menyusun laporan kinerja yang baik dan menyeluruh agar informasi kinerja dapat tersampaikan secara objektif.



Gambar 79. Dokumentasi Bimbingan Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja

b. Evaluasi AKIP Tahun 2023

Kegiatan diselenggarakan oleh Sekretariat DJPRL pada Senin – Rabu, 12 – 14 Juni 2023 di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Kota Jakarta Pusat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektorat III KKP, Biro Perencanaan KKP, dan unit kerja lingkup DJPRL. Pelaksanaan evaluasi AKIP mengacu pada Peraturan

Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kesempatan ini, dilakukan peninjauan atas pemenuhan aspek-aspek evaluasi meliputi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Berdasarkan hasil reviu sementara, BPSPL Padang memperoleh nilai sebesar 88,3 namun akan kembali dievaluasi sebelum dilaksanakan pleno penetapan nilai akhir PM SAKIP.



Gambar 80. Dokumentasi Evaluasi AKIP Tahun 2023

c. Pleno Evaluasi AKIP

Pleno evaluasi AKIP diselenggarakan di Hotel Mercure Sabang, Kota Jakarta Pusat pada Jumat, 7 Juli 2023 sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juni 2023. Di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, penilaian evaluasi AKIP telah terakomodir dalam Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja (SAPK) Kinerjaku dengan cara melampirkan daftar dokumen pendukung masing-masing kriteria beserta tautan untuk mengakses dokumen tersebut. Adapun aspek penilaian dalam evaluasi AKIP meliputi Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dalam hal ini, BPSPL Padang telah memenuhi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian. Berdasarkan hasil diskusi bersama, nilai PM SAKIP BPSPL Padang sementara adalah 84,20. Adapun kelemahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- Terdapat Indikator Kinerja yang tidak berkelanjutan dan baru selama periode Renstra,
- Terdapat penurunan nilai rekonsiliasi kinerja tahun 2021 – 2022 (96,50 menjadi 96,22). Peningkatan nilai rekonsiliasi kinerja menjadi salah satu dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun empat indikator yang dimaksud adalah: Nilai Rekonsiliasi Kinerja (BPSPL Padang mengalami penurunan), Efektivitas efisiensi (BPSPL Padang mengalami peningkatan), NPSS (BPSPL Padang mengalami peningkatan), dan SMART DJA (BPSPL Padang mengalami peningkatan). Jika salah satu dari empat indikator tersebut mengalami penurunan, maka diperoleh nilai 'B' (tidak dapat memperoleh nilai maksimal) pada aspek penilaian yang berkaitan dengan peningkatan kinerja.

Adapun perolehan nilai tersebut dapat mengalami penyesuaian kembali karena mempertimbangkan potensi peningkatannya untuk ke depannya. Informasi terkait perolehan nilai final akan diinformasikan kemudian.



Gambar 81. Dokumentasi Pleno Evaluasi AKIP

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 11 dapat didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Rincian Output (RO) [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 46. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKM 11

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	92.400.000,00	90.642.304,00	98,1
2	[2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	60.000.000,00	59.875.242,00	99,8
Total		152.400.000,00	150.517.546,00	98,8

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun selanjutnya, BPSPL akan senantiasa menjalankan siklus SAKIP sesuai dengan penugasan tim teknis tata kelola kinerja BPSPL Padang, meliputi tahap pengukuran, verifikasi, pelaporan, hingga evaluasi.

IKM. 12. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 12 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 47. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12

IKM. 12 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Renstra			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
4	4	4	100	-	-	-	-	-

Capaian IKM 12 pada tahun 2023 telah sesuai target 4 dokumen, yaitu Laporan SPIP BPSPL Padang Triwulan IV 2022, Triwulan I 2023, Triwulan II 2023, dan Triwulan III 2023.

Dokumen pendukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q8-0dcUWFj64GKbKKq5YDDBVFCi5c2Lb>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini

Realisasi IKM 12 pada triwulan IV 2022 dan triwulan IV 2023 adalah sama, yaitu empat dokumen. Maka dari itu, tidak terdapat persentase kenaikan capaian IKM 14 pada tahun 2023.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Indikator kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang tidak termuat dalam Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target Nilai Maturitas SPIP DJPRL (level) lingkup Ditjen PRL termuat dalam Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 48. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 12 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Pencapaian IKM 12 didukung dengan adanya kegiatan FGD Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi. Pengendalian Risiko Kegiatan BPSPL Padang dibuat berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk diantisipasi dan dijadikan bahan masukan dalam persiapan kegiatan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kegiatan monitoring upaya pengendalian di BPSPL Padang secara umum memanfaatkan teknologi komunikasi dan media penyimpanan data berbasis daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun tim didukung dengan aplikasi-aplikasi penunjang pelaksanaan anggaran, pelayanan peredaran jenis, pemungutan PNBP, hingga pelaporan berkala.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada Januari 2023, BPSPL Padang memperoleh penghargaan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai Satuan Kerja Penyelenggaraan SPIP Terbaik Tahun 2022 untuk Kelompok Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun pencapaian tersebut dapat ditunjang dengan implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan dengan menyertakan data dukung pengendalian risiko yang dilaporkan secara berkala. Lebih lanjut, BPSPL Padang juga menerapkan implementasi pemantauan risiko secara berkala dan menyeluruh.



Gambar 82. Sertifikat Penghargaan Satuan Kerja Penyelenggaraan SPIP Terbaik Tahun 2022 untuk Kelompok UPT

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 12.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun selanjutnya, BPSPL Padang akan melaksanakan implementasi SPIP melalui pembangunan lingkungan pengendalian dan penilaian risiko beserta pengendaliannya.

IKM. 13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang telah memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Dalam pencapaian IKM ini, digunakan aplikasi portal.kkp.go.id.

Penghitungan capaian berdasarkan poin keaktifan Kepala UPT melakukan posting berbagi pengetahuan dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan. Penghitungan poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut:

- Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5. Dalam hal unggah kegiatan Apel Pagi tidak mendapatkan nilai.
- Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1.
- Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah poin pejabat yang aktif}}{\text{Jumlah target poin pejabat yang aktif}} \times 100\%$$

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 13 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 49. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13

IKM. 13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)								
Realisasi	Tahun 2023				Renstra			
Tahun 2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
99,75	92	116,65	120	16,94	88	120	90	120

Realisasi capaian IKM 13 pada tahun 2023 adalah 116,65 dengan persentase capaian 120%, yang mana merupakan hasil rata-rata dari nilai pada triwulan I-IV 2023, yaitu 100, 100, 133,33, dan 133,33.

Data dukung:

https://drive.google.com/file/d/1e5Xk9ag7Bqij86TQP0v26tgA7Cn_mrPb/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1wGuRuamzw4cdQA9hRcXGA4CaoP3NGmnm/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1GDBkcZWiyVMGr9rhRuk9tA3fQ1K5B_zn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ymgvRw0_6ltobt_1EBRSsDOJLEzxVUB/view?usp=sharing

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian persentase penerapan manajemen pengetahuan yang terstandar BPSPL Padang adalah 99,75%. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini terdapat kenaikan capaian sebesar 16,94%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, IKM 13 memiliki target 88 pada tahun 2023. Maka dari itu, persentase capaian tahun 2023 terhadap target Renstra 2023 adalah 120%. Sementara itu, pada Renstra 2024 IKM 13 memiliki target 90 sehingga capaian tahun 2023 terhadap Renstra 2024 adalah 120%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen PRL juga termuat dalam Renstra KKP 2020-2024 dengan rincian target yang sama dengan Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 50. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 13 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
		Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Dalam upaya pencapaian IKM 13, BPSPL Padang melakukan monitoring berkala setiap bulannya sebagai pengingat kepada pegawai yang belum posting unggahannya di aplikasi bitrix dan *portal collaboration office*. Sejauh ini, upaya tersebut telah membuahkan hasil karena persentase keaktifan maksimal dan perolehan capaian IKM 15 pun dapat terpenuhi pada triwulan selanjutnya.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKM 13 terdapat pada pemanfaatan sarana teknologi dan informasi untuk lebih proaktif dalam input data di aplikasi Bitrix dan portal.kkp.go.id sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja BPSPL Padang dalam menyampaikan informasi kegiatan setiap triwulannya.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pemenuhan IKM 13, BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring setiap bulan untuk memberi kelowongan pada pegawai yang terlibat pada aplikasi bitrix 24 KKP dan *portal collaboration office* memenuhi postingan yang optimal. Selain itu, admin utama juga melakukan pengingat pada 2-3 hari terakhir sebelum berakhir, baik secara langsung atau melalui media komunikasi. Hasil rekapitulasi unggahan pegawai juga disampaikan di media komunikasi unit kerja sehingga pegawai yang belum melengkapi unggahannya dapat segera mengunggah postingan yang sesuai dengan ketentuan penyampaian informasi.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 13.

I. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

BPSPL Padang akan melakukan monitor terhadap keaktifan dalam *posting* pengetahuan pada aplikasi portal.kkp.go.id.

IKM. 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

IKM ini menilai rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPSPL Padang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti, baik berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPSPL Padang yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKM ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2022 s.d triwulan III tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas.

Penghitungan capaian IKM ini memiliki kriteria tertentu dengan kondisi berikut:

1. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun rekomendasi tersebut tidak masuk dalam aplikasi SIDAK maka tindak lanjut rekomendasi dihitung secara manual oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
2. Jika tidak ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan oleh Inspektorat Jenderal maka perhitungan capaian sama dengan nilai target.
3. Jika ada audit/reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka perhitungan capaian 100 sehingga capaian pada aplikasi Kinerjaaku 120%.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 14 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 51. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14

IKM. 14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Renstra			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
92,5	75	100	120	8,1	75	120	80	120

Capaian IKM 14 tahun 2023 adalah 100% sehingga persentase capaiannya terhadap target adalah 120%, yang mana merupakan persentase maksimal berdasarkan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja (SAPK) Kinerjaaku. Adapun dalam perkembangannya, BPSPL Padang telah menindaklanjuti dengan tuntas rekomendasi-rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana terlampir.

Tabel 52. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2023

No	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Objek Pengawasan	Jumlah Rekomendasi	Status
1	Audit	T.82/ITJ.3/HP.110/II/2023	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 pada BPSPL Padang	10	Tuntas
2	Evaluasi	T.162/ITJ.3/HP.460/IV/2023	Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Padang	12	Tuntas
3	Evaluasi	T.427/ITJ.3/HP.430/VIII/2023	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPSPL Padang	2	Tuntas
4	Evaluasi	T.430/ITJ.3/HP.470/VIII/2023	Laporan Hasil Evaluasi PNBPA TA 2022-2023 pada BPSPL Padang	6	Tuntas

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vi7998SZ3-CwkQyEx0nqhC5NI4_PXN8Q.

ID	Unit Kerja	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Tanggal Register	Objek Pengawasan	STATUS	Aksi
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	41431T.J/HP.550/VII/2019	2019-08-28	Pemantauan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada BPSPL Padang, Provinsi Sumatera Barat	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	50751T.J/HP.440/VI/2021	2021-07-19	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir (BPSPL) Padang Tahun 2021	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Pemantauan	49051T.J/HP.550/IV/2021	2021-04-13	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	49081T.J/HP.322/IV/2021	2021-04-19	Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Tracking Mangrove pada Satker Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang di Provinsi Sumatera Barat	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Audit	T.85.ITJ.3/HP.110/III/2022	2022-03-30	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2021 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.2391T.J.3/HP.430/IX/2022	2022-09-07	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Audit	T.821T.J.3/HP.110/III/2023	2023-02-21	Laporan Hasil Audit Kinerja TA 2022 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.1621T.J.3/HP.460/IV/2023	2023-04-14	Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.4271T.J.3/HP.430/VIII/2023	2023-08-29	Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail
499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Evaluasi	T.4301T.J.3/HP.470/VIII/2023	2023-08-31	Laporan Hasil Evaluasi PNB TA 2022-2023 pada BPSPL Padang	TUNTAS	Q Detail

Gambar 83. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang
 (Sumber: Aplikasi SIDAK, Januari 2024)

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian IKM 14 BPSPL Padang adalah 92,5% yang merupakan hasil rata-rata capaian triwulan I-IV. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini yang dihitung secara posisi akhir, terdapat kenaikan capaian sebesar 8,1%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, IKM ini memiliki target yang sama dengan Perjanjian Kinerja sehingga persentase capaian IKM ini terhadap target Renstra 2023 sama dengan persentase capaian tahun ini, yakni 120%. Sementara itu, persentase capaian IKM ini terhadap renstra 2024 adalah 120%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PRL juga termuat dalam Renstra KKP 2020-2024 dengan rincian target yang sama dengan Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 53. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 14 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Keberhasilan pencapaian IKM 14 didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Padang. Dalam tindak lanjutnya, tim BPSPL Padang dimudahkan dengan adanya aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang dapat menampilkan data temuan beserta status tindak lanjutnya. Dalam hal ini, penanggung jawab temuan harus menindaklanjuti catatan dari Inspektorat Jenderal sesuai dengan waktu yang ditentukan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKM 14 terdapat pada penggunaan aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang memudahkan BPSPL Padang dan tim Inspektorat Jenderal untuk memantau proses tindak lanjut hasil pengawasan. Aplikasi SIDAK juga telah mengakomodir penyampaian dokumen tindak lanjut tersebut sehingga dokumentasi menjadi lebih terarsip dengan rapi.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 14 dapat ditunjang oleh adanya upaya pendampingan oleh APIP terhadap kegiatan di BPSPL Padang. Dengan adanya pendampingan tersebut, ke depannya BPSPL Padang dapat meminimalisir jumlah temuan pada kegiatan serupa.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 14.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

BPSPL Padang akan kembali melakukan monitoring terhadap temuan Inspektorat Jenderal beserta status tindak lanjutnya agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti hingga tuntas. Monitoring dilakukan dengan memantau aplikasi SIDAK yang memberikan informasi persentase TLHP BPSPL Padang yang sudah ditindaklanjuti.

IKM. 15. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Padang Tahun 2022. Capaian IKM ini dihitung dari persentase perbandingan jumlah temuan LHP yang diselesaikan dengan Jumlah temuan, sebagaimana rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Padang}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 15 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 54. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15

IKM. 15. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%)								
Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Renstra			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
100	100	100	100-	-	100	100	100	100

Persentase penyelesaian temuan lingkup BPSPL Padang tercapai sesuai target 100% karena tidak ada pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GslGtrfZjz2s51vWy_oF-ximB4eBAXkx.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian IKM 15 adalah 100%. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini tidak terdapat kenaikan capaian antara tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 pun tidak terdapat pemeriksaan oleh BPK lingkup BPSPL Padang.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, pada tahun 2023 dan 2024 IKM 15 memiliki target 100 sehingga persentase capaiannya juga 100%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Rincian target Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran lingkup Ditjen PRL juga termuat dalam Renstra KKP 2020-2024 dengan rincian target yang sama dengan Renstra DJPRL tahun 2020-2024.

Tabel 55. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 15 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang dalam penggunaan anggaran oleh Kepala BPSPL Padang. Setiap pertanggungjawaban keuangan harus mencantumkan bukti otentik dan konfirmasi langsung kepada pengguna anggaran. Sebagai antisipasi, BPSPL Padang perlu senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan disertai penerapan nilai-nilai akuntabilitas untuk meminimalisir temuan.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun ini, pengelolaan anggaran di lingkup BPSPL Padang telah menggunakan Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagai upaya mencegah penggunaan anggaran yang melebihi pagu. Selain itu, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan juga telah dilaksanakan secara berjenjang.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 15 dapat ditunjang dengan adanya evaluasi kinerja dan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulannya. Pada kesempatan tersebut, dibahas secara tuntas perkembangan isu yang terdapat di BPSPL Padang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam hal ini, BPSPL Padang memperhatikan aspek kinerja dan referensi keuangan yang sesuai.

H. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 15.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

BPSPL Padang akan senantiasa memantau pelaksanaan anggaran.

IKM. 16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Startegis adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya yaitu bantuan konservasi. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan hasil penilaian Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang telah dibahas bersama UPT dan Direktorat Lingkup DJPRL. Adapun nilai efektivitas diperoleh dari rumus perhitungan **Efektivitas = 80% Pencapaian Tujuan + 10% Integrasi + 10% AT**.

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai efektivitas tersebut terbagi ke dalam kategori sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Efektif;
3. predikat B dengan nilai >60-80 dengan kategori Cukup Efektif;
4. predikat C dengan nilai >40-60 dengan kategori Kurang Efektif;
5. predikat D dengan nilai 0-40 dengan kategori Tidak Efektif.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Rincian target IKM 16 BPSPL Padang tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 56. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16

IKM. 16 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang								
Realisasi	Tahun 2023				Renstra			
Tahun 2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thdp Target 2024
92,5	77,5	100	120	8,11	77,5	120	80	120

Capaian IKM ini adalah 100% dengan persentase capaian 120%. Capaian IKM ini diperoleh dari hasil evaluasi terhadap penerima bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) tahun anggaran

2022, yaitu Kelompok Pusong Diving Club di Kabupaten Aceh Barat Daya, Tuah Basamo Diving di Kabupaten Pasaman Barat, dan Pokdarwis Anoi Itam di Kota Sabang.

Data dukung:

<https://drive.google.com/file/d/1JkfpoLnOLDsC-xptz-KPGxKswgqDEuc5/view?usp=sharing>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahun 2022, capaian IKM ini adalah 92,5%. Maka dari itu, berdasarkan data capaian tahun ini terdapat kenaikan sebesar 8,11%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Ditinjau dari Rencana Strategis BPSPL Padang 2020-2024, IKM 16 memiliki target 77,5 pada tahun 2023 dan 80 pada tahun 2024. Maka dari itu, capaian IKM terhadap target Renstra 2023 adalah 120%. Sementara itu, persentase capaian IKM terhadap target Renstra 2024 adalah 120%.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Diberikan

Pencapaian IKM 16 didukung oleh pemahaman menyeluruh terkait aspek-aspek pengukuran efektivitas bantuan pemerintah. Selain itu, kooperasi dari kelompok penerima bantuan dalam menyampaikan data dukung, informasi, dan keterangan yang benar juga dapat menunjang pengukuran yang menyeluruh dan akuntabel. Dalam hal ini, BPSPL Padang telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kelompok sebelum melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk mempersiapkan kelompok. Di samping itu, pelibatan dinas sebagai mitra juga dapat mendukung upaya pembekalan kepada kelompok lebih menyeluruh.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKM 16 telah didukung oleh hal berikut:

1. Membekali tim monev dengan data-data dasar kelompok penerima bantuan dan rincian barang bantuan yang diserahkan;
2. Melakukan koordinasi aktif dengan Dinas lokasi setempat dan kelompok penerima bantuan melalui telepon/internet untuk menghimpun data-data pendukung pemanfaatan bantuan;
3. Menghimpun data dan informasi pendukung yang relevan sesuai dengan perkembangan isu di wilayah yang dikelola oleh kelompok penerima bantuan pemerintah,
4. Melaksanakan pra-monitoring dan evaluasi (pra-monev) terhadap kelompok penerima bantuan KOMPAK tahun anggaran 2022 secara daring.

Efisiensi terdapat pada kegiatan pra-monev yang dilakukan secara daring. Pada kesempatan tersebut, verifikator BPSPL Padang melakukan diskusi dan wawancara dengan perwakilan kelompok dengan mengacu pada Kertas Kerja Evaluasi yang menjadi acuan penilaian. Dalam hal ini, pra-monev dapat membantu identifikasi masalah lebih awal sehingga pelaksanaan pemantauan langsung dapat berjalan lebih efisien.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKM 16 dapat didukung oleh hal berikut.

a. Pra-Monev terhadap Kelompok Penerima Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Tahun Anggaran 2022

Pra-monev pengelolaan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) bertujuan untuk memperoleh gambaran konkret terkait perkembangan pemanfaatan bantuan. Dengan dilaksanakan pra-monev terlebih dahulu, identifikasi permasalahan dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga pelaksanaan monev secara langsung dapat efektif fokus pada pendampingan penyelesaian masalah.

Tabel 57. Hasil Pra-Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Bantuan KOMPAK TA 2022

No	Nama Kelompok	Lokasi	Tanggal Pelaksanaan	Kendala	Rekomendasi
1	Pokdarwis Anoi Itam	Kota Sabang, Aceh	23 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pemanfaatan bantuan yang belum optimal karena terkendala cuaca - Rubber boat mengalami kebocoran di bagian sambungannya - Biaya pemeliharaan barang yang memerlukan biaya tambahan selain dari pendapatan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - BPSPL Padang kembali melakukan pemantauan kepada kelompok setelah musim angin timur - Pokdarwis Anoi Itam agar memperbaiki kebocoran tersebut - Pokdarwis Anoi Itam agar berkoordinasi dengan BUMDes setempat untuk mendiskusikan metode alternatif peningkatan pendapatan kelompok
2	Pusong Diving Club	Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh	24 Februari 2023	Kelompok belum memiliki asset tambahan pasca pemberian bantuan	Pusong Diving Club agar merealisasikan pencetakan papan informasi
3	Tuah Basamo Diving	Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat	09 Maret 2023	Penyimpanan alat selam yang masih bercampur dengan barang lainnya	Tuah Basamo Diving agar menyimpan alat selam di tempat khusus agar tidak bercampur dengan barang lain

b. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di Provinsi Aceh

Pada tanggal 9-11 Mei 2023, BPSPL Padang melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) terhadap kelompok penerima bantuan tahun anggaran 2021-2022 di Provinsi Aceh. Adapun kelompok tersebut meliputi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis Anoi Itam) di Kota Sabang, Pusong Diving Club di Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Tim Konservasi Penyu Aroen Meubanja di Kabupaten Aceh Jaya. Secara garis besar, kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memantau perkembangan kelompok pasca diberi bantuan serta mengukur efektivitasnya melalui pemenuhan aspek evaluasi. Pada kesempatan ini, kelompok juga dibekali dalam hal pemenuhan kewajiban pelaporannya serta untuk mempersiapkan data-data dukung yang relevan. Lebih lanjut, hasil pengukuran efektivitas akan tersaji pada Kertas Kerja Evaluasi yang akan dibahas pada waktu mendatang.



Gambar 84. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan KOMPAK di Provinsi Aceh

c. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) terhadap Kelompok Tuah Basamo Diving di Kabupaten Pasaman Barat

Pada tanggal 22 Agustus 2023, BPSPL Padang melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) terhadap Kelompok Tuah Basamo Diving di Kabupaten Pasaman Barat. Pada Tahun Anggaran 2022, Tuah Basamo Diving menerima bantuan konservasi senilai Rp97.885.556,00 yang terdiri dari kamera bawah air, GPS, dan peralatan selam SCUBA.

Secara umum, kondisi barang bantuan yang dikelola oleh Tuah Basamo Diving dalam kondisi baik dan terawat. Selain itu, Kelompok juga telah menyampaikan ragam kegiatannya, pengembangan kompetensi, beserta catatan keuangannya melalui laporan. Hasil dari monitoring ini kemudian akan disajikan pada Kertas Kerja Evaluasi untuk mengukur efektivitas bantuan.



Gambar 85. Dokumentasi Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan KOMPAK terhadap Tuah Basamo Diving

d. Pembahasan Hasil Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Tahun 2022

Kegiatan diselenggarakan di Hotel Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 Desember 2023. Pertemuan ini membahas hasil penilaian mandiri efektivitas pelaksanaan bantuan pemerintah tahun 2022 yang mengacu pada Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Di lingkup BPSPL Padang, penilaian dilakukan terhadap tiga kelompok penerima bantuan konservasi, yaitu Pusong Diving Club, Tuah Basamo Diving, dan Pokdarwis Gampong Anoi Itam. Berdasarkan hasil penilaian mandiri dan diskusi yang berkembang, bantuan konservasi di lingkup BPSPL Padang memperoleh nilai 100 dengan kategori memuaskan.

Tabel 58. Hasil Penilaian Efektivitas Bantuan Pemerintah Tahun 2022 Lingkup BPSPL Padang

No	Bantuan Pemerintah	Nama Kelompok Penerima	Kabupaten/Kota	Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	Total
1	Bantuan Konservasi	Pusong Diving Club	Aceh Barat Daya	80	10	10	100
2	Bantuan Konservasi	Tuah Basamo Diving	Pasaman Barat	80	10	10	100
3	Bantuan Konservasi	Pokdarwis Gampong Anoi Itam	Kota Sabang	80	10	10	100



Gambar 86. Dokumentasi Pleno Penilaian Efektivitas Bantuan Pemerintah Tahun 2022

H. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 16 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.QEH] Bantuan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 59. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 16

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.QEH.001.053] Pendampingan dan Pembinaan KOMPAK	39.400.000,00	37.421.021,00	95
Total		39.400.000,00	37.421.021,00	95

Realisasi anggaran komponen [2362.QEH.001.053] adalah 95%.

I. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya

Pada tahun 2024, BPSPL Padang akan melaksanakan pendampingan pengelolaan bantuan pemerintah tahun anggaran 2023. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan meninjau upaya pemanfaatan bantuan pemerintah terhadap Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Sejenis

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Padang dengan sampling unit kerja sejenis lainnya pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 60. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Sejenis

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Pontianak		BPSPL Makassar	
	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023
1 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun (Dokumen)	3	3	3	3	3	3
2 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Daerah)	2	3	1	2	1	2
3 Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan (Kelompok)	3	3	3	3	3	3
4 Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional (%)			30	36,44		
5 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi (Jenis)	7	10	7	10	6	10
7 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (Jenis)	5	8	3	6	5	10
9 Nilai PNBK (Rp.000)	524.347	958.877,695	900.000	2.734.620,820	675.000	882.681,302
10 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) (nilai)	93,75	95,34	93,75	93,03	93,75	95,35
11 Nilai Kinerja Anggaran (nilai)	82	90,24	82	85,85	82	88,69
12 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK (Nilai)	75	93,31	75	90,81	75	87,41
13 Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan (Inovasi)			1	1		
14 Indeks profesionalitas (indeks)	84	90,82	84	90,84	84	90,89
15 Nilai PM SAKIP (Nilai)	75	88,2	75	88,2	75	84,2
16 Laporan SPIP yang Disusun (Dokumen)	4	4	4	4	4	4
17 Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	116,65	92	116,65	92	116,65
18 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	75	100	75	100
19 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (%)	100	100	100	100	100	100
20 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah (%)	77,5	100	77,5	100	77,5	100

Keterangan:

Tidak terdapat indikator kinerja tersebut

Berdasarkan perbandingan terhadap unit kerja sejenis lainnya, dapat disimpulkan bahwa masing-masing unit kerja memiliki pola penentuan target yang beragam. Selain itu, kondisi dan potensi pada masing-masing unit kerja juga berbeda sehingga target kinerja pada indikator teknis juga tidak selalu sama. Maka dari itu, perbandingan persentase keseluruhan capaian pada unit kerja tidak semata-mata menunjukkan kualitas kinerja karena jumlah indikator yang diukur capaiannya juga berbeda.

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2023 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2023 sebesar **Rp14.516.480.000,00** (Empat Belas Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Namun demikian, terdapat blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah **Rp1.622.000.000,00** (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Adanya blokir tersebut tidak mempengaruhi pagu anggaran secara keseluruhan, namun anggaran yang terblokir tersebut belum dapat digunakan. Dalam perkembangannya, pada tanggal 30 Agustus 2023 **terdapat penambahan pagu anggaran BPSPL Padang yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1.239.428.000,00** yang mana merupakan hasil pembagian dari PNBP DJPKRL. Penambahan tersebut menyebabkan **peningkatan pagu anggaran BPSPL Padang menjadi Rp15.755.908.000,00** (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Lebih lanjut, pada tanggal 10 Oktober 2023 Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor S-371/MK.2/2023 menginstruksikan Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan relaksasi non belanja pegawai dari *automatic adjustment* dengan mengajukan usulan revisi pengurangan alokasi anggaran. Atas dasar hal tersebut, terdapat penarikan blokir Anggaran Biaya Tambahan senilai Rp1.200.000.000,00 dan pembukaan blokir anggaran senilai Rp184.000.000,00 sehingga pagu BPSPL Padang menjadi Rp14.555.908.000,00. Dinamika pun masih berlanjut dengan adanya pergeseran belanja pegawai ke eselon 1 sebesar Rp800.000.000,00 sehingga **pagu BPSPL Padang yang diukur kinerjanya pada tahun 2023 menjadi Rp13.755.908.000,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan total blokir sebesar Rp250.000.000,00.**

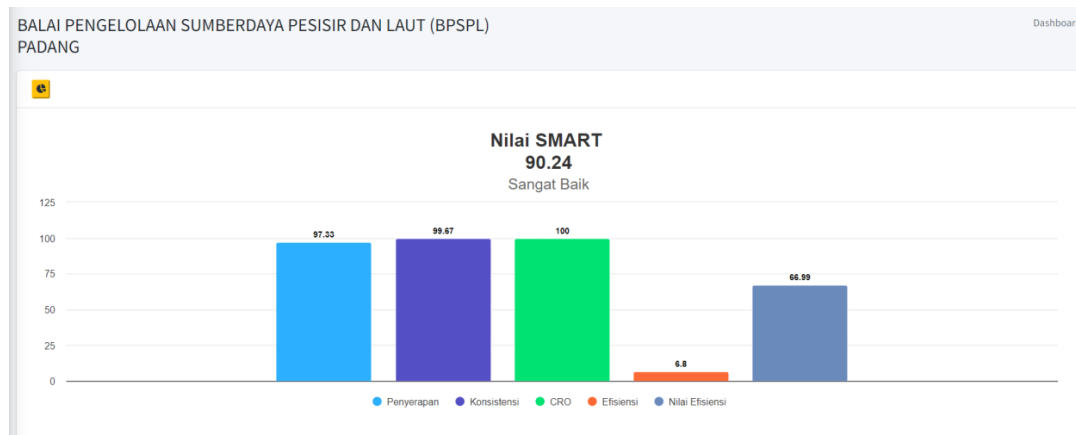
Hingga akhir tahun 2023, realisasi anggaran mencapai **Rp13.388.427.399,00** (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) **dengan persentase 97,33%**. Adapun realisasi anggaran BPSPL Padang secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 61. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Tahun 2023

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang		13.755.908.000	250.000.000	13.388.427.399	97,33
2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut					
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	25.000.000	-	24.885.942	99,5
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400.000.000	-	397.382.565	99,3
2362.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	144.000.000	-	144.000.000	100



Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Total Blokir (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2362.REA.003	Kawasan Konservasi yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	250.000.000	250.000.000	-	-
2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	650.000.000	-	637.213.149	98
2362.REB.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan	959.558.000	-	947.493.293	98,7
2362.UBA.001	Pemerintah Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	100.000.000	-	99.087.090	99,1
2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					
2365.PBW.001	Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	40.000.000	-	37.904.145	94,8
2366 Perencanaan Ruang Laut					
2366.PBT.009	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	941.520.000	-	925.994.678	98,4
2366.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	367.000.000	-	366.350.000	99,8
2366.SCC.002	Petugas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang Ditingkatkan Kompetensinya	127.350.000	-	121.373.454	95,3
2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut					
2367.EBA.956	Layanan BMN	63.100.000	-	61.416.673	97,3
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	34.400.000	-	29.222.359	84,9
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	187.300.000	-	186.321.648	99,5
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	9.001.480.000	-	8.952.005.365	99,5
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	258.300.000	-	253.952.908	98,3
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	92.400.000	-	90.642.304	98,1
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	60.000.000	-	59.875.242	99,8
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	54.500.000	-	53.307.711	97,8



Gambar 87. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2023
 (Sumber: Aplikasi SMART-Kemenkeu, Januari 2024)

Pengelolaan anggaran BPSPL Padang dapat dimonitor melalui aplikasi SMART DJA yang memiliki lima aspek penilaian, meliputi penyerapan, konsistensi, capaian rincian output, efisiensi, dan nilai efisiensi. Berdasarkan pengukuran nilai kinerja anggaran tahun 20203, terdapat efisiensi pada pengelolaan anggaran BPSPL Padang senilai 66,99. Untuk peningkatan Nilai Kinerja Anggaran pada tahun berikutnya, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan nilai efisiensi, baik dapat berupa pencapaian lebih pada rincian outputnya maupun pengurangan penyerapan anggaran.

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengukuran kinerja tahun 2023, terdapat 16 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan yang juga disampaikan perkembangan kegiatannya. Adapun hasil pengukuran kinerja menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://kinerjaku.kkp.go.id/> menunjukkan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang pada tahun 2023 adalah 113,23 (kategori istimewa).**

Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang tahun 2023:

1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang telah mencapai 3 dari target 3 Dokumen melalui identifikasi/verifikasi, sosialisasi, dan monitoring pemanfaatan ruang laut.
2. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang telah mencapai 3 dari target 2 Daerah pendampingan pengusulan penetapan kawasan konservasi daerah di Provinsi Sumatra Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatra Barat.
3. Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang telah mencapai 3 dari target 3 Kelompok melalui penyaluran bantuan kepada kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang telah mencapai 10 dari target 7 jenis melalui penyediaan data dan informasi jenis ikan dilindungi dan respon cepat penanganan biota laut dilindungi.
5. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang telah mencapai 8 dari target 5 jenis melalui penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan pelayanan peredaran jenis ikan yang dimanfaatkan.
6. Nilai PNBP BPSPL Padang telah mencapai Rp958.877.695,00 dari target Rp524.347.000,00 melalui pelayanan peredaran jenis ikan yang dimanfaatkan.
7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang telah mencapai 95,34 dari target 93,75
8. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang telah mencapai 90,24 dari target 86.
9. Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang telah mencapai 93,31 dari target 75.
10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang telah mencapai 90,82 dari target 84.
11. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang telah mencapai 88,20 dari target 75.
12. Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Padang telah mencapai 4 dokumen dari target 4 dokumen.
13. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah mencapai 116,65% dari target 92%.
14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai 100% dari target 75%.
15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Padang mencapai 100% dari target 100%.
16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang mencapai xx dari target 77,5.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja tahun 2023 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp14.516.480.000,00** (Empat Belas Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Namun demikian, terdapat **blokir terhadap anggaran tersebut sejumlah Rp1.622.000.000,00** (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah). Adanya blokir tersebut tidak mempengaruhi pagu anggaran secara keseluruhan, namun anggaran yang terblokir tersebut belum dapat digunakan. Dalam perkembangannya, pada tanggal 30 Agustus 2023 **terdapat penambahan pagu anggaran BPSPL Padang yang bersumber dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1.239.428.000,00** yang mana merupakan hasil pembagian dari PNBP DJPKRL. Penambahan tersebut menyebabkan **peningkatan pagu anggaran BPSPL Padang menjadi Rp15.755.908.000,00** (Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah). Lebih lanjut, pada tanggal 10 Oktober 2023 Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor S-371/MK.2/2023 menginstruksikan Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan relaksasi non belanja pegawai dari *automatic adjustment* dengan mengajukan usulan revisi pengurangan alokasi anggaran. Atas dasar hal tersebut, terdapat penarikan blokir Anggaran Biaya Tambahan senilai Rp1.200.000.000,00 dan pembukaan blokir anggaran senilai Rp184.000.000,00 sehingga pagu BPSPL Padang menjadi Rp14.555.908.000,00. Dinamika pun masih berlanjut dengan adanya pergeseran belanja pegawai ke eselon 1 sebesar Rp800.000.000,00 sehingga **pagu BPSPL Padang yang diukur kinerjanya pada tahun 2023 menjadi Rp13.755.908.000,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dengan total blokir sebesar Rp250.000.000,00. Hingga akhir tahun 2023, realisasi anggaran mencapai Rp13.388.427.399,00** (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) **dengan persentase 97,33%**. Dalam pengelolaan anggaran, terdapat nilai efisiensi sebesar 66,99 yang diukur menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu.

4.2. Rekomendasi

A. Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan III 2023

Rekomendasi pada triwulan III 2023 adalah melaksanakan identifikasi calon penerima bantuan konservasi tahun anggaran 2024 di wilayah kerja BPSPL Padang. Dalam upaya tindak lanjutnya, BPSPL Padang melaksanakan identifikasi calon kelompok potensial penerima bantuan konservasi di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Jambi. Selain itu, BPSPL juga menghimpun informasi terkait calon kelompok masyarakat potensial lainnya di wilayah kerja BPSPL Padang. Rekomendasi kedua yaitu memulai penyusunan laporan kegiatan yang telah rampung untuk kemudian diinventarisasi. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, tim BPSPL Padang Menyusun matriks monitoring pelaporan untuk memantau kelengkapan laporan-laporan kegiatan yang harus dipenuhi.

B. Rekomendasi Tahun 2024

Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan hiu dan pari di Provinsi Riau dan pemanfaatan sidat di Kabupaten Agam dengan masa pendataan selama satu tahun,
2. Menambah lokasi *Coral Stock Center* di Kabupaten Pasaman Barat dan Bintan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2023



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 **BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)** **PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Irfansyah

Jabatan : Plt. Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang



Rahmat Irfansyah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
 PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	1. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang	2. Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	2
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		4. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	1
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	5. Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	7
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
6.	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	7.	Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan)	2
7.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Padang	8.	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	524.347
8.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Padang	9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	89
		10.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (Nilai)	82
		11.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Padang (Nilai)	75
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)	84
		13.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (Nilai)	75
		14.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		15.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		18.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	800.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.625.000.000
3.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	500.000.000
4.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	40.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	10.551.480.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2023		14.516.480.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Pengelolaan
Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang



Rahmat Irfansyah



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Kurniawan

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Fajar Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
 PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
2.	Terwujudnya Kawasan Konservasi yang ditetapkan di Tingkat Daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang	2.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	2
3.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
4.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	4.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	7
5.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	5.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
6.	Meningkatnya Nilai PNBPN BPSPL Padang	6.	Nilai PNBPN BPSPL Padang (Rp.000)	524.347
7.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Padang	7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	93,75
		8.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (Nilai)	82

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	9. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Padang (Nilai)	75
	10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)	84
	11. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (Nilai)	75
	12. Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
	13. Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
	14. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
	15. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.435.870.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	2.528.558.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	40.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	9.751.480.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2023		13.755.908.000

Jakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang


Fajar Kurniawan



Lampiran 2. Penghargaan yang Diterima BPSPL Padang



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR: B.270.3/DJPRL.1/KP.540/I/2023

Diberikan Kepada:

BALAI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

Sebagai Satker yang Melampaui Target PNPB Tahun 2022
Lingkup Ditjen PRL

Yogyakarta, 27 Januari 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi., M.Sc.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

SERTIFIKAT PENGHARGAAN

NOMOR: B.272.2/DJPRL.1/KP.540/I/2023

Diberikan Kepada:

BALAI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

Sebagai Satker Penyelenggaraan SPIP Terbaik Tahun 2022
Kelompok Satker Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PRL

Yogyakarta, 27 Januari 2023
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi., M.Sc.

Certificate of Registration



Registration No. : QAIC / ID / 11112 - A

Q.A. Indonesia Certification

Hereby grants to:

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or from only the address given below in accordance with the Quality Management System in compliance with ISO 9001:2015.

Address to which this Certificate refers :

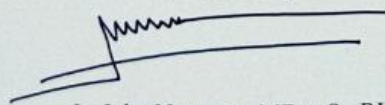
**Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Lubuk Minturun,
Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat**

Approved Scope to which this Certificate refers:

Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered and Protected Fish

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirement may be obtained by consulting the organization)

For and on behalf of QA Indonesia



Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 02 February 2023 - **Re-assessment Date** : 02 February 2024

Date of Initial Registration : 02 February 2023 - **Certificate Expiry Date** : 02 February 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board.

QA INDONESIA CERTIFICATION

Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng, Jakarta 10310

Telp: 021 - 21230866

Email: admin@qai.co.id

Website: www.qai.co.id



Registration No : QAIC / ID / 11112 – A

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

Location

Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Kec. Koto Tengah, Kota Padang,
Sumatera Barat

Registered Activities :

1. Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri
2. Surat Rekomendasi

Certificate Issue Date : 02 February 2023 - Re-assessment Date : 02 February 2024
Date of Initial Registration : 02 February 2023 - Certificate Expiry Date : 02 February 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by The Governing Board

QA INDONESIA CERTIFICATION

Address: Surabaya St No.11, Menteng, Jakarta 10310
Telp: 021 - 21230866
Email: admin@qai.co.id
Website: www.qai.co.id



